



## KATA PENGANTAR


Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat merampungkan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bone Bolango untuk Tahun 2017. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja selama tahun 2017 belum dapat memenuhi harapan sebagaimana janji politik kami yang termuat dalam Visi Misi RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021, Oleh karenanya kami memohonkan maaf jika dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan yang hal ini tentunya tidak lepas dari kodrat kita sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan, dengan harapan kiranya hasil evaluasi kinerja ini akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi kemajuan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kedepan menuju Bone Bolango Cemerlang 2021. Semoga kita semua beroleh Berkah dan Ridha Allah SWT, Amin.....

Bone Bolango, Maret 2018

BUPATI BONE BOLANGO



**HAMIM POU**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

#### 1. Umum

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). Bertitik tolak Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember yang mengatur Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo yang kala itu hanya memiliki tiga daerah, sementara idealnya minimal harus memiliki lima Kabupaten/Kota, maka atas semangat dan aspirasi seluruh kalangan masyarakat di empat Kecamatan di Kabupaten Gorontalo masing-masing Kecamatan Suwawa, Kabila, Tapa dan Bonepantai dibentuklah Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB) yang berusaha, berjuang menjadikan empat kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah Kabupaten. Tepat tanggal 27 Januari 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

Sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan daerah, diamanatkan bagi setiap Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dihadapan paripurna DPRD. Berpedoman kepada pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Bolango Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021. Aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam LKPJ Bupati Bone Bolango Tahun 2017 disusun secara komprehensif, integratif dan informatif yang bertujuan agar informasi yang disampaikan dalam LKPJ dapat menjadi instrument pertanggungjawaban Kepala Daerah serta bahan evaluasi kedepan dalam memenuhi target RPJMD 2016-2021.

Laporan ini juga merupakan *progress report* tahun 2017 pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bupati Bone Bolango kepada rakyat melalui DPRD. Dalam laporan ini dijabarkan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan urusan pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2017.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Bolango Tahun 2017 adalah Untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dalam bidang administrasi Pemerintahan, penyelenggara pembangunan di daerah, dan pembinaan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan LKPJ adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
2. Terwujudnya azas transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan daerah.





3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan potensi Sumber daya Alam (SDA) berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini,
4. Memberikan gambaran kemajuan perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat, stabilitas, ketertiban dan keamanan daerah.

### **3. Landasan Penyusunan**

Di samping itu, penyusunan LKPJ ini juga berpedoman pada peraturan perundangan sebagaimana berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

## B. Gambaran Umum Daerah

### 1. Kondisi Geografis

#### ❖ Letak Geografis

Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1984,58 Km<sup>2</sup> berada pada ketinggian 0 – 1500 meter dari permukaan laut, terletak antara 0,27' – 1.01' Lintang Utara dan antara 121.23' – 122.44' Bujur Timur.

#### Gambar: 1

#### Peta Administrasi Kabupaten Bone Bolango



Sumber :Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

#### ❖ Batas Wilayah

Batas Wilayah Kabupaten Bone Bolango yakni pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan Kecamatan Kota Utara serta Kota Timur Kota Gorontalo. Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebelah



timur dan utara umumnya merupakan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sebagai kawasan penyangga (buffer area) ekosistem lingkungan. Berdasarkan kondisi ini, lahir sebuah konsep inovatif untuk merencanakan wilayah tersebut sebagai kawasan penyangga (buffer area) dan secara bertahap membuka akses lintas utara selatan melalui berbagai program strategis antara lain pembukaan jalan Tapa – Atinggola, membangun jalan lingkar dalam rangka pengembangan berbagai wilayah kawasan yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam antara lain sektor pertanian dan peternakan serta perkebunan. Disamping itu, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi pengembangan kawasan kepariwisataan daerah.

**Tabel 1.1**  
**Gambaran Batas Wilayah Administrasi**  
**Kabupaten Bone Bolango**

<b>BATAS WILAYAH</b>	<b>BERBATASAN</b>
Sebelah Utara	Kecamatan Atinggola Kab. Gorontalo Utara dan Kab. Bolaang Mongondow Utara Prov. Sulut
Sebelah Timur	Kab. Bolaang Mongondow Selatan Prov. Sulut
Sebelah Selatan	Kec. Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo
Sebelah Barat	Kecamatan Kota Utara, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango

#### ❖ Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Bone Bolango memiliki luas wilayah 1.984,58 Km<sup>2</sup> yang tersebar pada 18 kecamatan. Dengan luas wilayah tersebut maka Kabupaten Bone Bolango memiliki proporsi wilayah kurang lebih 16,24% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.2** berikut ini.



**Tabel 1.2**  
**Luas Wilayah Kabupaten Bone Bolango**  
**Menurut Kecamatan**

<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS ( KM<sup>2</sup> )</b>	<b>PERSENTASE</b>
1. Tapa	64,41	3,25
2. Bulango Utara	176,09	8,87
3. Bulango Selatan	9,87	0,50
4. Bulango Timur	10,82	0,55
5. Bulango Ulu	78,41	3,95
6. Kabila	193,45	9,75
7. Botupingge	47,11	2,37
8. Tilongkabila	79,74	4,02
9. Suwawa	33,51	1,69
10. Suwawa Selatan	184,09	9,28
11. Suwawa Timur	127,80	6,44
12. Suwawa Tengah	64,70	3,26
13. Kabila Bone	143,51	7,23
14. Bonepantai	161,82	8,15
15. Bulawa	111,01	5,59
16. Bone Raya	64,12	3,23
17. Bone	72,71	3,66
18. Pinogu	361,40	18,21
<b>JUMLAH</b>	<b>1984,58</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango*

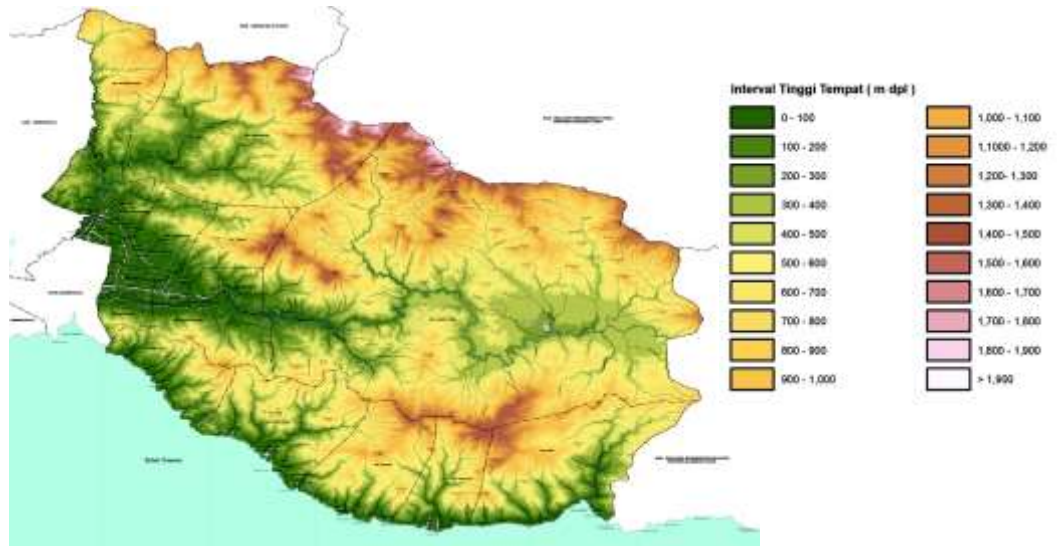
#### ❖ **Topografi**

Kondisi wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi (pegunungan).





**Gambar: 2**  
**Peta Topografi Kabupaten Bone Bolango**



Sumber :Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok, yakni :

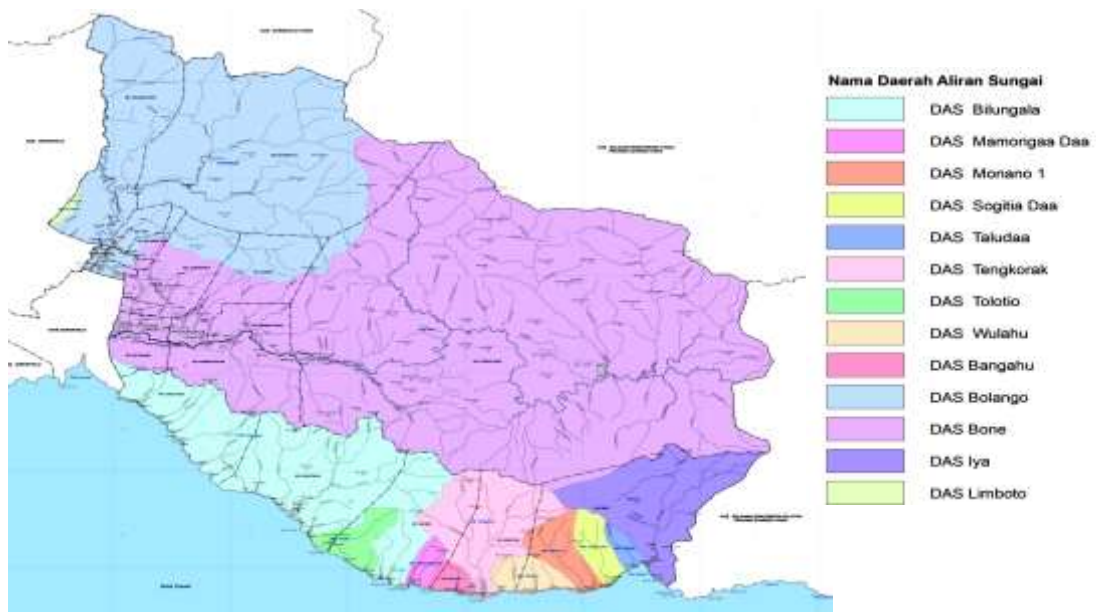
- Kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada kemiringan lereng di atas 40%. Persebaran lahan berada di Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Kabila dan Bulango Utara.
- Kondisi lahan dengan relief berbukit (bergelombang) dengan tekstur morfologi sedang. Persebaran lahan sebagian besar berada di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.
- Kondisi dengan relief permukaan rendah. Persebaran lahan berada di Kecamatan Tapa, Suwawa dan Kabila.

Dilihat dari ketinggian wilayah dari permukaan laut, umumnya Kabupaten Bone Bolango merupakan dataran tinggi dan pegunungan seperti pada Gambar3.Selain itu, wilayah Kabupaten Bone Bolango ini dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS).



**Gambar : 3**

**Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bone Bolango**



*Sumber :Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011*

DAS terbesar yang melalui wilayah tersebut adalah DAS Bone dan Bulango, dimana Kecamatan yang dilalui adalah Kecamatan Suwawa, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tapa. Luas DAS ini adalah  $\pm 265.000$  Ha dengan panjang sungai utama 100 Km yang bermuara ke Teluk Tomini. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kebutuhan sehari – hari masyarakat, diperoleh melalui air tanah galian dengan kedalaman 5 – 10 meter.

❖ **Pola Penggunaan Lahan**

Pola Penggunaan Tanah pada hakekatnya adalah merupakan gambaran didalam ruang yang merupakan gabungan hasil jenis usaha, tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.3.



**Gambar: 4**  
**Peta Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Bone Bolango**



Sumber :Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011



**Tabel 1.3**  
**Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014**

No	Penggunaan Lahan	LUAS ( Ha )
		2014
1.	<b>Hutan</b>	
	1. Taman Nasional	104.740
	2. Hutan Lindung	15.930
	3. Hutan produksi tetap	824
	4. Hutan produksi terbatas	18.824
2.	<b>Hutan Basah</b>	
	1. Sawah yang diolah	2.044
	2. Sawah yang belum diolah	-
	3. Tambak	-
	4. Kolam dan Danau	74
	5. Rawa-rawa yang ditanami	4
3.	<b>Lahan Kering</b>	
	1. Tegalan	7.169
	2. Ladang / huma	6.444
	3. Lahan kering sementara tidak diusahakan	6.444
	4. Perkebunan	15.758
	5. Penggembalaan/ padang rumput	2.936
4.	<b>Bangunan dan lain-lain</b>	
	1. Pekarangan / tanah untuk bangunan	487
	2. Taman Nasional	7.355
	3. Hutan Lindung	9376
	<b>Total</b>	<b>198.431</b>

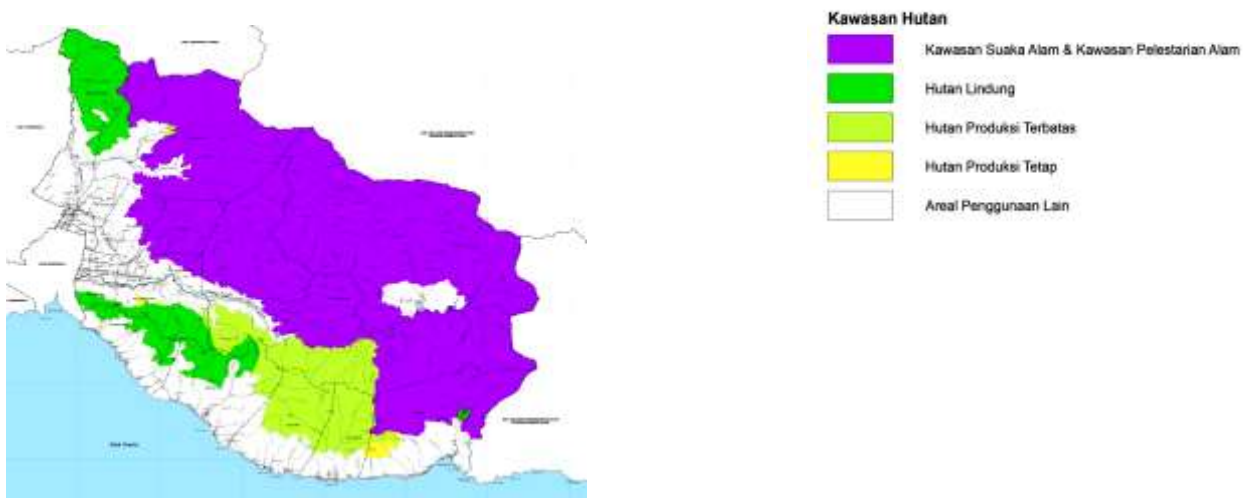
Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Bone Bolango

## ❖ Potensi Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem bumi.

**Gambar: 5**

### **Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bone Bolango**



Sumber :Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

Walaupun belum sampai ketinggian yang rusak parah, namun kerusakan hutan di daerah Bone Bolango cukup mengkhawatirkan dimana dapat membawa bencana alam bagi daerah lain.

Pada beberapa tahun terakhir ini, Kota Gorontalo mengalami banjir akibat kiriman air dari aliran sungai Bone maupun sungai Bolango, yang diakibatkan degradasi ekosistem hutan di daerah Bone Bolango. Salah satu dampak kerusakan hutan lainnya adalah jumlah satwa yang terancam punah. Kondisi hutan ini diperparah lagi dengan masih berlangsungnya pola perombakan/perambahan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sektor pembangunan lain, batas-batas kawasan yang perlu direkonstruksi.

Luas kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango adalah seluas 140.535,27 Ha. Adapun potensi sumber daya hutan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.4



**Tabel 1.4**  
**Potensi Sumberdaya Hutan di Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2017**

No	Jenis Hutan	Potensi (Ha)
		2017
1	Hutan Lindung	15.929,55
2	Hutan Produksi Terbatas	18.841,67
5	Hutan Taman Nasional	105.764,05

Sumber Data : Bidang Tata Ruang Dinas PU

#### ❖ **Potensi Pariwisata**

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan dilapangan, Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pengembangan wisata umumnya wilayah pantai selatan berupa wisata pantai dan wisata bawah laut. Disamping itu juga sangat potensial untuk pengembangan wisata alam jenis *outbond* (*Hiking, Tracking* dan *Climbing* serta *Arung Jeram / Susur Sungai*). Pengembangan obyek wisata seperti ini masih sangat kurang, sehingga peluang untuk pengembangannya masih cukup besar. Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang di sepanjang pesisir perairan pantai selatan (teluk tomini) memberikan peluang tersendiri untuk pengembangan wisata pantai khususnya lagi untuk wisata bawah laut yang terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada umumnya obyek wisata Kabupaten Bone Bolango saat ini belum dikemas ke dalam paket wisata yang terkait dengan pariwisata nasional



sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Sarana Wisata, Seni dan Budaya**  
**di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017**

TAHUN	Jumlah Obyek Wisata			
	Wisata Alam	Wisata Buatan	Wisata Bahari	Wisata Budaya Sejarah
2017	Pemandian Air Panas Lombongo	Bukit Cinta	Kawasan Pantai Botutonuo	Makam Nani Wartabone
	Air Terjun Taludaa	Danau Perintis	Taman Laut Olele	Makam Hubulo
	Air Terjun Molotabu	Wisata Meranti	Pantai Pinomontiga	Makam Raja Atinggola
	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Center Point		Desa Adat Pinogu
	<i>River Tubir</i> Longalo	Bukit Ulantha		

\*Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango

### **Kawasan Strategis Wisata Alam**

Kawasan ini mempunyai pengaruh sangat penting dalam mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten yang aman dan nyaman dalam perspektif ekologis dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penentuan kawasan ini di Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan dalam dua tipe yaitu :

- (1). Kawasan strategis wisata alam yang berbasis wisata bahari yaitu Pantai Olele
- (2). Kawasan strategis wisata alam yang berbasis wisata daratan yaitu :
  - Kawasan Air Panas Lombongo, di perbukitan Lombongo, Desa Lombongo, Kec. Suwawa Tengah
  - Kawasan Air Panas Libungo, Desa Libungo, Kec. Suwawa Selatan ;
  - Air Terjun Ilohuuwa Desa Ilohuuwa, Kec. Bone ;
  - Kawasan Danau Perintis, Kec. Suwawa ;
  - Kawasan Taman Laut Olele ,Desa Olele,Kecamatan Kabila Bone) ;
  - Kawasan Pantai Botutonuo, Desa Botutonuo, Kec. Kabila Bone) ;
  - Kawasan Pantai Molotabu, Desa Molotabu, Kec. Kabila Bone) ;
  - Kawasan Pantai Bulawa, Kec. Bulawa
  - Kawasan Wisata Alam Meranti, Desa Langge, Kec. Tapa



Kawasan wisata telah banyak menjadi sumber pendapatan bagi suatu daerah misalnya Bali. Oleh karena kawasan wisata alam di Kabupaten Bone Bolango harus mendapat perhatian serius karena memiliki nilai potensi dikembangkan. Kawasan ini bisa menjadi sumber utama PDRB Hijau. Pengembangan wisata alam perlu dilakukan melalui suatu rencana dan strategi, sebagai berikut :

- Pengembangan kawasan disesuaikan dengan kapasitas ekologis;
- Pemberdayaan masyarakat lokal melalui *management of coloboration*;
- Pembangunan infrastruktur penunjang;
- Pengendalian dampak antropogenis;
- Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan usaha wisata;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk mengoptimalkan fungsi kawasan;
- Pembuatan payung hukum;

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan dilapangan, Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pengembangan wisata umumnya wilayah Pantai Selatan berupa wisata pantai dan wisata bawah laut. Disamping itu juga sangat potensial untuk pengembangan wisata alam jenis *Out Bond (Hiking ,Tracking dan climbing serta arung jeram /susursungai)*. Pengembangan obyek wisata seperti ini masih sangat kurang, sehingga peluang untuk pengembangannya masih cukup besar. Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang disepanjang pesisir perairan Pantai Selatan (TelukTomini) memberikan peluang tersendiri untuk pengembangan wisata pantai khususnya lagi untuk wisata bawah laut yang terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun manca Negara.





## 2. Gambaran Umum Demografis

### ❖ Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 sebanyak 160.497 jiwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tersebar pada 18 Kecamatan.

### ❖ Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk di setiap kecamatan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2017
1.	Tapa	7.511
2.	Bulango Utara	7.914
3.	Bulango Selatan	10.839
4.	Bulango Timur	5.736
5.	Bulango Ulu	4.077
6.	Kabila	23.045
7.	Botupingge	6.521
8.	Tilongkabila	18.515
9.	Suwawa	12.845
10.	Suwawa Selatan	5.393
11.	Suwawa Timur	5.470
12.	Suwawa Tengah	6.322
13.	Pinogu	2.097
14.	Kabila Bone	11.285
15.	Bonepantai	10.944
16.	Bulawa	5.377
17.	Bone Raya	6.935
18.	Bone	9.671
<b>Jumlah Total</b>		<b>160.497</b>

Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Catatan SipilTahun 2017

Sedangkan rata-rata Luas Wilayah dan penduduk perkecamatan dan per-Km<sup>2</sup> berdasarkan sebaran kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:



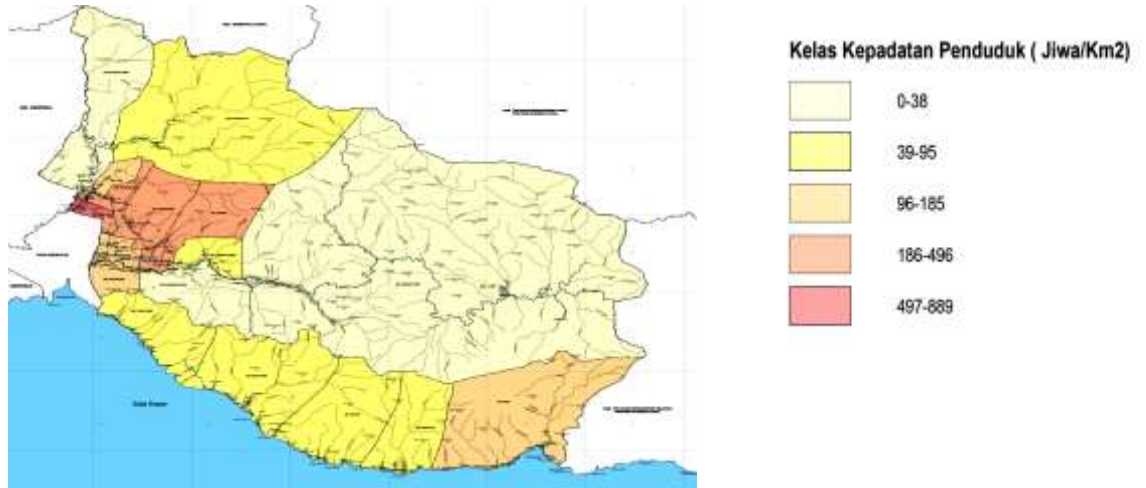
**Tabel 1.7**  
**Rata-rata Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )
		KM <sup>2</sup>	%	Jiwa	%	
1.	Tapa	64,41	3,25	7.511	4,68%	117
2.	Bulango Utara	176,09	8,87	7.914	4,93%	45
3.	Bulango Selatan	9,87	0,50	10.839	6,75%	1098
4.	Bulango Timur	10,82	0,55	5.736	3,57%	522
5.	Bulango Ulu	78,41	3,95	4.077	2,54%	51
6.	Kabila	193,45	9,75	23.045	14,36%	120
7.	Botupingge	47,11	2,37	6.521	4,06%	137
8.	Tilongkabila	79,74	4,02	18.515	11,54%	231
9.	Suwawa	33,51	1,69	12.845	8,00%	377
10.	Suwawa Selatan	184,09	9,28	5.393	3,36%	29
11.	Suwawa Timur	127,80	6,44	5.470	3,41%	42
12.	Suwawa Tengah	64,70	3,26	6.322	3,94%	98
13.	Pinogu	143,51	7,23	2.097	1,31%	6
14.	Kabila Bone	161,82	8,15	11.285	7,03%	67
15.	Bonepantai	111,01	5,59	10.944	6,82%	78
16.	Bulawa	64,12	3,23	5.377	3,35%	48
17.	Bone Raya	72,71	3,66	6.935	4,32%	107
18.	Bone	361,40	18,21	9.671	6,03%	133
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.984,58</b>	<b>100</b>	<b>160.497</b>	<b>100,00</b>	<b>81</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017



**Gambar: 7**  
**Peta Kepadatan Penduduk( jiwa/KM2 )**



Sumber :Dok. RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi

#### a. **Kondisi Sosial Masyarakat**

Kinerja makro ekonomi daerah Kabupaten Bone Bolango tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan regional. Berbagai langkah strategis yang dilakukan dalam rangka penyesuaian laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat difokuskan pada kebijakan alokasi dan distribusi fiskal daerah serta mendorong tumbuhnya investasi daerah disamping merekomendasikan strategi kebijakan ekonomi lainnya yang dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ekonomi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas lapangan kerja, pemeratakan pendapatan masyarakat, membangun basis-basis ekonomi daerah, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor sekunder dan tersier.

Secara agregat, perekonomian kabupaten Bone Bolango dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend pertumbuhan yang cukup baik walaupun diakui bahwa pertumbuhan tersebut dibawah tingkat rata-rata



pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Dibanding tahun 2015 yang memiliki pertumbuhan ekonomi diangka 6,52 %, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango berada pada angka 6,61 %. Untuk Angka pengangguran Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016 adalah 6,76 %.

## b. Kondisi Perekonomian Daerah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

**Tabel 1.8**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**  
**Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014 – 2016**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

No	Sektor	PDRB Harga Berlaku Per-Tahun (Jutaan Rupiah)		
		2014	2015	2016
A	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	987.303,28	1.120.200,75	1.268.935,32
B	Pertambangan dan Penggalian	55.814,34	59.587,63	59.938,19
C	Industri Pengolahan	172.215,10	195.239,91	222.325,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	756,47	648,35	.814,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	757,38	871,30	1.054,58
F	Konstruksi	311.144,98	367.031,21	413.842,78
G	Pedagang besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	331.632,74	386.618,82	445.679,73
H	Transportasi dan pergudangan	30.634,35	34.775,48	38.010,15
I	Penyedia akomodasi dan makan minum	27.912,45	32.869,06	37.487,31
J	Informasi dan komunikasi	50.539,30	56.645,64	64.783,62
K	Jasa keuangan dan asuransi	54.569,97	64.121,64	78.590,57
L	Real estate	72.916,04	80.976,02	92425,
M,N	Jasa perumahan	3.536,39	4.118,20	4.562,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertannahhan dan aminan sosial wajib	344.990,63	366.933,88	377.122,59
P	Jasa pendidikan	129.054,45	145.367,55	157.733,59
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	135.632,86	156.691,44	175.840,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	58,924,33	65.141,81	70.180,55
<b>PDRB</b>		<b>2.768.335,08</b>	<b>3.137.838,68</b>	<b>3.509.327,97</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango



Struktur perekonomian Bone Bolango didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; industri pengolahan; dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.





## BAB II

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

### A. Visi dan Misi

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta memperhatikan permasalahan, isu-isu strategis daerah dan tantangan yang dihadapi dimasa mendatang maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango untuk periode 2016-2021 yang telah disampaikan oleh Hamim Pou dan Mohammad Kilat Wartabone sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Periode 2016-2021, yakni sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG”**

**CEMERLANG** dalam makna luas adalah suatu kondisi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang *“Unggul dan Berdaya saing”* serta masyarakatnya berada pada tingkat peradaban tinggi. **CEMERLANG** dalam makna akronim diterjemahkan kedalam 3 (tiga) pilar utama, yakni:

#### **CE (Cerdas), MER (Modern), LANG (Gemilang)**

**Cerdas** : Adalah kondisi masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai warga negara berlandaskan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi intelektual, akal budi emosional, dan akal budi spiritual. Kecerdasan tersebut merefleksikan sebuah kondisi masyarakat religius yang senantiasa memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral, etika dan agama. Kecerdasan dimaksud juga menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang sehat, masyarakat terdidik, serta masyarakat dinamis dengan kreatifitas, inovasi dan produktivitas tinggi.

**Modern** : Adalah kondisi entitas masyarakat Bone Bolango yang memiliki kemajuan peradaban manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut terwujud



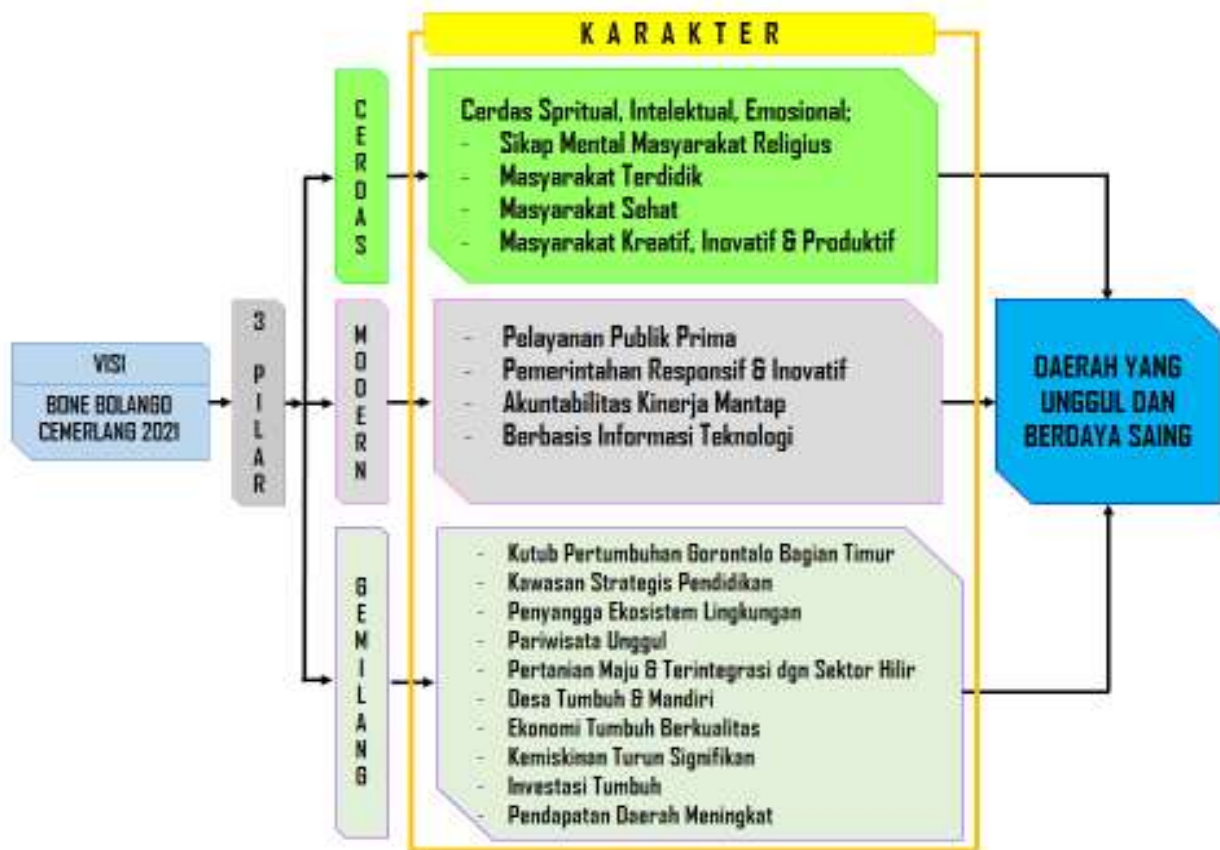
juga dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik, pemerintahan yang responsive dan innovative (*Innovative Government*), serta mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai akuntabilitas tinggi (*Accountability*) terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

**Gemilang** : Memiliki makna capaian kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi dalam konteks kesejahteraan sosial, dan sejahtera dari sisi kebijakan sosial yang memberikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan target besar yakni pengurangan rakyat miskin secara konsisten dan berkelanjutan. Dari dimensi wilayah mempunyai makna sebagai wilayah dengan keunggulan comparative dan keunggulan kompetitive. Kondisi Bone Bolango gemilang yang ingin diwujudkan dan menjadi komitmen besar seluruh stakeholders pembangunan antara lain cita-cita untuk mewujudkan Bone Bolango sebagai kutub pertumbuhan baru di bagian timur Gorontalo, kawasan strategis pendidikan, kawasan utama pariwisata, serta mempertahankan peran Bone Bolango sebagai kawasan penyangga ekosistem lingkungan (*Green City*). Cita-cita tersebut juga dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kemandirian desa, pertanian yang terintegrasi (*hulu hilir integrated*), peningkatan pertumbuhan investasi dan pendapatan daerah.



**Gambar 2.1.**

Visi dan Karakter Utama Visi Daerah 2016-2021



## B. Misi

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Misi menentukan arah pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan. Perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango tersebut, akan dilaksanakan melalui 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021, yakni sebagai berikut:

**Misi Kesatu: Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera.**

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin berkualitas melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera. Dengan





pembangunan tersebut, diharapkan dapat tercipta sumberdaya manusia yang berkarakter dan mandiri serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, bangsa dan negara.

**Misi Kedua: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah yang berbasis pelestarian lingkungan.**

Merupakan upaya keberlanjutan (percepatan) tahapan pembangunan daerah Bone Bolango dari periode sebelumnya (2010-2015) menuju periode akan datang (2016-2021) dengan memperkuat koneksitas dan sinergitas antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa sebagai pilar utama pertumbuhan wilayah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan branding utama sebagai kota hijau (*Green City*). Pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan utama bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan afirmatif melalui pembangunan desa khususnya desa-desa tertinggal diharapkan dapat semakin mempercepat pertumbuhan daerah dan kemajuan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

**Misi Ketiga: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Merata dan Berkeadilan**

Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi pendayagunaan sumber daya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perekonomian daerah harus terus tumbuh tetapi tetap berkualitas yang menjamin pemerataan dan keadilan. Perekonomian daerah harus kompetitif yang tidak semata-mata dalam dimensi lokal tapi kompetitif dalam dimensi regional dan global. Perekonomian daerah harus semakin kreatif dan terintegrasi yang tidak semata-mata mengandalkan peran sektor primer khususnya pertanian tetapi semakin membuka peran lebih besar pada sektor-sektor sekunder dan tersier.

**Misi Keempat: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Modern dan Berbudaya**



Adalah upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada prinsip-prinsip *Good and Clean Governance* dengan menekankan pada kemampuan adaptif terhadap perubahan dengan tetap berpegang teguh pada modernitas yang bercirikan nilai-nilai budaya.

Keempat misi pembangunan tersebut diimplementasikan dalam tiga dimensi pembangunan utama yakni:

#### **A. Dimensi Pembangunan Manusia**

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat cerdas yang religious, bermoral, berbudaya, unggul, produktif, innovative dan berdaya saing menjadi bagian penting yang harus di capai oleh setiap upaya pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi prioritas, tidak hanya dilingkungan birokrasi pemerintahan tetapi juga dilingkungan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dikembangkan seiring dengan peningkatan kinerja dan sikap mental aparatur. Membangun aparatur yang bersih, berwibawa, disiplin, berdedikasi, loyal, professional, kreatif, proaktif, responsive, innovative dan memiliki pengetahuan dan semangat juang yang tinggi masih akan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 2016-2021. Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan masyarakat madani akan tetap menjadi penyemangat utama dalam pencapaian Bone Bolango Cemerlang 2021.

#### **B. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan**

Pengembangan sector unggulan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. Pembangunan daerah keseluruhan membutuhkan lokomotif utama yang dapat menjadi **“Prime Mover”** pembangunan dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Sumberdaya daerah yang tersedia dan berpotensi besar sebagai basis ekonomi harus memberikan daya dorong dan daya ungkit bagi akselerasi pembangunan daerah. Pembangunan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam dikembangkan dengan focus utama pada pengembangan sector unggulan yang



berbasis sumber daya alam, keunggulan lokasi, keunggulan sumber daya manusia serta arahan kebijakan spasial pada tingkat regional. Beberapa focus utama yang menjadi unggulan daerah kedepan yakni sector pariwisata, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pemerintahan, jasa pergudangan, sector pertanian tanaman pangan khususnya pertanian organik, usaha perkebunan, pengembangan peternakan dan usaha perikanan, sector sumberdaya air, serta industry pengolahan berbasis sumberdaya local antara lain Kopi Organik Pinogu dan Industri Aren, industry pengolahan hasil peternakan dan hasil perikanan. Sektor pertambangan dan energy menjadi sector penting yang diharapkan dapat menjadi penggerak dan basis pembangunan jangka panjang yang pengelolaannya akan dilakukan secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan terjaganya ekosistem lingkungan.

### **C. Dimensi Pemerataan dan Pengembangan Wilayah**

Pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tersebar merata keseluruh wilayah. Pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah menjadi focus prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 2016-2021 secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur dasar wilayah menjadi penopang utama percepatan pembangunan daerah. Untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat pembangunan hingga pada unit wilayah terkecil maka pembangunan desa menjadi agenda utama pembangunan dalam jangka menengah 2016-2021. Pembangunan wilayah-wilayah terisolir, terpencil, terkebelakang khususnya di wilayah Pinogu, sebagian Suwawa Timur dan Suwawa Selatan, Bulango Ulu, Bulango Utara dan sebagian wilayah di Bone Pesisir, serta penanganan daerah rawan bencana akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembukaan akses lintas selatan yang menghubungkan pusat Ibu Kota Pemerintahan Suwawa dengan Wilayah Bone Pesisir akan menjadi program prioritas penguatan konektivitas wilayah disamping mendorong pembukaan akses lintas utara Tapa – Atinggola/. Pengembangan kawasan-kawasan strategis serta simpul-simpul ekonomi akan didisain dan diimplementasikan secara bertahap untuk mendorong percepatan pertumbuhan wilayah dan mendayagunakan sumberdaya alam lokal.

Gambar 2.2.

Dimensi Pembangunan dan Sasaran Utama Pembangunan  
Kabupaten Bone Bolango 2016-2021



## B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Jangka Menengah

### 1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab (satu) atau lebih sasaran pembangunan.



Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka rumusan strategi berdasarkan misi yang telah diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Keterkaitan Misi, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021**

No.	Sasaran	Strategi	
<b>Misi 1: Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera</b>			
<b>Tujuan 1.1.</b>			
<b>Meningkatkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan berkualitas</b>			
1.1.1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	1.1.1.1.	Perluasan akses dan Peningkatan mutu pendidikan berkarakter melalui Program Bone Bolango Cerdas
1.1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	1.1.2.1.	Peningkatan mutu layanan kesehatan secara terarah, merata dan dapat diakses masyarakat melalui Program Bone Bolango Sehat
		1.1.2.2.	Meningkatkan kesehatan keluarga dan reproduksi
<b>Tujuan 1.2.</b>			
<b>Meningkatkan peranan kepemudaan dan pengarusutamaan gender</b>			
1.2.1.	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga	1.2.1.1.	Peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah
1.2.2.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1.2.2.1.	Pengarusutamaan gender dan peningkatan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri
1.2.3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1.2.3.1.	Mencegah dan menangani tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking)
<b>Tujuan 1.3</b>			
<b>Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin</b>			
1.3.1.	Terbukanya akses layanan perlindungan sosial masyarakat miskin	1.3.1.1.	Pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga
1.3.2	Meningkatnya kepemilikan aset masyarakat miskin	1.3.2.1.	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dasar rumah tangga miskin
1.3.3	Meningkatnya pendapatan dan kemandirian masyarakat miskin	1.3.3.1.	Peningkatan akses masyarakat kurang mampu kepada ekonomi produktif
<b>Misi 2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan hidup</b>			
<b>Tujuan 2.1.</b>			
<b>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Dasar wilayah</b>			
2.1.1.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang konektivitas dan aksesibilitas wilayah	2.1.1.1.	Percepatan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat



No.	Sasaran	Strategi	
2.1.2.	Tersedianya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi serta pemukiman yang layak bagi masyarakat dan lingkungan pemukiman		
2.1.3.	Tersedianya infrastruktur irigasi yang mendukung kedaulatan pangan serta pengelolaan sumber daya air		
2.1.4.	Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan	2.1.4.1.	Mengembangkan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan serta kawasan strategis kabupaten serta pengendalian kawasan rawan bencana sesuai arahan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango
<b>Tujuan 2.2. Meningkatkan pembangunan Desa</b>			
2.2.1.	Terwujudnya kemandirian desa	2.2.1.1.	Percepatan pertumbuhan desa
<b>Misi 3. Mewujudkan perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan</b>			
<b>Tujuan 3.1. Meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan (leading Sectors)</b>			
3.1.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	3.1.1.1.	Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi 'Prime Mover' pembangunan daerah melalui pendekatan Pro-growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro-environment
3.1.2.	Terwujudnya perekonomian daerah yang merata dan berkeadilan	3.1.2.1.	Pengembangan kawasan strategis ekonomi daerah yang menjadi simpul pertumbuhan wilayah, kawasan cepat tumbuh, serta percepatan penanganan wilayah tertinggal, terisolir dan terbelakang
<b>Tujuan 3.2. Menguatkan ketahanan pangan Daerah</b>			
3.2.1.	Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian Terpadu	3.2.1.1.	Peningkatan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis kawasan, pertanian terpadu, serta berbasis agribisnis
3.2.2.	Meningkatnya ketersediaan produksi, distribusi dan konsumsi pangan	3.2.2.1.	Meningkatkan Ketersediaan, keanekaragaman dan berkembangnya konsumsi pangan lokal secara aman, layak dan terjangkau oleh masyarakat luas
<b>Tujuan 3.3. Meningkatkan peluang investasi</b>			
3.3.1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	3.3.1.1.	Peningkatan iklim Investasi yang kondusif yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
<b>Misi 4. Mewujudkan tata pemerintahan moderen yang berbudaya</b>			
<b>Tujuan 4.1.</b>			



No.	Sasaran	Strategi	
<b>Terwujudnya Kualitas Layanan dan Partisipasi Publik</b>			
4.1.1.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	4.1.1.1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		4.1.1.2.	Meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan memperkuat upaya peningkatan PAD
		4.1.1.3.	Optimalkan upaya pemberantasan KKN dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
		4.1.1.4.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui percepatan proses pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
		4.1.1.5.	Meningkatkan sistem pengendalian internal dan membangun kerjasama antar lembaga guna terciptanya sinergisitas dalam pemberantasan KKN
		4.1.1.6.	Meningkatkan koordinasi dengan DPRD Bone Bolango dalam penyusunan Prolegda secara terencana, terpadu, dan sistematis.
		4.1.1.7.	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan yang dapat mempermudah urusan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		4.1.1.8.	Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah secara bertahap
		4.1.1.9.	Implementasi penyediaan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan publik dan penegakan regulasi
		4.1.1.10	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan responsif dan inovatif
		4.1.1.11.	Menciptakan keamanan dan ketertiban selama proses pelaksanaan Pilkada dan Pileg
4.1.2.	Meningkatnya Partisipasi dan Tranparansi dalam Pelayanan Publik	4.1.2.1.	Meningkatkan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat
		4.1.2.2.	Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah berkualitas dan akuntabel
		4.1.2.3.	Penetapan Standar Operating Prosedur pelayanan dan sistem manajemen mutu
		4.1.2.4.	Kepastian penerapan asas profesionalitas dan transparansi dalam pelaksanaan job bidding
4.1.3.	Terkoordinasinya tata kerja kelembagaan antar instansi	4.1.3.1.	Mewujudkan konsistensi perencanaan di dalam dokumen perencanaan, baik



No.	Sasaran	Strategi	
	pemerintahan dan atau pemangku Kepentingan		RKPD terhadap RPJMD maupun dokumen KUA/PPAS terhadap RKPD
		4.1.3.2.	Melakukan kemitraan pembangunan dengan dunia usaha, perguruan tinggi maupun antar daerah
<b>Tujuan 4.2.</b> <b><i>Terciptanya pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan</i></b>			
4.2.1.	Terselenggaranya manajemen perubahan dalam pemerintahan	4.2.1.1.	Mengadakan berbagai riset yang mendalam terhadap berbagai permasalahan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan
4.2.2.	Terlaksananya pelayanan e government (Stepping Stone menuju Digital Government)	4.2.2.1.	Perluasan informasi pelayanan publik untuk mengontrol performa pelayanan sesuai ISO: 9001
		4.2.2.2.	Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam penguasaan teknologi dan informasi
		4.2.2.3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi inovasi pelayanan publik bagi SKPD pelaksana pelayanan

## 2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.2. dibawah ini





Tabel 2.2

**Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021**

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 1: Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera</b>			
<b>Tujuan 1.1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan berkualitas</b>			
1.1.1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	1.1.1.1. Perluasan akses dan Peningkatan mutu pendidikan berkarakter melalui Program Bone Bolango Cerdas	Penyediaan sarana prasarana pendidikan secara terarah, bertahap dan merata hingga wilayah terpencil Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan Pengembangan pendidikan non-formal bagi masyarakat Peningkatan kesejahteraan tenaga guru dan tenaga kependidikan Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan berbasis IT Meningkatkan pelestarian seni budaya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pentas seni dan budaya
1.1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	1.1.2.1. Peningkatan mutu layanan kesehatan secara terarah, merata dan dapat diakses masyarakat melalui Program Bone Bolango Sehat	Pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar hingga keseluruhan wilayah terpencil Pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan rujukan dengan meningkatkan kualifikasi RSUD Toto menjadi tipe B dengan unggulan layanan spesialis tertentu serta kualifikasi RSUD Tombulilato menjadi Tipe C dengan unggulan layanan penyakit jiwa, paru dan narkoba (JPN) Peningkatan ketersediaan dan mutu tenaga kesehatan, termasuk tenaga spesialis secara merata dan memenuhi kebutuhan dan standar layanan minimum.
			Pemenuhan ketersediaan obat baik pada layanan dasar maupun rujukan Peningkatan jaminan sosial kesehatan masyarakat secara merata dan menyeluruh (Universal Health Coverage) Peningkatan layanan kesehatan ibu, anak dan balita Peningkatan perilaku hidup sehat



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				masyarakat
				Pengembangan kemitraan layanan kesehatan
		1.1.2.2.	Meningkatkan kesehatan keluarga dan reproduksi	Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
<b>Tujuan 1.2.</b>				
<b><i>Meningkatkan peranan kepemudaan dan pengarusutamaan gender</i></b>				
1.2.1.	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga	1.2.1.1.	Peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Pembinaan organisasi kepemudaan Pembinaan prestasi olahraga Pembinaan wirausaha pemuda
1.2.2.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1.2.2.1.	Pengarusutamaan gender dan peningkatan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri	Peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan
1.2.3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1.2.3.1.	Mencegah dan menangani tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking)	Peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya Pengembangan kabupaten Bone Bolango sebagai kota layak anak
<b>Tujuan 1.3</b>				
<b><i>Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin</i></b>				
1.3.1.	Terbukanya akses layanan perlindungan sosial masyarakat miskin	1.3.1.1.	Pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga	Pemberian perlindungan sosial masyarakat melalui jaminan sosial kepada masyarakat miskin, anak yatim, janda, penyandang cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
1.3.2	Meningkatnya kepemilikan aset masyarakat miskin	1.3.2.1.	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dasar rumah tangga miskin	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar keluarga yang menjamin kelangsungan hidup keluarga
1.3.3	Meningkatnya pendapatan dan kemandirian masyarakat miskin	1.3.3.1.	Peningkatan akses masyarakat kurang mampu kepada ekonomi produktif	Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana usaha, bantuan/fasilitasi modal usaha, bantuan manajemen dan pemasaran, serta pendidikan dan pelatihan
<b><i>Misi 2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan hidup</i></b>				
<b>Tujuan 2.1.</b>				
<b><i>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Dasar wilayah</i></b>				
2.1.1.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang konektivitas dan aksesibilitas wilayah	2.1.1.1.	Percepatan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan yang menjadi kewenangan daerah Penyediaan sarana penunjang sistim transportasi darat khususnya prasarana terminal sesuai arahan RTRW
2.1.2.	Tersedianya kebutuhan dasar air minum dan			Pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi secara



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
	sanitasi serta pemukiman yang layak bagi masyarakat dan lingkungan pemukiman			terarah, terpadu dan berkelanjutan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah Penyediaan perumahan yang layak serta sarana prasarana lingkungan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan melalui antara lain; (1) pengembangan kawasan perumahan terpadu bagi masyarakat dengan skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, Private Sector dan Masyarakat; (2) peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah; serta (3) skema pengembangan kawasan perumahan lainnya.
2.1.3.	Tersedianya infrastruktur irigasi yang mendukung kedaulatan pangan serta pengelolaan sumber daya air			Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi
2.1.4.	Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan	2.1.4.1.	Mengembangkan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan serta kawasan strategis kabupaten berwawasan lingkungan serta pengendalian kawasan rawan bencana sesuai arahan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango	Penataan pusat ibu kota pemerintahan, pusat kegiatan lokal dan kawasan perkotaan lainnya Peningkatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air Penyediaan arahan rencana ruang dan pengendalian ruang penguatan kelembagaan BKPRD Penyediaan ruang terbuka hijau buatan dan pengendalian kelestarian ruang terbuka hijau alami Penanganan kawasan rawan bencana melalui upaya mitigasi bencana Penguatan kelembagaan Pokja Pengendalian Lingkungan Hidup Penataan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup Pengelolaan, pemanfaatan hutan secara ekonomi, lestari dan berbasis masyarakat serta peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan dari penjarahan, penebangan liar, kebakaran dan peredaran kayu ilegal
<b>Tujuan 2.2. Meningkatkan pembangunan Desa</b>				
2.2.1.	Terwujudnya kemandirian desa	2.2.1.1.	Percepatan pertumbuhan desa	Percepatan pembangunan infrastruktur desa Pengembangan usaha ekonomi desa dan pengembangan produk unggulan desa



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				Pembinaan masyarakat desa dan peningkatan peran aktif masyarakat
				Peningkatan kapasitas dan peran aparaturn pemerintahan desa
<b>Misi 3. Mewujudkan perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan</b>				
<b>Tujuan 3.1. Meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan (leading Sectors)</b>				
3.1.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	3.1.1.1.	Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi 'Prime Mover' pembangunan daerah melalui pendekatan Pro-growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro-environment	<p>Pengembangan jasa pariwisata utamanya wisata alam dan wisata budaya sebagai keunggulan lokal melalui pengembangan objek wisata Taman laut Olele, Kawasan Wisata Pantai Botutonuo, Wisata alam Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Objek Wisata Lombongo, Air Terjun Taludaa, Riverside Bone, Obyek Wisata Meranti, Wisata Budaya dan Sejarah serta Pengembangan Desa Wisata</p> <p>Peningkatan produksi dan produktifitas usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan kelautan berbasis kawasan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pembinaan dan penyuluhan, penguatan manajemen usaha dan pemasaran produksi, serta penguatan kelembagaan usaha</p> <p>Pengembangan komoditas potensial unggulan yaitu budidaya perikanan antara lain budidaya udang vaname dan budidaya perikanan lainnya; pengembangan peternakan antara lain sapi limousine dan komoditas peternakan lainnya serta pengembangan komoditas pertanian, antara lain pertanian organic dan komditas pertanian dan perkebunan lainnya.</p> <p>Penataan dan pengembangan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan khususnya PETI, serta pengembangan iklim kondusif bagi tumbuhnya partisipasi dunia usaha pada usaha pertambangan</p>
				Pengembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya lokal utamanya industri kopi



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				<p>pinogu, aren, pertanian organik, kerajinan kerawang dan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan, melalui pengembangan sentra dan cluster industri dengan memperkuat pembinaan usaha dan manajemen, pengembangan pemasaran dan kualitas produksi, bantuan permodalan dan sarana prasarana usaha, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dunia usaha</p> <p>Pengembangan sarana prasarana perdagangan yang mendukung pertumbuhan wilayah dengan mengembangkan pasar harian pada kawasan perdagangan</p> <p>Pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah melalui pembinaan usaha dan manajemen serta bantuan permodalan.</p> <p>Mengembangkan kemitraan serta menciptakan iklim kondusif yang dapat mendorong tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha atau melalui pendekatan Public Private Partnership dalam pengembangan usaha unggulan daerah</p>
3.1.2.	Terwujudnya perekonomian daerah yang merata dan berkeadilan	3.1.2.1.	Pengembangan kawasan strategis ekonomi daerah yang menjadi simpul pertumbuhan wilayah, kawasan cepat tumbuh, serta percepatan penanganan wilayah tertinggal, terisolir dan terbelakang	<p>Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan cepat tumbuh yang berbasis keunggulan sumber daya lokal dan daya saing pemasaran.</p> <p>Pengembangan sentra-sentra atau cluster usaha ekonomi yang menjadi unggulan daerah utamanya Kopi Pinogu, Pertanian Organik, Aren dan Usaha Pertanian Terpadu (Hulu Hilir Integrated)</p> <p>Pengembangan kawasan ekonomi pedesaan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan memperkuat produk unggulan masing-masing desa andalan</p> <p>Pengembangan kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah</p>
<b>Tujuan 3.2.</b>				
<b>Menguatkan ketahanan pangan Daerah</b>				
3.2.1.	Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian Terpadu	3.2.1.1.	Peningkatan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis kawasan, pertanian terpadu, serta berbasis agribisnis	<p>Peningkatan produksi pangan strategis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta divesifikasi pangan</p> <p>Pendayagunaan lahan tidak produktif serta lahan kritis</p> <p>Pengembangan desa mandiri pangan secara terarah dan berkelanjutan</p>



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
3.2.2.	Meningkatnya ketersediaan produksi, distribusi dan konsumsi pangan	3.2.2.1.	Meningkatkan Ketersediaan, keanekaragaman dan berkembangnya konsumsi pangan lokal secara aman, layak dan terjangkau oleh masyarakat luas	Peningkatan cadangan pangan daerah dan jaminan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
<b>Tujuan 3.3. Meningkatkan peluang investasi</b>				
3.3.1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	3.3.1.1.	Meningkatkan iklim Investasi yang kondusif yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	<p>Pengembangan kemudahan dan iklim investasi yang kondusif melalui penyediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur perizinan, serta pengembangan sistem insentif dan disinsentif</p> <p>Pengembangan kawasan khusus yang diarahkan sebagai wilayah prioritas investasi</p> <p>Pengembangan promosi potensi unggulan daerah melalui berbagai forum promosi investasi serta media informasi publik</p> <p>Pengembangan kerjasama pembangunan baik kerjasama antar daerah, antar level pemerintahan, kerjasama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan penelitian serta stakeholder lainnya</p>
<b>Misi 4. Mewujudkan tata pemerintahan moderen yang berbudaya</b>				
<b>Tujuan 4.1. Terwujudnya Kualitas Layanan dan Partisipasi Publik</b>				
4.1.1.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	4.1.1.1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku menuju opini WTP
		4.1.1.2.	Meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan memperkuat upaya peningkatan PAD	Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi potensi pendapatan daerah
		4.1.1.3.	Optimalkan upaya pemberantasan KKN dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya pemenuhan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas dan ketepatan penyampaian LKIP guna meraih predikat B (Baik, perlu sedikit perbaikan)
		4.1.1.4.	Meningkatkan kualitas	Meningkatkan kualitas materi dan



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penyelenggaraan pemerintahan melalui percepatan proses pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ketepatan penyampaian LPPD
		4.1.1.5. Meningkatkan sistem pengendalian internal dan membangun kerjasama antar lembaga guna terciptanya sinergisitas dalam pemberantasan KKN	Implementasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Penegakan sistem reward dan punishment sesuai aturan yang berlaku
		4.1.1.6. Meningkatkan koordinasi dengan DPRD Bone Bolango dalam penyusunan Prolegda secara terencana, terpadu, dan sistematis.	Mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala untuk jangka panjang, menengah atau pendek
		4.1.1.7. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan yang dapat mempermudah urusan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Melaksanakan adminstrasi kependudukan yang berkualitas
		4.1.1.8. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah secara bertahap	Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran berdasarkan kriteria prioritas
		4.1.1.9. Implementasi penyediaan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan publik dan penegakan regulasi	Menyediakan sistem informasi publik yang aksesibel oleh publik melalui peningkatan kapasitas bandwidth terpasang yang didukung perluasan jaringannya
		4.1.1.10. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan responsif dan inovatif	Penetapan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan
		4.1.1.11. Menciptakan keamanan dan ketertiban selama proses pelaksanaan Pilkada dan Pileg	Meningkatnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada dan Pileg
4.1.2.	Meningkatnya Partisipasi dan Tranparansi dalam Pelayanan Publik	4.1.2.1. Meningkatkan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat	Meningkatkan percepatan proses melalui pelayanan berbasis IT
		4.1.2.2. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah berkualitas dan akuntabel	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, akomodatif, berkelanjutan dan berkualitas
		4.1.2.3. Penetapan Standar Operating Prosedur pelayanan dan sistem manajemen mutu	Penyusunan regulasi untuk penerapan manajemen kendali mutu SOP dan SPM di bidang pelayanan
		4.1.2.4. Kepastian penerapan asas profesionalitas dan	Penerapan sistem merit (kinerja profesional) termasuk sistem



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
			transparansi dalam pelaksanaan job bidding	reward dan punishment dalam pengisian jabatan serta Penetapan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan ASN
4.1.3.	Terkoordinasinya tata kerja kelembagaan antar instansi pemerintahan dan atau pemangku Kepentingan	4.1.3.1.	Mewujudkan konsistensi perencanaan di dalam dokumen perencanaan, baik RKPD terhadap RPJMD maupun dokumen KUA/PPAS terhadap RKPD	Membangun sistem penetapan kinerja pelayanan SKPD sebagai perwujudan komitmen peningkatan pelayanan publik
		4.1.3.2.	Melakukan kemitraan pembangunan dengan dunia usaha, perguruan tinggi maupun antar daerah	Peningkatan intensitas dan efektifitas kerjasama lintas wilayah, dunia usaha dan perguruan tinggi
<b>Tujuan 4.2.</b>				
<b><i>Terciptanya pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan</i></b>				
4.2.1.	Terselenggaranya manajemen perubahan dalam pemerintahan	4.2.1.1.	Mengadakan berbagai riset yang mendalam terhadap berbagai permasalahan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan	Pelaksanaan riset secara komprehensif dan sistematis yang mengacu pada akar permasalahan daerah, sehingga diperlukan sebuah koordinasi yang nyata dan sistematis dari berbagai pihak untuk menjalankannya
4.2.2.	Terlaksananya pelayanan e government (Stepping Stone menuju Digital Government)	4.2.2.1.	Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam penguasaan teknologi dan informasi	Membuat regulasi untuk meningkatkan upaya mengenalkan teknologi informasi dalam aktivitas pelaksanaan tugas keseharian ASN terutama surat menyurat sebagai upaya pengurangan penggunaan kertas
		4.2.2.2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi inovasi pelayanan publik bagi SKPD pelaksana pelayanan	Menerapkan kebijakan "One Agency, One Innovation", yaitu setiap Pemerintah Daerah wajib untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun yang sejalan dengan kewajiban memunculkan "Quick Wins" sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah

### C. Prioritas Daerah Tahun 2016 - 2021

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran





RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada tabel 6.1. dibawah ini Berdasarkan hasil analisa terhadap isu – isu strategis dan janji Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah maka ditetapkan 6 (Enam) prioritas pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2016-2021, yakni :

### **1. Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Pengentasan Desa Tertinggal**

Prioritas pengurangan rakyat miskin difokuskan pada 5 (lima) bentuk intervensi. Intervensi *Pertama* diarahkan pada pemberian bantuan dan perlindungan social dengan sasaran pemenuhan hak dasar utama seperti pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih. Intervensi *kedua*, diarahkan pada pemberdayaan masyarakat berbasis perdesaan, perkotaan, serta wilayah tertinggal. Disamping itu pemberdayaan masyarakat berdasarkan sector, dengan cara mengembangkan skema program sektor pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil masyarakat. Intervensi *ketiga*, diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil seperti pembiayaan dalam bentuk bantuan permodalan, akses modal serta akses pasar produk; dan pendampingan serta peningkatan keterampilan manajemen usaha. Intervensi *keempat* yakni penyediaan sarana prasarana dasar rumah tangga berupa peningkatan akses pada rumah layak, penyediaan akses sanitasi dan air bersih, akses listrik dan prasarana dasar lainnya. Intervensi *kelima* yakni melalui kebijakan affirmative dengan mengembangkan program khusus pada wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan dan ketertinggalan. Sedangkan pengentasan desa tertinggal diarahkan melalui 4 (empat) fokus kebijakan; *pertama* yakni penguatan kelembagaan dan kapasitas pembangunan desa, *kedua* yakni percepatan pembangunan infrastruktur desa, *ketiga*; pengembangan ekonomi desa dengan



memperkuat unggulan desa, *keempat* yakni pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan dunia usaha.

## **2. Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan**

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga mampu bersaing dalam tingkat global. Penyediaan pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta terintegrasinya seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di masa depan. Peningkatan pelayanan pendidikan dilakukan melalui pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan yang holistik dan integratif dan penguatan tata kelola pendidikan daerah yang mampu menjawab tantangan pembangunan kedepan dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

## **3. Prioritas Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bone Bolango secara adil dan merata melalui penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (*Universal Health Coverage*), serta peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh masyarakat, peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, peningkatan kualitas layanan KB, pemberantasan penyakit menular dan penanganan penyakit tertentu dengan prevalensi tinggi, penyehatan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan profesionalisme, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan dilakukan juga melalui pemenuhan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar layanan kesehatan, peningkatan





ketersediaan dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan yang didukung dengan peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasinya.

#### **4. Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah**

Terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan pada tingkat aman serta tersedianya jaminan pangan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango dengan memperhatikan stabilitas, keterjangkauan serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango yang diarahkan melalui (1) peningkatan produksi dalam daerah khususnya beras secara berkelanjutan, peningkatan keanekaragaman dan ketersediaan produksi pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta olahannya, (2) pengembangan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan yang lebih beragam (3) pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif yang menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat (4) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan melalui peningkatan daya beli khususnya bagi masyarakat tertentu yang rawan pangan (5) Peningkatan infrastruktur dan kelembagaan ekonomi perdesaan (6) mendorong, dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan keanekaragaman pangan (7) Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan pengawasan keamanan pangan; meningkatkan kesadaran produsen terhadap keamanan pangan; meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan.

#### **5. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan**

Tersedianya sarana prasarana wilayah yang terintegrasi dan didukung oleh penataan ruang daerah yang terarah dan konsisten. Pengembangan sarana prasarana wilayah khususnya infrastruktur transportasi, energi listrik, telekomunikasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, sumber daya air, perumahan pemukiman, serta sarana-prasarana ekonomi diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan percepatan pembangunan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan mobilitas manusia, barang maupun jasa secara lokal maupun regional,



peningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pemanfaatan potensi sumber daya secara berkelanjutan. Pembangunan transportasi diprioritaskan pada pengembangan infrastruktur jalan serta fasilitas pendukungnya, dan pengembangan sarana prasarana perhubungan baik pembangunan terminal, moda transportasi maupun rekayasa jalan dan pengaturan perilaku lalu lintas melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta terbentuknya struktur dan pola ruang yang terarah, efektif, efisien dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan infrastruktur jalan yang eksisting, pengembangan aksesibilitas pada wilayah terpencil dan terisolasi khususnya wilayah Pinogu dan Bulango Ulu dan beberapa titik diwilayah Bone Pesisir. Pembangunan infrastruktur jalan diprioritaskan pula pada pembukaan akses lintas selatan Suwawa – Kabila Bone serta pembukaan akses Suwawa Selatan – Tulabolo BaratSuwawa Timur. Disamping itu, dukungan infrastruktur jalan pada kawasan pariwisata dan kawasan perdagangan serta kawasan strategis lainnya akan terus diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan.

## **6. Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN**

Pembangunan aparatur pemerintahan daerah dilakukan secara terarah dan komprehensif sejak tahapan perencanaan dan rekrutmen aparatur, pengembangan karir, peningkatan kompetensi, profesionalisme, disiplin, serta integritas etika dan moral penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas layanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dilakukan melalui pembinaan aparatur yang terarah dan berkesinambungan serta pendidikan dan pelatihan aparatur baik diklat fungsional, diklat teknis, diklat kepemimpinan maupun pendidikan akademik pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Pengembangan aparatur diarahkan pula melalui upaya peningkatan kesejahteraan aparatur, pemberian penghargaan, penguatan kinerja KORPRI, serta perlindungan hukum dan hak azasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Peningkatan pelayanan publik yang prima diarahkan untuk



meningkatkan kepuasan layanan dan jaminan akses layanan masyarakat yang cepat, mudah dengan biaya yang terjangkau. Peningkatan layanan publik diarahkan pula untuk peningkatan daya tarik investasi khususnya bagi dunia usaha dan masyarakat, serta mendorong motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan pelayanan publik prima dikembangkan melalui penyediaan system layanan yang handal, termasuk kerangka regulasi terstandarisasi yang menjamin kemudahan dan kepastian layanan serta efektifitas dan efisiensi setiap jenis layanan, peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknis, peningkatan kemampuan manajerial dan kepemimpinan aparatur, serta penyediaan sarana prasarana pelayanan publik handal dan berkualitas. Keenam prioritas pembangunan tersebut diimplementasikan melalui tiga dimensi pembangunan utama yakni:

#### **A. Dimensi Pembangunan Manusia**

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat cerdas yang religious, bermoral, berbudaya, unggul, produktif, innovative dan berdaya saing menjadi bagian penting yang harus di capai oleh setiap upaya pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi prioritas, tidak hanya dilingkungan birokrasi pemerintahan tetapi juga dilingkungan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dikembangkan seiring dengan peningkatan kinerja dan sikap mental aparatur. Membangun aparatur yang bersih, berwibawa, disiplin, berdedikasi, loyal, professional, kreatif, proaktif, responsive, innovative dan memiliki pengetahuan dan semangat juang yang tinggi masih akan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 2016-2021. Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan masyarakat madani akan tetap menjadi penyemangat utama dalam pencapaian Bone Bolango Cemerlang 2021.

#### **B. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan**

Pengembangan sector unggulan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. Pembangunan daerah keseluruhan membutuhkan lokomotif utama yang dapat menjadi "**Prime Mover**" pembangunan dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Sumberdaya daerah yang tersedia dan berpotensi besar sebagai basis ekonomi harus memberikan daya dorong dan daya





ungkit bagi akselerasi pembangunan daerah. Pembangunan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam dikembangkan dengan focus utama pada pengembangan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam, keunggulan lokasi, keunggulan sumber daya manusia serta arahan kebijakan spasial pada tingkat regional. Beberapa focus utama yang menjadi unggulan daerah kedepan yakni sector pariwisata, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jaspemerintahan, jasa pergudangan, sector pertanian tanaman pangan khususnya pertanian organik, usaha perkebunan, pengembangan peternakan dan usaha perikanan, sector sumberdaya air, serta industry pengolahan berbasis sumberdaya local antara lain Kopi Organik Pinogu dan Industri Aren, industry pengolahan hasil peternakan dan hasil perikanan. Sektor pertambangan dan energy menjadi sector penting yang diharapkan dapat menjadi penggerak dan basis pembangunan jangka panjang yang pengelolannya akan dilakukan secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan terjaganya ekosistem lingkungan.

### **C. Dimensi Pemerataan dan Pengembangan Wilayah**

Pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tersebar merata keseluruh wilayah. Pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah menjadi focus prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 2016-2021 secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur dasar wilayah menjadi penopang utama percepatan pembangunan daerah. Untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat pembangunan hingga pada unit wilayah terkecil maka pembangunan desa menjadi agenda utama pembangunan dalam jangka menengah 2016-2021. Pembangunan wilayah-wilayah terisolir, terpencil, terkebelakang khususnya di wilayah Pinogu, sebagian Suwawa Timur dan Suwawa Selatan, Bulango Ulu, Bulango Utara dan sebagian wilayah di Bone Pesisir, serta penanganan daerah rawan bencana akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembukaan akses lintas selatan yang menghubungkan pusat Ibu Kota Pemerintahan Suwawa dengan Wilayah Bone Pesisir akan menjadi program prioritas penguatan konektivitas wilayah disamping mendorong pembukaan akses lintas utara Tapa – Atinggola. Pengembangan kawasan-kawasan strategis serta simpul-simpul ekonomi akan didisain dan diimplementasikan secara bertahap untuk mendorong percepatan pertumbuhan wilayah dan mendayagunakan sumberdaya alam lokal.



## **D. Tema dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017**

### **a. Tema Pembangunan**

Memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 sebagaimana digambarkan diatas, serta mencermati kebijakan strategis nasional dan regional serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango, maka Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 ditetapkan sebagai berikut : **“Melanjutkan Pembangunan Desa dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mengurangi Kemiskinan”**. Tema pembangunan tahun 2017 merupakan kesinambungan rencana pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2016.

Seluruh stakeholders pembangunan dalam proses dan mekanisme perencanaan pembangunan tahun 2016 menyepakati bersama untuk perlu terus memantapkan upaya pengurangan rakyat miskin secara berkelanjutan. Pencapaian upaya tersebut dilaksanakan dengan menempatkan pembangunan desa sebagai basis pembangunan yang didukung oleh ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur secara terus menerus dan terarah mendukung percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam jangka menengah 2016-2021.

### **b. Sasaran Prioritas Utama Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017**

Rumusan sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2017, yang didasarkan pada kendala dan permasalahan daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diuraikan dibawah ini:

**Prioritas Penurunan  
Angka Kemiskinan**

Sasaran : Meningkatnya pendapatan masyarakat dan Pengurangan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.



	Indikator	: - Penurunan angka kemiskinan menjadi 16% dan angka pengangguran ditekan <5%, serta meningkatkan pendapatan masyarakat >7%. - Indeks gini (ketimpangan) ditekan <40 - Peningkatan nilai tukar petani >104
<b>Prioritas Pengentasan Desa Tertinggal</b>	Sasaran	: Menurunnya jumlah desa tertinggal
	Indikator	: - Pengurangan desa tertinggal menjadi 58 desa dan bertambahnya desa mandiri sejumlah 10 desa - Implementasi APBD Desa untuk semua desa - Peningkatan infrastruktur dasar desa - 85% Desa telah memiliki BUMDES. - 75% Prasarana Pemerintahan Desa berkualitas baik
<b>Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah</b>	Sasaran	: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan pangan daerah
	Indikator	: - Pertumbuhan ekonomi mencapai >7,5%. - Inflasi <6,7% - Peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier >62% - Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) dan investasi pemerintah tumbuh diatas 10% - Peningkatan produksi padi >30.000 ton - Peningkatan produktivitas per hektar padi 6,46 ton - Peningkatan produksi jagung >15.000 ton - Peningkatan produktivitas per hektar jagung 3,7 ton - Peningkatan produksi perikanan >13.500 ton - Peningkatan jumlah populasi ternak sapi bertambah >4000 ekor - Peningkatan jumlah usaha UMKM yang difasilitasi bertambah 400 unit usaha





- Peningkatan modal usaha UMKM
- Peningkatan jumlah koperasi sehat menjadi 22 koperasi dari 56 koperasi aktif
- Berkembangnya produk unggulan daerah (jasa pariwisata, pertanian organik, ternak sapi, kopi pinogu)
- Tumbuhnya 4 pasar harian
- Tumbuhnya desa mandiri pangan 30% dari target 20 desa
- Berkembangnya desa mandiri benih.
- Peningkatan akses jalan usaha pertanian >25.000 meter

**Prioritas Peningkatan  
Kualitas Pelayanan dan  
Akseibilitas Pendidikan**

Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan masyarakat melalui Peningkatkan kualitas layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

- Indikator :
- Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) ditargetkan sebesar 90.12 % untuk tingkat SD sedangkan untuk tingkat SMP sebesar 56,9 % dan 54,38 % untuk tingkat SMA
  - Peningkatan angka partisipasi kasar (APK); SD >100, SMP >89, SMA/SMK >79.
  - Peningkatan angka kelulusan ditargetkan sebesar >99% untuk tingkat SD, >99% untuk tingkat SMP dan >98% untuk tingkat SMA/SMK.
  - Penurunan Angka Putus Sekolah <0,16% (SD/MI), <0,12% (SMP/MTS), <0,13% (SMA/SMK/MA)
  - Peningkatan rata-rata lama sekolah 7,48
  - Peningkatan kualitas mutu lulusan
  - Peningkatan angka melek huruf >98,97
  - Peningkatan sarana prasarana pendidikan dengan kondisi baik 94,3% (SD) dan 58,3% (SMP)
  - Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 60,73
  - Peningkatan kompetensi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 82,11



- Peningkatan kesejahteraan guru pada wilayah terpencil.
- Peningkatan akses beasiswa bagi semua siswa dan 500 mahasiswa pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- Peningkatan ketersediaan dan pemerataan guru pada semua wilayah khususnya untuk bidang studi tertentu (Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris dan bidang studi keahlian lainnya).

**Prioritas Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan**

Sasaran : Peningkatan kualitas layanan kesehatan diarahkan pada pelayanan kesehatan yang semakin bermutu, cepat dan terjangkau pada semua unit dan tingkatan layanan baik layanan dasar kesehatan maupun layanan rujukan.

- Indikator: :
- Angka harapan hidup yang ditargetkan sebesar >71,01
  - Angka kematian Ibu Melahirkan yang ditargetkan sebesar <259 per 100.000 kelahiran hidup,
  - Penurunan angka kematian balita dengan target <12,6 per 1.000 kelahiran
  - Angka prevalensi gizi buruk sebesar 0,38%.
  - Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan; 100%
  - Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan 100% (Universal Health Coverage) khususnya bagi masyarakat miskin.
  - Peningkatan kepesertaan KB Aktif
  - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; 88,3%.
  - Peningkatan persentase ibu hamil yang beroleh layanan antenatal ke empat (K4); 88,23
  - Peningkatan persentase kunjungan neonatal pertama (KN1).



- Persentase anak usia 0-11 bulan yang beroleh imunisasi dasar lengkap
- Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 85,4%
- Cakupan kunjungan bayi 76%
- Cakupan penanganan penderita penyakit menular TBC BTA; 91,8%, dan penyakit DBD 100%
- Cakupan Puskesmas 100%
- Cakupan posyandu aktif purnama mandiri 38,8%
- Cakupan Poskesdes 71,3%
- Peningkatan jumlah puskesmas yang bersertifikasi terakreditasi.
- Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata hingga keseluruh daerah terpencil.
- Peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan dasar.
- Cakupan desa siaga aktif; 92,9%.
- Cakupan rumah tangga ber PHBS; 68,6%
- Peningkatan cakupan BOR, LOS, TOI, BTO, NDR dan GDR Rumah Sakit melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan tingkat rujukan dengan prioritas utama pada Rumah Sakit Toto Kabila.
- Peningkatan cakupan BOR, LOS, TOI, BTO, NDR dan GDR Rumah Sakit melalui peningkatan ketersediaan tenaga medis khususnya pelayanan spesialisik pada Rumah Sakit Toto dan Rumah Sakit Tombulilato.
- Jaminan ketersediaan obat-obatan, bahan habis pakai dan peralatan medis baik ditingkat layanan dasar maupun rujukan.



**Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan** Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas wilayah dan meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian, serta pengembangan infrastruktur pada kawasan strategis daerah.

- Indikator :
1. Persentase kualitas jalan baik >74% dan pertumbuhan jalan baru 2%.
  2. Peningkatan aksesibilitas ke Kecamatan Pinogu, Bulango Ulu, dan beberapa desa di Bone Pesisir.
  3. Persentase akses air minum layak >69%
  4. Persentase akses sanitasi layak >64%.
  5. Peningkatan jumlah rumah layak huni 2000 unit.
  6. Peningkatan ratio elektrifikasi >80%.
  7. Persentase luasan jaringan irigasi baik 92%
  8. Jumlah Ton Sampah yang dikumpulkan (berdasarkan cakupan wilayah); 1719 ton
  9. Revitalisasi 4 Kecamatan Induk
  10. Pengembangan infrastruktur pasar harian 1 unit pasar tradisional modern.
  11. Pengembangan kawasan wisata lombongo, danau perintis dan kawasan wisata botutonuo.
  12. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan.
  13. Pembangunan fasilitas Stadion Olahraga Bone Bolango.
  14. Pembangunan Terminal Tipe C

**Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN** Sasaran : Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) serta penataan aparatur daerah.

Indikator : 1. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan predikat WTP



2. Persentase penurunan jumlah kasus temuan yakni 40% dari tahun sebelumnya
3. Tingkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan (AKIP) mencapai predikat B.
4. Penataan pengembangan E-Government di lingkungan pemerintahan daerah
5. Persentase peningkatan ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan baik diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional mencapai 75 %.
6. Peningkatan disiplin, pembinaan karir dan mutasi aparatur sipil negara.
7. Persentase SKPD yang memenuhi kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan dan dokumen pengelolaan keuangan mencapai 100 %.
8. Peningkatan kapasitas perencanaan, koordinasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
9. Peningkatan ketertiban, keamanan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. 100% SKPD Kabupaten telah memiliki bangunan kantor.
11. 100% Pemerintahan Kecamatan telah memiliki Rumah Dinas Camat.
12. 75% infrastruktur pemerintahan desa (kantor desa) ditingkatkan ketersediaan dan kualitasnya, utamanya bagi kantor desa pemekaran serta rehabilitasi bagi kantor desa yang rusak berat.
13. Peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang operasional pemerintahan (kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi pemerintahan pada semua unit kerja



#### SKPD

14. Perbaikan manajemen dan infrastruktur penanggulangan bencana.
15. Peningkatan upaya perlindungan masyarakat, pengamanan aset pemerintahan dan penegakan peraturan daerah.
16. Peningkatan kesejahteraan aparatur bagi pemerintahan desa , serta perbaikan kesejahteraan tenaga honor/kontrak daerah.





## BAB III

### KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melatarbelakangi ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah adalah adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien, dan tentunya dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Tahun Anggaran 2017 penyusunan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

#### **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan.





## 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017 dan sesuai dengan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan, maka dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang antara lain sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah;
- b. Membuat database dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD;
- c. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian;
- d. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil;
- f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- h. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp.896.022.607.946,20 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.850.899.941.950,68



atau mencapai sebesar 94,01%, dengan perincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan		
		Anggaran	Realisasi	%
1	PAD	96.490.717.737,20	66.012.613.265,68	64,58%
2	Dana Perimbangan	663.786.927.709	655.420.751.542	98,74%
3	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	135.744.962.500	129.466.577.143	95,37%
<b>Jumlah</b>		896.022.607.946,20	850.899.941.950,68	94,96%

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD hanya memenuhi 64,58 % dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 96.490.717.737,20. Untuk Pendapatan Transfer mengalami hal yang sama yaitu tidak mencapai angka 100 % hanya berada pada angka 95,37%. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah juga hanya mendapatkan 94,96 % dari target yang ditetapkan

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-Lain PAD yang Sah.

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bone Bolango pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan Rp. 96.490.717.737,20 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 66.012.613.265,68 atau penerimaannya mencapai 64,58%. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Bone Bolango adalah berasal Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu sebesar 54.449.352.607,68 daru target Rp. 80.490.717.737,-.



Adapun perincian PAD Kabupaten Bone Bolango pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perincian Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pajak Daerah	9.600.000.000	9.494.746.023	98,90%
2	Retribusi Daerah	5.900.000.000	1.275.340.230	21,62%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	500.000.000	793.174.405	158,63%
4	Lain - Lain PAD yang Sah	80.490.717.737,20	54.449.352.607,68	67,65%
<b>Jumlah</b>		<b>96.490.717.737,20</b>	<b>66.012.613.265,68</b>	<b>68,41%</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\* )Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Pada tabel diatas terlihat bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 158,63%. Hal ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Untuk pajak daerah yang tidak mencapai 100% karena dari seluruh target pajak yang ditetapkan tidak ada yang mencapai 100%. Untuk retribusi daerah yang hanya mencapai 21,01 % terjadi penyerapan yang rendah di retribusi jasa usaha yang hanya mampu memenuhi 16,98% dari total yang ditetapkan

### 1). Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango meliputi: (1) Pajak Reklamne; (2) Pajak Penerangan Jalan; (3) Pajak Galian C; (4) Pajak Restoran; (5) Pajak Hiburan; (6) Hotel/Kosan; (7) PBB-P2; (8) Bea Per Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan Rp. 9.600.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.419.811.041 atau penerimaannya mencapai 98,12%. Dengan rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.3**  
**Perincian Pendapatan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pajak Hotel / Kosan	25.000.000	12.260.000	49,04%
2	Pajak Restoran	1.000.000.000	979.372.662	97,94%
3	Pajak Hiburan	50.000.000	9.831.000	19,66%
4	Pajak Reklame	75.000.000	56.537.675	75,38%
5	Pajak Penerangan Jalan	3.250.000.000	3.515.031.073	108,15%
6	Pajak Mineral Bukan Logam	2.250.000.000	2.114.519.944	93,98%
7	PBB-P2	2.200.000.000	2.178.425.722	99,02%
8	BPHTB	750.000.000	628.767.947	83,84%
<b>Jumlah</b>		<b>9.600.000.000</b>	<b>9.494.746.023</b>	<b>98,90%</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Pada tabel diatas yang melampaui target anggaran hanyalah pajak penerangan jalan. Untuk pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan hanya menyentuh angka 99,02 %. Yang paling rendah resapannya adalah pajak hiburan yaitu 19,66%.

## 2). Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kabupaten Bone Bolango meliputi:

- a) Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan - PUSKESMAS (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan – Rumah Sakit Umum Daerah, (3) Retribusi Pelayanan Persampahan, (4) Retribusi Pasar - Pelataran, (5) Retribusi PKB – Mobil Barang.



- b) Retribusi jasa usaha yang terdiri dari: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah penyewaan Tanah dan Bangunan (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah – kendaraan bermotor, (3) Retribusi TPI, (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir, (5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (6). Retribusi Tempat Rekreasi (7) Retribusi Tempat Olahraga, (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (9) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- c) Retribusi perijinan tertentu yang terdiri dari: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2) Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan (3) Izin Gangguan (HO).





**Tabel 3.4**  
**Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
I	<b>Retribusi Jasa Umum</b>			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - PUSKESMAS	100.000.000	61.078.000	61,08
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan – Rumah Sakit Umum Daerah	125.000.000	73.023.099	58,42
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	625.000.000	34.325.000	5,49
4	Retribusi Pasar - Pelataran	650.000.000	177.450.000	26,79
5	Retribusi PKB – Mobil Barang	75.000.000	17.795.500	23,73
II	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>			
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah penyewaan Tanah dan Bangunan	914.400.000	215.773.000	23,60
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah – kendaraan bermotor	0	70.000	-
3	Retribusi TPI	900.000.000	77.084.250	8,56
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	125.000.000	59.933.000	47,95
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	20.600.000	0	0
6	Retribusi Tempat Rekreasi	340.000.000	66.950.000	17,57
7	Retribusi Tempat Olahraga	15.000.000	0	0
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000	0	0
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	15.000.000	0	0
III	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>			
1	Retribusi IMB	900.000.000	280.462.534	31,06
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	20.000.000	0	0
3	Retribusi Izin Gangguan Pribadi	0	2.853.100	-
4	Retribusi Izin Gangguan Badan	975.000.000	208.542.747	18,88
<b>Total</b>		<b>5.900.000.000</b>	<b>1.275.340.230</b>	<b>21,62</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK



Pencapaian target Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2017 mencapai 21,62 % dari anggaran yang ditetapkan. Jika melihat tabel diatas maka nampak beberapa potensi Retribusi yang tidak dianggarkan akan tetapi memiliki penerimaan sehingga untuk kedepannya dapat digunakan sebagai sumber retribusi tetap.

### 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada: (1) Bagian Laba atas Penyertaan modal pada perusahaan milik daerah(2) Bagian Laba atas Penyertaan modal pada perusahaan milik swasta; sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah	500.000.000	0	
2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0	793.174.405	
<b>Total</b>		<b>500.000.000</b>	<b>793.174.405</b>	

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas maka secara total, terlihat bahwa ada kelebihan Rp. 293.174.405. dari target pendapatan yang dianggarkan. Hal ini karena bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta yang tidak ditargetkan sebagai sumber pendapatan justru menghasilkan Rp. 793.174.405,-

### 4). Lain-lain PAD yang Sah

Pos Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

- Hasil Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- Pendapatan Penerimaan Jasa Giro



- c) Pendapatan Bunga Deposito
- d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- e) Pendapatan dari Pengembalian
- f) Pendapatan BLUD RS. Toto Kabila
- g) Pendapatan Lain- Lain
- h) Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Perincian Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.80.490.717.737,20 terealisasi Rp. 50.863.549.494,48 atau mencapai sebesar 63,19%. Adapun perincian dari pos Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Hasil Penjualan Asset Daerah yang Tidak Dipisahkan	450.000.000	0	0
2	Pendapatan Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000	1.560.235.706	156,02%
3	Pendapatan Bunga Deposito	3.850.000.000	5.803.151.314,48	150,73%
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.700.000.000	1.143.348.886	42,35%
5	Pendapatan dari Pengembalian	75.000.000	317.288.039	423,05%
6	Penerimaan BLUD RS. Toto Kabila	40.000.000.000	32.210.668.258	80,53%
7	Lain-lain PAD yang sah Lainnya	760.233.925	3.985.238.074	524,21%
8	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.022.501.000	7.983.839.518	88,49%
9	Dana BOS	22.632.982.812,20	1.445.582.812,20	6,39%
<b>Total</b>		<b>80.490.717.737,20</b>	<b>54.449.352.608</b>	<b>67,65%</b>

\*) Sumber Data BKPAD Data  
\*\*)sebelum dilakukan pemeriksaan BPK





## b. Dana Perimbangan

Angaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari atas: (1) Dana Transfer Umum dan (3) Dana Transfer Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 638.403.943.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.628.335.535.038 atau mencapai target 98,42%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Perincian Realisasi Pendapatan Transfer**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Dana Transfer Umum	501.889.423.000	498.142.051.433	99,25
2	Dana Transfer Khusus	136.514.520.000	130.193.483.605	95,37
<b>Total</b>		<b>663.786.927.709</b>	<b>628.335.535.038</b>	<b>98,74</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

### 1. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum (atau sebelumnya di sebut dana alokasi umum) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp. 501.889.423.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 498.142.051.433 atau mencapai 99,25%;

## 2. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus untuk Kabupaten Bone Bolango dianggarkan sebesar 136.514.520.000 dengan realisasi sebesar 130.193.483.605 atau sebesar 95,37 %. Dana Transfer khusus ini sendiri terbagi atas dua yaitu dana alokasi khusus Fisik, dengan realisasi 62.072.986.366, dan dana alokasi khusus non fisik dengan realisasi sebesar 68.120.497.000.

### c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

#### 1. Pendapatan Hibah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah, Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Untuk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017 direncanakan mendapatkan Pendapatan Hibah Dari Pemerintah sebesar Rp7.500.000.000 dengan realisasi 100 %. Sedangkan dari lembaga swasta yaitu PT Bank Sulutgo sebesar Rp. 42.000.000 dengan realisasinya 0%.

#### 2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

16.860.984.709j merupakan target dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dimana dari angka tersebut yang terealisasi adalah sebesar 17.715.400.004 atau sebesar 105,07 %. Hal ini terjadi karena pada bagi hasil Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar



Kendaraan Bermotor capaian realisasinya adalah 133,77% dan capaian pada Bagi Hasil Dari Pajak Rokok mencapai 159,86% sehingga meskipun capaian realisasi Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan hanya 0,0052% secara total capaian bagi hasil Pajak tetap melampaui target pendapatan.

No	Uraians	Tahun Anggaran 2017		%
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.977.958.090	3.096.867.693	62,21%
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.121.047.337	3.274.407.053	79,46%
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.589.162.585	4.801.318.936	133,77%
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	80.000.000	4.125	0,0052%
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	4.092.816.697	6.542.802.197	159,86%
	Total	16.860.984.709	17.715.400.004	105,07%

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

### 3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian berupa Dana Intensif Daerah sebesar Rp. 7.500.000.000 terealisasi secara keseluruhan dan menjadi sumber pendapatan potensial untuk tahun-tahun kedepannya.

### 4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan Dari Provinsi Gorontalo yang semula dianggarkan sebesar Rp. 1.022.000.000 memiliki capaian realisasi sebesar Rp. 1.869.816.500 atau 182,96%.

### 5. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya memiliki anggaran 128.202.962.500 dengan realisasi yang terinci dalam Dana Desa sebesar 121.143.068.000 dan Dana Non Kapitasi dari BPJS sebesar 821.524.143.



### 3. Permasalahan dan Solusi

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1). Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
- 2). Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD;
- 3). Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD;
- 4). Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD;
- 5). Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan;
- 6). Terlalu tingginya target pendapatan yang ditetapkan tanpa memperhatikan jumlah konsumen atau ketersediaan sumber PAD

b. Dana Perimbangan

Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan masih sangat rendah bahkan limit 0% sehingga untuknya perlu perhatian khusus dengan cara penjemputan dan atau penagihan pajak pada sumber-sumber pemanfaatan air permukaan.



## **B. Pengelolaan Belanja Daerah**

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat.

### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

### **2. Target dan Realisasi Belanja**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.954.279.307.096,37 dan dapat direalisasikan



Rp.876.718.041.823,40 atau mencapai 91,87% yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Komposisi Realisasi Belanja**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah perubahan		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Tidak Langsung	512.753.281.126,99	490.162.053.168	95,59
2	Belanja Langsung	441.526.025.969,38	386.555.988.655,40	87,55
<b>Jumlah</b>		<b>954.279.307.096,37</b>	<b>876.718.041.823,40</b>	<b>91,87</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan sebesar 55,91% atau naik dari tahun sebelumnya yang berada pada rasio 55,60% realisasi belanja Kabupaten Bone Bolango di tahun 2017 dan sisanya sebesar 44,09 % atau turun dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 44,40% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2017, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.512.753.281.126,99 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.490.162.053.168 atau 95,59 %, dengan rincian pada tabel berikut:



**Tabel 3.15**  
**Perincian Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah perubahan	
		Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Tidak Langsung
1	Belanja Pegawai	325.670.672.924,99	304.154.538.802
2	Belanja Hibah	10.687.910.000	10.165.862.000
3	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	1.000.000.000
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	174.894.698.202	174.475.112.366
5	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	366.540.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 512.753.281.126</b>	<b>Rp 490.162.053.168</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Realisasi belanja Pegawai tahun 2017 mencapai 304.154.538.802 dari target anggaran yang ditetapkan (Perda Perubahan APBD). Realisasi Belanja Pegawai dalam tahun 2017 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik terdapat Rp. 122.334.503.000,- yang digunakan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Dana desa dan Rp. 51.929.179.600,- dalam bentuk alokasi dana desa yang merupakan belanja Publik di tingkatan Desa.

#### b. **Belanja Langsung**

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja Langsung pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.441.526.025.969,38 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.386.555.988.655,40. Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.16**  
**Perincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah perubahan		
		Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	%
1	Belanja Pegawai	60.541.583.727,18	52.829.809.717	87,26%
2	Belanja Barang dan Jasa	189.389.940.476,20	163.693.782.223,40	86,43%
3	Belanja Modal	191.594.501.766	170.032.396.715	88,75%
<b>Jumlah</b>		<b>441.526.025.969,38</b>	<b>386.555.988.655,40</b>	<b>87,55%</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

### c. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

**Tabel 3.17**  
**KOMPOSISI PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah perubahan		
		Anggaran Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	66.756.699.150,17	66.756.699.150,17	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.500.000.000	7.500.000.000,00	115,38
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>58.256.699.150,17</b>	<b>59.256.699.150,17</b>	

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 66.756.699.150,17 merupakan Penerimaan Pembiayaan dari Akumulasi SiLPA Tahun 2017. Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:





**Tabel 3.18**  
**Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017**

Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah perubahan	
	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan	0	37.602.860.560,85
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>37.602.860.560,85</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK





## BAB IV

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang merupakan arah kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2017 harus dievaluasi pelaksanaannya untuk menjamin kesinambungan program tahunan dalam periode jangka menengah RPJMD 2016-2021. Evaluasi kinerja kebijakan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017 serta untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

Secara umum kinerja makro pembangunan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan lebih baik dibandingkan kinerja makro tahun 2016, walaupun disisi lain masih terdapat beberapa hal fundamental yang memerlukan perbaikan dan pembenahan secara berkelanjutan. Beberapa indikator kinerja makro pembangunan daerah yang menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain penurunan angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi daerah, indeks kepuasan masyarakat, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik terkait pengelolaan keuangan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya.

#### 1. Angka Kemiskinan

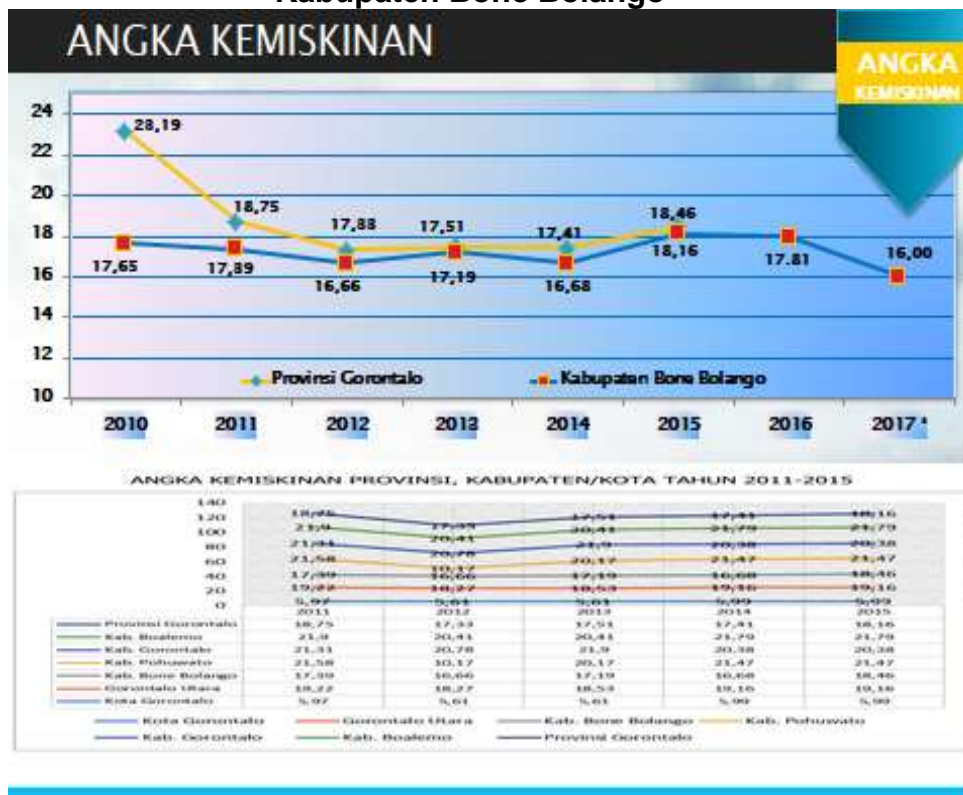
Walaupun trend angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 meningkat atau mencapai menjadi 18,49% dibanding tahun 2014 sebesar 16,68%, namun dalam dua tahun terakhir 2016-2017 angka kemiskinan tersebut menunjukan



pergerakan kearah positif atau menurun menjadi 17,81%. Secara nasional, kinerja positif tersebut belum signifikan peranannya karena angka kemiskinan tersebut masih jauh diatas angka rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10,12% serta masih diatas angka rata-rata kemiskinan Propinsi Gorontalo 17,14%. Oleh karenanya, pemerintah daerah terus melakukan upaya perbaikan melalui penajaman program kegiatan yang mengarah pada upaya mengurangi beban hidup rumah tangga miskin serta meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Gambaran kinerja pengurangan rakyat miskin di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 4.1**  
**Trend Angka Kemiskinan**  
**Kabupaten Bone Bolango**





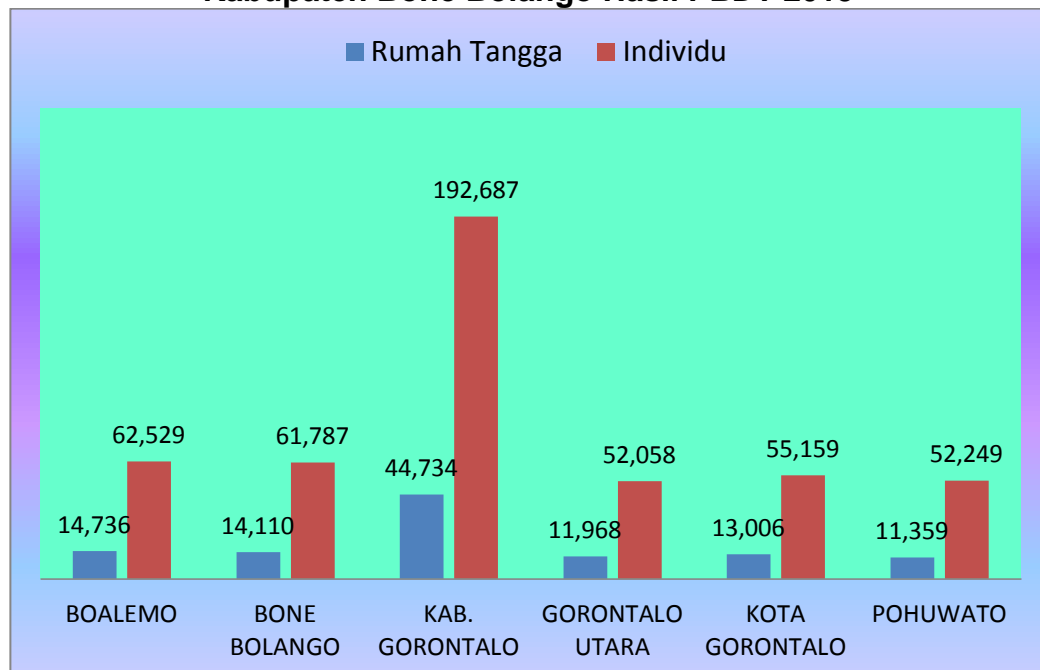
**Grafik 4.2**  
**Trend Garis Kemiskinan**  
**Kabupaten Bone Bolango**



Sumber Data: BPS Kab. Bone Bolango, 2017

Berdasarkan hasil pendataan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 jumlah rumah tangga maupun individu dengan status kesejahteraan 40 persen terendah di Kabupaten Bone Bolango dan perbandingannya dengan kabupaten kota lainnya yakni sebagai berikut:

**Grafik 4.3**  
**Jumlah Rumah Tangga dan Individu Miskin**  
**Kabupaten Bone Bolango Hasil PBDT 2015**



Sumber : BDT, 2015 dan data olahan

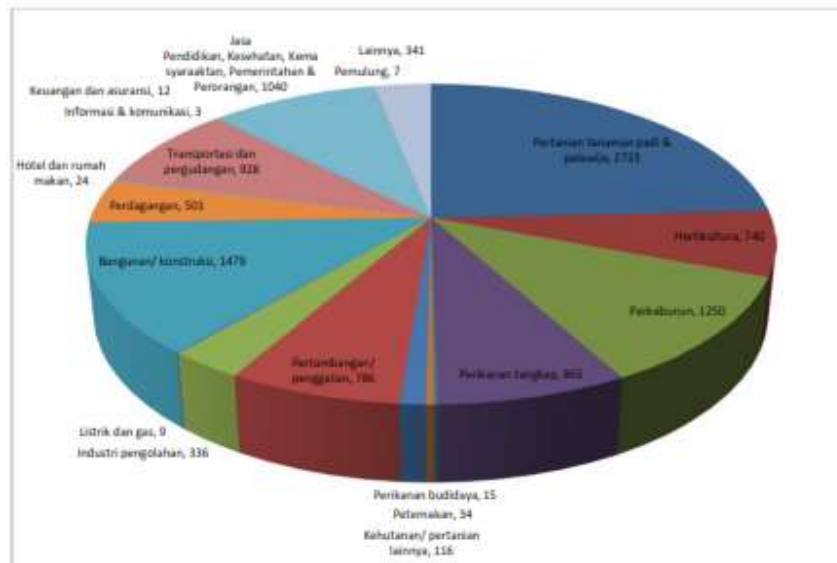


Sebaran rumah tangga miskin terbesar terdapat pada Kecamatan Tlongkabila, beberapa kecamatan wilayah pesisir, Suwawa Timur, dan Suwawa Selatan yang sebaran rumah tangga miskin per kecamatan tersebut sebagaimana terlihat pada diagram berikut:





**Grafik 4.4**  
**Karakteristik Lapangan Kerja Rumah Tangga Miskin**  
**Kabupaten Bone Bolango PBDT 2015**

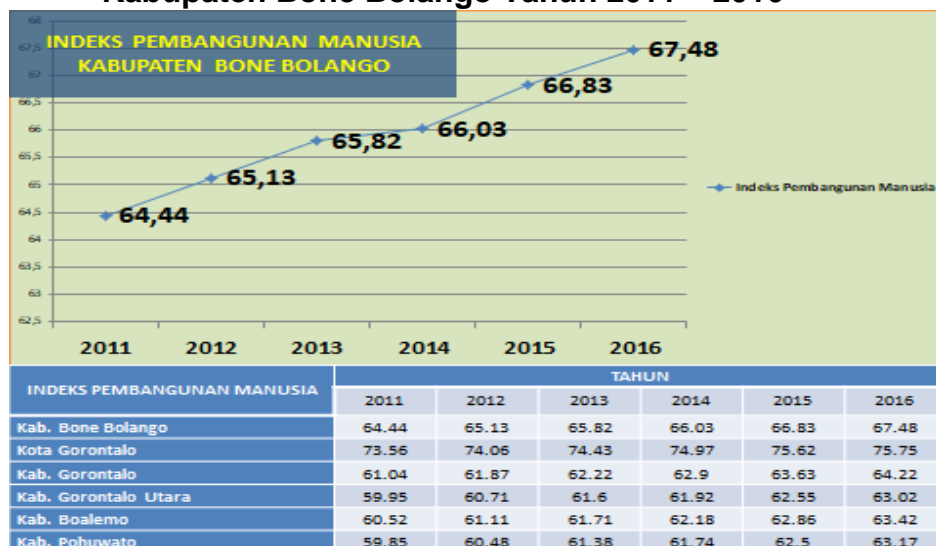


## 2. Indeks Pembangunan Manusia

Hingga tahun 2017, indeks pembangunan manusia Kabupaten Bone Bolango terus meningkat dari 66,86 pada tahun 2016 menjadi 67,48 pada tahun 2017 yang berada diatas rata-rata IPM Provinsi Gorontalo sebesar 66,29 serta peringkat kedua IPM di Provinsi Gorontalo setelah Kota Gorontalo. Peningkatan indeks pembangunan manusia tersebut sebagai implikasi dari perbaikan derajat kesehatan penduduk, kualitas pendidikan dan perbaikan ekonomi masyarakat masyarakat yang terus mengalami perbaikan.



**Grafik 4.5**  
**Trend Indeks Pembangunan Manusia**  
**Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2016**



Derajat kesehatan masyarakat terus membaik dengan indikator angka harapan hidup mencapai 67,7 tahun, angka kematian bayi menurun menjadi 11,89 dari 14,66 per 1000 kelahiran hidup. angka kematian ibu melahirkan dari 319 turun menjadi 245 per 100.000 kelahiran hidup. untuk cakupan jaminan kesehatan masyarakat, Kabupaten Bone Bolango tetap terus mempertahankan pencapaian “Universal Health coverage” yang pada tahun 2017, kembali beroleh penghargaan “JKN Award” dalam pengelolaan JKN terbaik diprovinsi Gorontalo. Perbaikan sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan terus ditingkatkan baik pelayanan dasar puskesmas maupun Rumah Sakit Toto dan Rumah Sakit Tombulilato.

Indeks Pembangunan Manusia juga dipengaruhi oleh factor Pendidikan. Perbaikan kinerja pembangunan pendidikan tersebut tercermin pada penduduk yang bisa membaca usia 15 tahun keatas sebanyak 85.034 dari 86.158 penduduk usia 15 tahun keatas, peningkatan partisipasi sekolah serta angka rata-rata lama sekolah yang terus meningkat pada tahun 2017 yakni dari 7,90 menjadi 8,71.

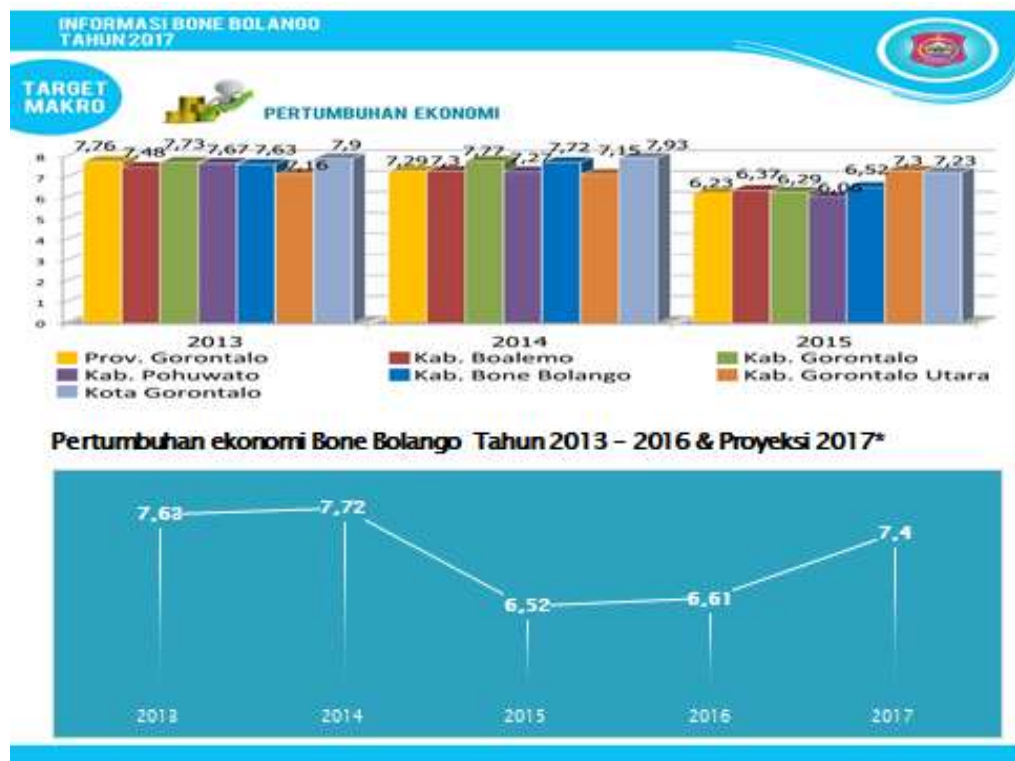
### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran

Disektor ekonomi, walaupun pergerakan ekonomi kita terkoreksi negatif pada tahun 2015 yang turun dari 7,72% menjadi 6,52%, namun pada tahun 2016 bergerak naik dengan capaian pertumbuhan ekonomi



sebesar 6,61%, dan diprediksi naik diatas 7% pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar ditopang oleh pertumbuhan pada sektor pertanian dan sektor jasa yang pada tahun 2016 tumbuh diatas pertumbuhan rata-rata daerah. Sementara itu, kinerja penurunan angka pengangguran terbuka pada periode 2016 menurun dari 6,76% menjadi 4,28%. Data riil untuk pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran tahun 2017 masih menunggu hasil pengolahan data yang akan dipublish BPS Kabupaten Bone Bolango pada bulan Juni 2017.

**Grafik 4.6**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2013 – 2017**







Dilihat dari kualitas pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir, terjadi kecenderungan perubahan positif struktur ekonomi daerah kearah yang positif dimana sektor-sektor non primer utamanya industri pengolahan dan jasa makin memberikan kontribusi yang positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan secara relatif, sektor primer yakni sektor pertanian cenderung menurun peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan pergeseran struktur ekonomi tersebut mulai memberi ruang positif pada pergerakan sektor industri dan jasa utamanya pertumbuhan UMKM termasuk industri kopi pinogu, jasa kepariwisataan, jasa kesehatan, pendidikan dan jasa keuangan lainnya.

Adapun pergeseran struktur ekonomi daerah dalam lima tahun tersebut sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:



Grafik 4.7



#### 4. Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Di bidang pengelolaan keuangan, hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2017 menunjukkan kinerja yang semakin baik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kinerja tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penghargaan WTP pada tahun 2017 merupakan opini yang telah diraih selama 4 tahun berturut-turut.

Dalam kinerja pengelolaan sistem akuntabilitas pemerintahan daerah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017 berhasil meraih nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Predikat BB, meningkat lebih baik dibanding tahun 2016 dengan nilai CC. Predikat ini memosisikan Kabupaten Bone Bolango dalam 20 pemerintahan kabupaten kota terbaik seluruh Indonesia dalam pengelolaan akuntabilitas pemerintahan daerah. Kinerja ini merefleksikan gambaran pengelolaan pemerintahan yang semakin



berorientasi outcome dan bukan output semata, semakin terukur, efisien, efektif dan pro publik.

Dalam aspek Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menjadi salah satu bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah, kinerja penilaian LPPD pemerintah Kabupaten Bone Bolango meningkat dari peringkat 155 berhasil naik pada peringkat 84.

**Tabel 4.1**  
**Kinerja Pengelolaan Pemerintahan**

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	100.0	WTP	WTP	100.0
Predikat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	predikat	100.0	B	BB	116,6
Peringkat LPPD	Nilai	124.0	Tinggi (Peringkat 125)	Tinggi (Peringkat 84)	148

**a. Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-



Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi



lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan data capaian kinerja di atas, dari target WTP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka realisasinya WTP

atau capaian kinerja mencapai **100%** dengan kategori **sangat tinggi**.



Sudah 4 tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem





pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Perbandingan capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2011-2016 dapat dilihat pada table berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**  
**Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011- 2017**

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

**b. Predikat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LHE AKIP).**



SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang

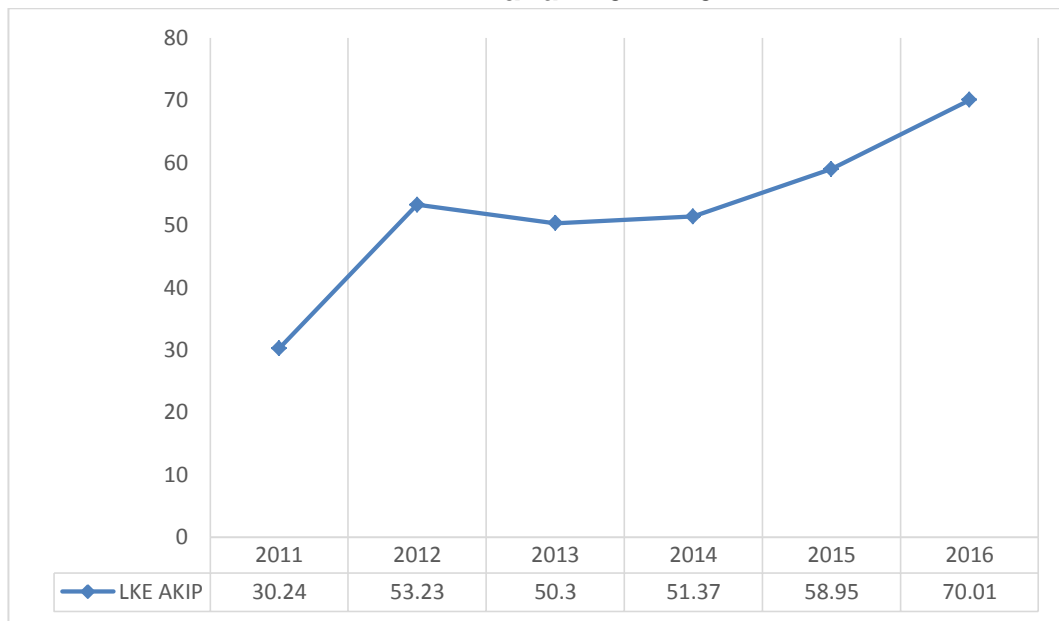
selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

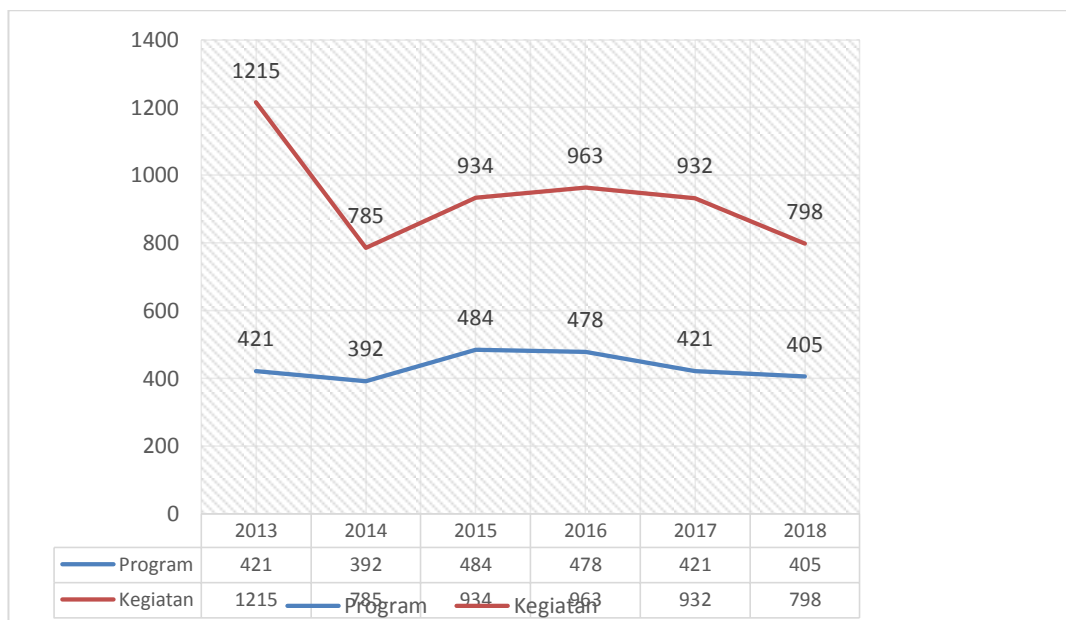


Berdasarkan pengukuran kinerja tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari target B yang sudah ditetapkan, maka realisasi pencapaian indikator sasaran predikat Laporal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah BB dengan kinerja pencapaian sebesar **116,6%** dengan kategori **sangat tinggi**.

**Grafik 4.8**  
**Trend Capaian Kinerja**  
**LHE AKIP Tahun 2011- 2017**



**Grafik 4.9**  
**Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2013 – 2018**





### c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah), dan Informasi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Bagi Pemerintah, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. LPPD dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri setiap tahun anggaran.

**Tabel 4.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**  
**LPPD Tahun 2011- 2015**

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Peringkat LPPD	320	215	203	155	84

### 5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dengan perbaikan kinerja pembangunan yang positif pada tahun 2017 memberikan implikasi positif juga pada peningkatan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan publik. Secara umum dengan menggunakan 15 parameter pengamatan, indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik meningkat dari angka 66,8 naik menjadi 73,4. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat tersebut utamanya dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap layanan kesehatan, layanan pendidikan serta layanan administrasi kependudukan.



**Tabel 4.4**  
**Parameter Bidang Survey Kepuasan Masyarakat**  
**Tahun 2015, 2016 dan 2017**

No	Bidang Tahun 2015	Bidang Tahun 2016 dan 2017
1.	Pendidikan	Pendidikan
2.	Kesehatan	Kesehatan
3.	Infrastruktur jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum
4.	Penanganan Bencana Alam	Penanggulangan Bencana Alam
5.	Bantuan Bagi Petani/Nelayan	Program Bantuan Lainnya
6.		Kependudukan
7.		Tata Ruang
8.		Sosial
9.		Kelautan dan Perikanan
10.		Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
11.		Pemberdayaan Ekonomi
12.		Pariwisata
13.		Keluarga Berencana
14.		Perpustakaan
15.		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

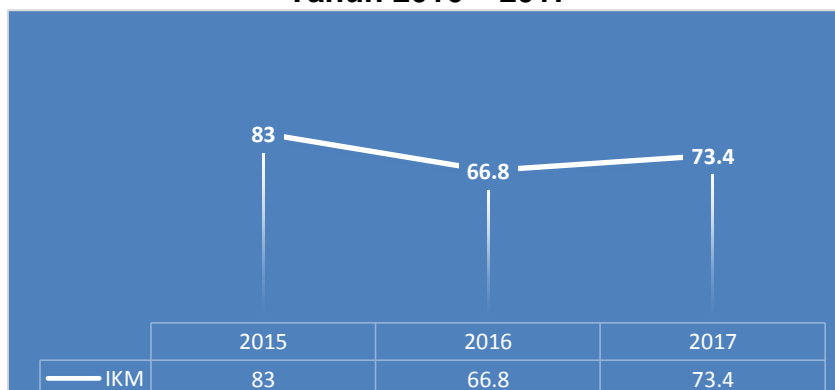
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bone Bolango terhadap layanan pemerintah dan program pembangunan Bone Bolango merupakan akumulasi keseluruhan jenis layanan dan program pembangunan yang dilaksanakan.

Trend indeks kepuasan masyarakat dalam tiga tahun terakhir sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:





**Grafik 4.10**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2016 – 2017**



Dibanding dengan IKM Layanan publik Bone Bolango Tahun 2016, IKM Bone Bolango 2017 mengalami kenaikan. IKM Bone Bolango Tahun 2016 adalah 68,8% dan IKM Bone Bolango tahun 2017 adalah 73,4% atau mengalami kenaikan sebesar 4,8%.

**Tabel 4.5**  
**Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan OPD**  
**Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017**

No	SKPD	IKM	Kategori	Kualitas
1	Dinas Kependudukan dan Capil	78,2	B	Memuaskan
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,7	B	Memuaskan
3	Dinas Kesehatan	78,2	B	Memuaskan
4	Rumah Sakit	77,9	B	Memuaskan
5	Dinas PUPR	69,2	B	Memuaskan
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	67,0	B	Memuaskan
7	Dinas Sosial	62,6	B	Memuaskan
8	Dinas Perikanan dan Kelautan	66,4	B	Memuaskan
9	Dinas Pertanian dan Peternakan	71,2	B	Memuaskan
10	Dinas Koperasi dan UMKM	65,0	B	Memuaskan
11	Dinas Pariwisata	67,3	B	Memuaskan
12	Dinas perpustakaan	73,1	B	Memuaskan
13	Dinas Satpol PP	60,8	C	Kurang Memuaskan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	71,5	B	Memuaskan
15	Dinas Perhubungan	62,7	B	Memuaskan
16	Dinas Pangan	68,4	B	Memuaskan
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	65,9	B	Memuaskan
18	Dinas Lingkungan Hidup	75,7	B	Memuaskan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	67,3	B	Memuaskan
20	Dinas penanaman Modal PTSP	85,3	A	Sangat Memuaskan



	dan Tenaga Kerja			
21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	72,8	B	Memuaskan
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69,1	B	Memuaskan
23	Bappeda Litbang	70,2	B	Memuaskan
24	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	72,1	B	Memuaskan
25	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	68,0	B	Memuaskan
26	Sekretariat Daerah	67,3	B	Memuaskan
27	Sekretariat DPRD	67,5	B	Memuaskan
28	Inspektorat	70,7	B	Memuaskan
29	Kecamatan Bulango Ulu	67,6	B	Memuaskan
30	Kecamatan Bulango Selatan	78,1	B	Memuaskan
31	Kecamatan Bulango Timur	74,2	B	Memuaskan
32	Kecamatan Bulango Utara	77,8	B	Memuaskan
33	Kecamatan Bone	81,0	B	Memuaskan
34	Kecamatan Bone Raya	73,9	B	Memuaskan
35	Kecamatan Bulawa	86,7	A	Sangat Memuaskan
36	Kecamatan Bone Pantai	75,0	B	Memuaskan
37	Kecamatan Kabila Bone	73,4	B	Memuaskan
38	Kecamatan Suwawa	74,4	B	Memuaskan
39	Kecamatan Suwawa Tengah	71,5	B	Memuaskan
40	Kecamatan Suwawa Timur	74,3	B	Memuaskan
41	Kecamatan Suwawa Selatan	98,6	A	Sangat Memuaskan
42	Kecamatan Botupingge	75,4	B	Memuaskan
43	Kecamatan Tilongkabila	62,0	C	Kurang Memuaskan
44	Kecamatan Kabila	71,9	B	Memuaskan
45	Kecamatan Tapa	66,6	B	Memuaskan
46	Kecamatan Pinogu	77,1	B	Memuaskan
	<b>BONE BOLANGO</b>	<b>73,5</b>	<b>B</b>	<b>Memuaskan</b>

Selanjutnya berikut gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah pada Tahun 2017.

## A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

### 1. Urusan Wajib Pendidikan

Misi Kabupaten Bone Bolango yang pertama yaitu Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan kualitas



pembangunan sumber daya manusia yang salah satu diantaranya melalui bidang pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango selain difokuskan pada peningkatan aksesibilitas juga dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan yang merupakan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.

**a) Kinerja Program dan kegiatan**

Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi anggaran APBD 2017 sebesar Rp.214.781.138.899,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.190.329.530.397,- atau 88,6%. Alokasi tersebut terbagi atas belanja tidak langsung berupa gaji guru dan ASN lainnya sebesar Rp.167.158.871.641 dengan realisasi akhir Rp.155.030.766.181 atau 92,7%, dan belanja langsung berupa belanja program kegiatan sebesar Rp.47.622.267.258, dengan realisasi sejumlah Rp.35.298.764.276 atau 74,1%.

Program pembangunan untuk urusan pendidikan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dialokasikan untuk:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini
  - Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten
  - Pemberian Bantuan Operasional/lembaga TK (249 Lembaga)
- 2) Pendidikan wajib belajar sembilan tahun
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Tapa
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 11 Kabila
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 6 Bone Pantai
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 5 Bone Pantai
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Bone
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 13 Kabila
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 7 Bone Pantai
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 7 Bulango Utara



- Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Kabila Bone
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 8 Bone Pantai
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Suwawa
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Tapa
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 3 Bulawa
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Bonepantai
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Bulango Timur
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 7 Bone
  - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
  - Penyelenggaraan Paket A setara SD
  - Penyelenggaraan Paket B setara SMP
  - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
  - Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - Ujian Akhir (UAS) SD/MI dan SMP/MTs
  - Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (24 sekolah)
  - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Alat peraga kesenian 11 sekolah, IPS 21 sekolah dan PJOK 5 sekolah)
- c) Program Pendidikan Non Fomal
- Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
  - Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
- d) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik ( 45 orang)
  - Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi berupa diklat guru pembelajar (600 orang)
  - Pengembangan Sistem Penghargaan dan perlindungan terhadap profesi Pendidik
  - Kegiatan guru berprestasi (90 orang)



- e) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
  - Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
  - Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan keuangan sekolah dan cabang dinas (400 orang)
  - Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan dalam rangka Beasiswa Bone Bolango Cerdas dalam bentuk hibah,
    - Kerjasama dengan UNG
    - Kerjasama dengan UG
    - Kerjasama dengan UNISAN
    - Kerjasama dengan STIMIK Ichsan
    - Kerjasama dengan Politeknik Gorontalo
    - Kerjasama dengan STIA Bina Taruna
    - Kerjasama dengan IAIN
    - Kerjasama dengan UMG
    - Kerjasama dengan Bina Mandiri
  - Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan berupa bimtek Pemutakhiran data pendidikan Kab Bone Bolango (388 Orang)
  - Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
- f) Program Pendidikan Non Formal
  - Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
    - Monitoring dan Verifikasi BOP
  - Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
    - Peringatan hari akasara internasional
    - Jambore PTKPNFI
- g) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
  - Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
  - Pengembangan minat dan budaya baca



- Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
  - Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
  - Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
- h) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
  - Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
  - Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

#### **b) Capaian Kinerja**

Sebagai refleksi pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, berikut gambaran umum capaian kinerja bidang pendidikan untuk Tahun 2017, yakni sebagai berikut:

##### **A. Angka Putus Sekolah**



Pada tahun 2017, Kabupaten Bone Bolango berhasil menekan angka putus sekolah untuk tingkatan SMP/MTs dari angka 0,16% menjadi 0,06%, namun untuk tingkat SD/MI terjadi kenaikan dari 0,14% menjadi 0,33%. Untuk siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian nasional pada tahun 2017 meningkat dari 92,44 % menjadi 100%. Perkembangan angka penurunan APS dapat dilihat perkembangannya dalam realisasi capaian Angka Putus Sekolah dalam tiga tahun terakhir.



**Tabel 4.6**

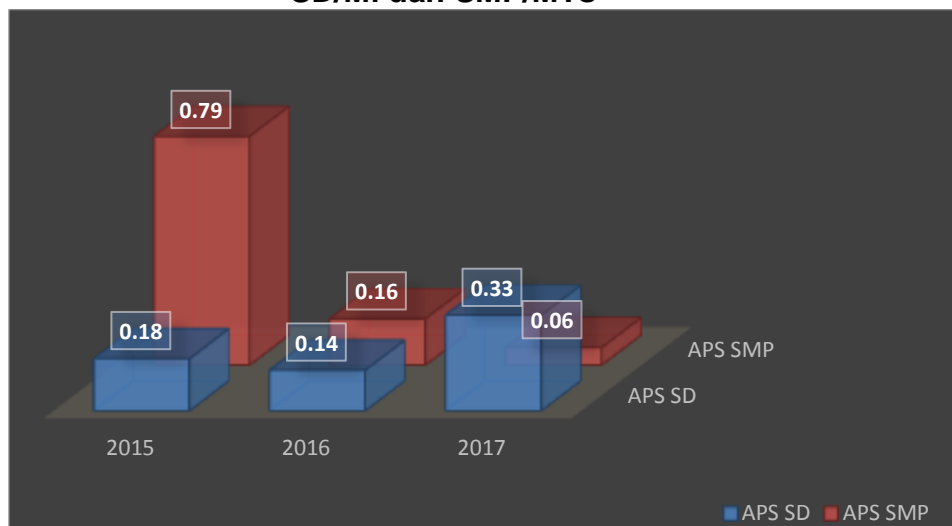
**Perkembangan Capaian Angka Putus Sekolah  
Tahun 2015 – 2017**

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017
SD/MI	0,18	0,14	0,33
SMP/MTS	0,79	0,16	0,06

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

**Grafik 4.11**

**Perbandingan Capaian APS Jenjang Pendidikan  
SD/Mi dan SMP/MTs**



Dari jumlah total siswa SD sebesar 18.470 siswa, yang putus sekolah sebanyak 61 siswa. Siswa putus sekolah umumnya masuk kategori miskin atau tidak mampu secara ekonomi.

**Tabel 4.7**  
**Siswa Putus Sekolah Tingkat SD**

NO	KEC	SISWA
1	Kabila	8
2	Bonepantai	6
3	Kabila Bone	20
4	Bone Raya	1
5	Bone	9
6	Bulango Utara	4
7	Suwawa Timur	2
8	Bulango Selatan	5
9	Bulango Timur	6



. Beberapa upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi angka putus sekolah yaitu:

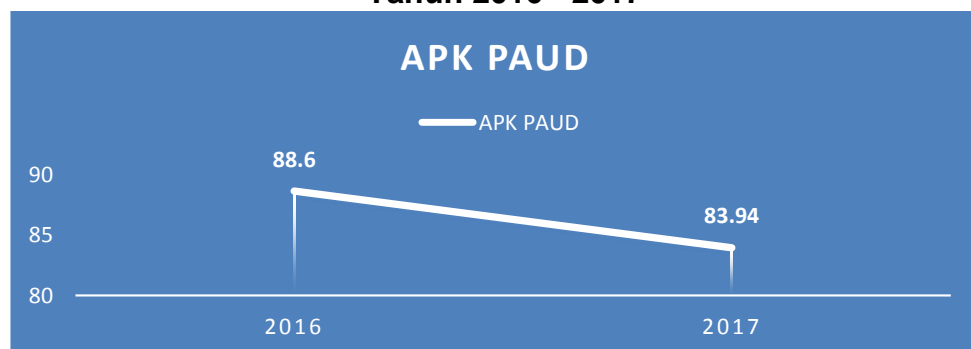
- Memberikan sosialisasi pada orang tua akan pentingnya pendidikan
- Pemberian beasiswa pada siswa miskin untuk tingkat SD sebanyak 5.432 siswa, tingkat SMP sebanyak 3.958 siswa dan untuk Perguruan Tinggi sebanyak 315 mahasiswa.
- Pemberian fasilitas bus gratis kepada anak-anak yang akses rumahnya jauh dari sekolah sebanyak 2 unit.

### **B. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini**

Pada tahun 2017 Angka Partisipasi Kasar PAUD mencapai 90,32% atau 8.093 siswa dari 8.960 penduduk usia 4-6 tahun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana siswa PAUD mencapai 8.503 siswa. Hal ini disebabkan oleh beberapa lembaga PAUD yang sudah tidak mendapatkan bantuan dana operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dialihkan ke Alokasi Dana Desa.

**Grafik 4.12**

#### **Persentase APK PAUD Tahun 2016 - 2017**



*Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

Dari grafik diatas terlihat penurunan APK PAUD, sehingga ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Untuk itu beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk masa datang adalah:

- Mengoptimalkan anggaran pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini setiap tahun untuk menunjang program Pendidikan





- Mengedukasi orang tua akan penting Pendidikan di usia dini
- Perlunya penambahan sarana bermain anak terutama untuk alat permainan edukatif (APE) dalam dan alat permainan edukatif (APE) luar.
- Meningkatkan peran pemerintah desa melalui intervensi APBDdes dalam pembangunan dan mendukung operasional penyelenggaraan PAUD.

### C. Angka Partisipasi Kasar

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017, usia 7-12 tahun sebanyak 20.343 orang, sedangkan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI sebanyak 18.470 siswa, yang terdistribusi pada SD sebanyak 17.242 siswa dan MI sebanyak 1.228 siswa. APK tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dibanding tahun 2016 dengan APK 18.584 siswa.

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017, usia 13-15 tahun sebanyak 10.095 orang, sedangkan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SMP/MTS (termasuk PNF) sebanyak 8.556 siswa atau 89,11%.

**Tabel 4.8**

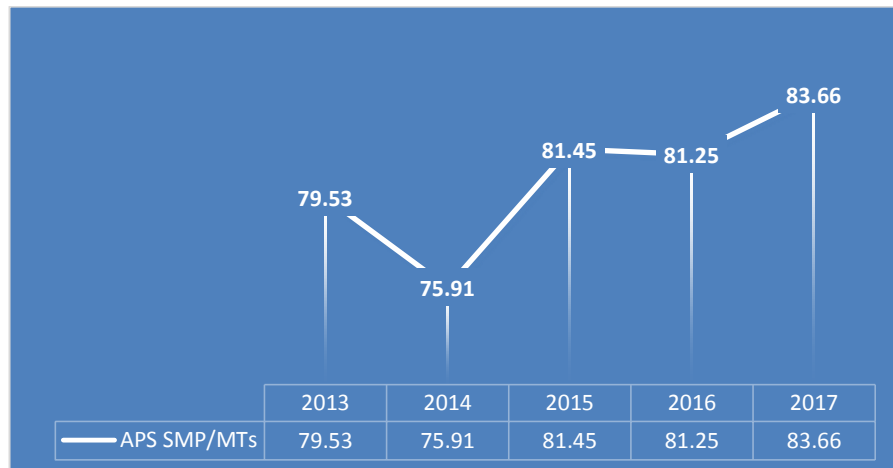
**Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD dan SMP 2016-2017**

Tahun	Penduduk Usia 7-12 Tahun	APK (siswa)	%
APK SD			
2016	20.358	18.584	91.29
2017	20.343	18.470	90.79
APK SMP			
2016	10.090	8.839	87,60
2017	10.095	8.556	89,11

Sumber : Profil Pendidikan

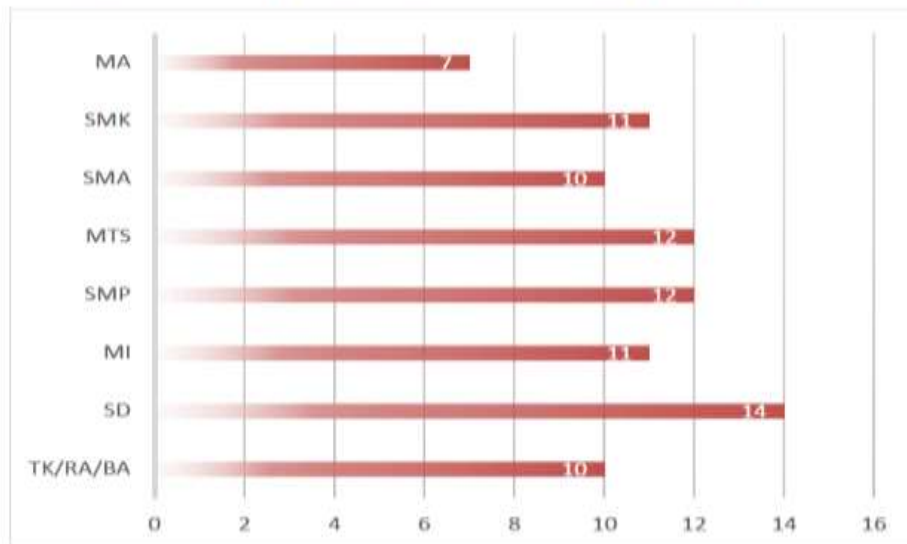


**Grafik 4.13**  
**Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP/MTs Tahun 2013-2017**



Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

**Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bone Bolango, 2016/2017**  
*Pupil-Teacher Ratio by Level Education in Bone Bolango Regency, 2016/2017*



Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango



**Tabel 4.9**  
**Sarana Dan Prasarana Pendidikan**  
**Kabupaten Bone Bolango**

TAHUN AJARAN	SARANA PENDIDIKAN			
	TK	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA
2013/2014	43	139	43	16
2014/2015	42	140	42	19
2015/2016	44	139	44	21
2016/2017	144	139	45	21

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

#### D. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat SD Pada tahun 2017 adalah 15.927 siswa. APM pada tahun ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 15.586 siswa. Angka Partisipasi Murni untuk tingkat SMP Pada tahun 2017 adalah 5.762 siswa. APM pada tahun ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 5.536 siswa.

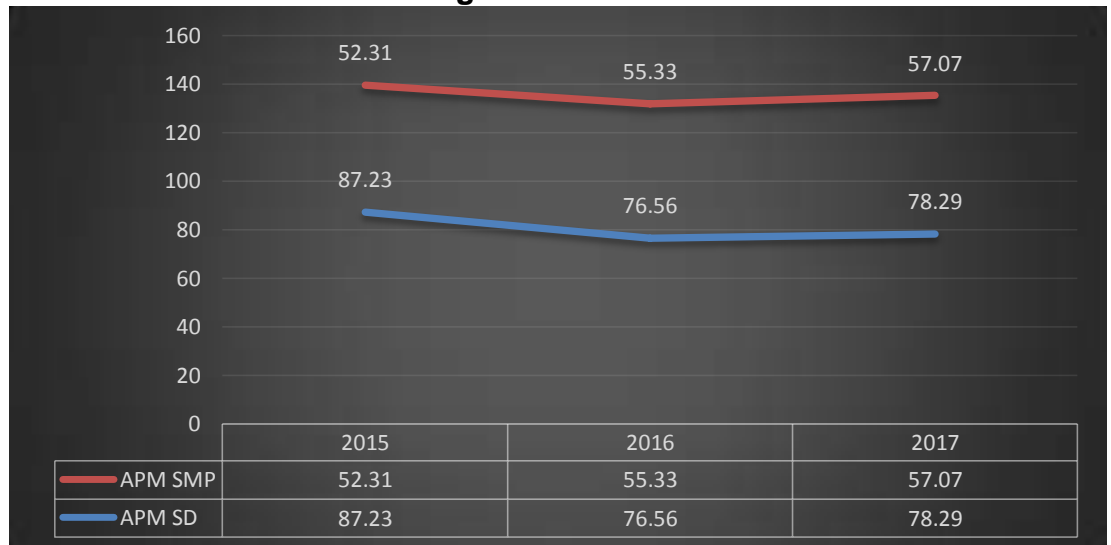
**Tabel 4.10**  
**Angka Partisipasi Murni Tingkat SD 2016-2017**

Tahun	Penduduk Usia 13-15 Tahun	APM (siswa)	%
<b>APM SD</b>			
2016	20.358	15.586	76,56
2017	20.343	15.927	78,29
<b>APM SMP</b>			
2016	10.090	5.536	54,86
2017	10.095	5.762	57,08

Sumber Data: Profil Pendidikan Kab. Bone Bolango



**Grafik 4.14**  
**Perkembangan Capaian APM SD/MI dan SMP/MTs**  
**Selang Tahun 2015-2017**



Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

Hubungan dari APS, APK dan APM tingkat SD dan SMP Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016, dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 4.11**

Jenjang Pendidikan	APS	APK	APM
SD			
SMP			

Dari table diatas terlihat bahwa untuk tingkat SD terjadi peningkatan APS, ini sesuai dengan tingginya angka putus sekolah sejumlah 61 siswa. Pada APM terlihat peningkatan jumlah siswa sedang pada APK terjadi peurunan jumlah siswa, ini menggambar bahwa siswa yang putus sekolah adalah siswa yang berada diluar usia sekolah. Untuk Tingkat SMP terjadi penurunan APS, hal ini sejalan dengan peningkatan APK dan APM. Peningkatan ini terjadi karena adanya adanya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)



SMP sebanyak 1 unit, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP sebanyak 2 ruang, Rehabilitasi Ruang Belajar SMP sebanyak 7 ruang dan akses untuk kesekolah lebih mudah dengan adanya pemberian bis operasional untuk daerah tertentu.

Beberapa intervensi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan APM 13–15 Tahun, antara lain melalui pemberian beasiswa miskin, bantuan operasional sekolah (BOS) kepada 36 sekolah SMP, rehabilitasi ruang kelas rusak sebanyak 3 sekolah, penambahan ruang kelas baru SMP sebanyak 2 ruang, pemberian marching band didua sekolah, pemberian alat peraga kesenian sebanyak 11 Sekolah, pemberian alat peraga IPS sebanyak 21 sekolah, pemberian alat peraga PJOK sebanyak 5 sekolah, dan pemberian media pembelajaran sebanyak 24 sekolah.

#### D. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk suatu wilayah. Capaian RLS tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 4.12**  
**Perkembangan Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Tahun 2015 – 2017**

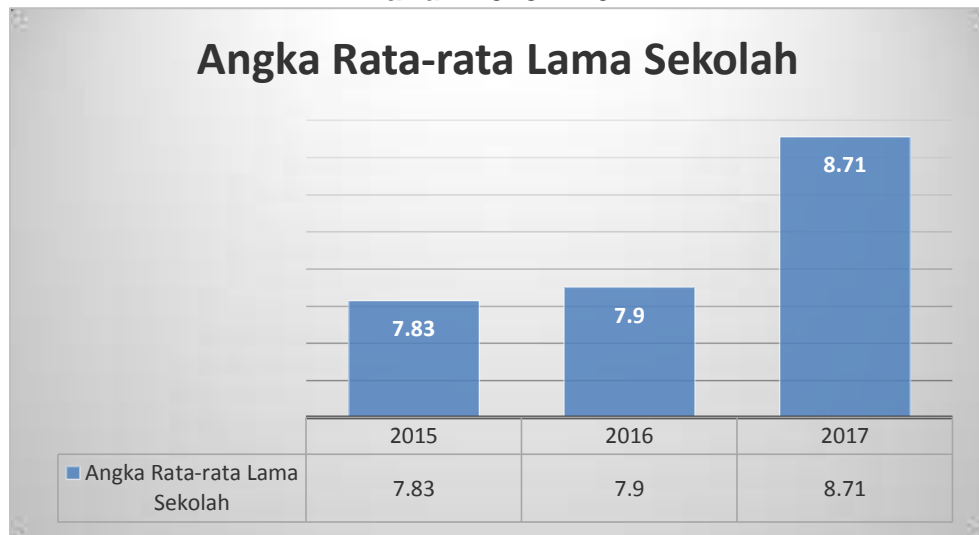
Uraian	2015	2016	2017
Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,83	7,90	8,71

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

Peningkatan angka rata-rata lama sekolah meningkat signifikan karena adanya peningkatan jumlah lulusan sarjana/ sederajat dari 4.623 menjadi 4.972 dan lulusan SMA/ seerajat dari 26.503 menjadi 26.831.



**Grafik 4.15**  
**Perkembangan Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Tahun 2015 – 2017**



Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

Faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran urusan pendidikan utamanya pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam peningkatan mutu pendidikan melalui program “Bone Bolango Cerdas”. Tujuan program ini untuk memastikan mereka anak-anak yang kurang beruntung, tapi memiliki kecerdasan yang bagus untuk bisa menyelesaikan pendidikannya sampai diperguruan tinggi. Pemerintah ingin mereka ini menjadi SDM yang bagus dan baik, paling tidak kedepan bisa berkontribusi untuk membangun daerahnya. Beberapa unggulan utama program Bone Bolango Cerdas, yaitu:

- Pemberian beasiswa kepada Masyarakat Miskin selain Beasiswa Program Indonesia Pintar yang disiapkan melalui Program Nasional dan Beasiswa APBD Kabupaten Bone Bolango.
- Pemberian insentif tambahan kepada guru-guru diwilayah terpencil yakni di Kecamatan Pinogu, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bone.



- Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah-daerah terpencil.



Diharapkan melalui

penyediaan sarana dan prasarana maka akses semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sarana dan prasarana meliputi pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah, pengadaan meja dan kursi siswa, pengadaan alat peraga, pengadaan bus sekolah dan kegiatan lainnya, termasuk bantuan CSR. PT. Gorontalo Mineral Bus Sekolah Siswa pada tahun 2017.

- Sebagai upaya peningkatan angka lulusan di Kabupaten Bone Bolango, maka Pemerintah memprogramkan kegiatan peningkatan Kompetensi guru, hal ini dipandang penting, karena (a) guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pembelajaran; dan (b) melalui guru, derivasi permasalahan pengembangan mutu pendidikan dapat dibenahi secara bertahap. Tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi yang belum dikuasai, dan mengatasi penyebab rendahnya kompetensi siswa.

### c) **Permasalahan dan solusi**

#### **Masalah**

- Ketidakmampuan ekonomi orangtua.

Berdasarkan data kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango, kurang lebih 14.340 rumah tangga berada dalam 40% tingkat kesejahteraannya terendah. Kondisi ini merupakan salah satu pemicu pada besarnya angka putus sekolah pada anak usia sekolah. Kondisi ini berakibat pada kesulitan anak dalam belajar serta motivasi anak untuk sekolah berkurang.

- Rendahnya aksesibilitas sekolah di daerah terpencil

Walaupun secara geografis, wilayah Bone Bolango sangat berdekatan dengan Kota Gorontalo sebagai Pusat



Pendidikan, namun terdapat beberapa wilayah yang kondisinya sangat tertinggal bahkan terisolasi. Beberapa wilayah tersebut yakni Kecamatan Pinogu, Kecamatan Bulango Ulu, dan beberapa desa di Kecamatan Suwawa Timur, Bulango Utara dan 4 (empat) Kecamatan di Bone Pesisir.

- Ketersediaan dan pemerataan guru khususnya pada wilayah terpencil yang kurang memadai sesuai standar pelayanan minimum.

### **Solusi**

- Disamping itu, pemberian beasiswa melalui melalui Program Indonesia Pintar serta program Bone Bolango Cerdas kepada siswa dari keluarga miskin diharapkan dapat mengurangi beban biaya pendidikan, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam hal mencegah terjadinya anak putus sekolah adalah memberi motivasi, melakukan pembinaan, serta melaksanakan pendidikan kesetaraan. Beberapa program beasiswa lainnya seperti Beasiswa Miskin atau melalui program PKH terus dioptimalkan pemanfaatannya untuk menjamin anak usia sekolah terpenuhi kebutuhannya untuk sekolah khususnya dalam mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun.
- Melaksanakan monitoring ketat dan periodik terhadap pelaksanaan program Program Keluarga Harapan, dimana sasaran dari program tersebut sangat jelas yakni dalam rangka untuk mengantisipasi agar anak tidak putus sekolah dan anggaran PKH jangan sampai disalahgunakan oleh orang tuanya maupun pihak lain.
- Peningkatan sarana prasarana sekolah terus dioptimalkan ketersediaannya. Pada tahun 2016 telah dibangun 4 (empat) unit SMP baru termasuk dua unit pada wilayah tertinggal yakni SMP Bulawa dan SMP Suwawa Timur dan pada tahun





2017 2 (dua) unit SMP baru yakni SMP 3 Suwawa Timur dan SMP 3 Kabila.

- Dalam mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil, beberapa solusi yang dilakukan:
  - Melakukan redistribusi untuk menjamin pemerataan guru atau menghindari terjadinya kelangkaan guru pada daerah terpencil.
  - Memberikan insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.
  - Mengangkat tenaga kontrak guru yang berasal atau berdomisili langsung di wilayah terpencil sepanjang memenuhi kompetensi minimal sebagai guru.

Hal lain sebagai upaya mewujudkan meningkatkan kinerja maka dilakukan beberapa kebijakan efisiensi dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan angka partisipasi dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas adalah :

- Pengangkatan Guru dan tenaga kependidikan didasarkan pada analisis kebutuhan jam mengajar
- Mengoptimalkan sistem perhitungan pembayaran tunjangan guru dan tenaga kependidikan untuk mencegah terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah mengajar
- Menerapkan tugas pengganti bagi unit-unit layanan pendidikan dengan memberdayakan guru dan tenaga pendidikan yang jumlah jam mengajar dibawah dari standar yang telah ditentukan
- Melakukan regrouping bagi sekolah sederajat yang berdekatan untuk mengefisiensi belanja dan tunjangan pelaksana

Beberapa program efektif yang menentukan keberhasilan pencapaian sasaran di sektor pendidikan adalah :

- Program Pemberian beasiswa bagi siswa yang orang tuanya berpenghasilan rendah



- Peningkatan kesejahteraan guru khususnya peningkatan tunjangan bagi guru di daerah-daerah terisolir dan terpencil
- Peningkatan akses transportasi bagi siswa yang jauh dari tempat tempat layanan pendidikan
- Peningkatan jalan akses dari pusat pemukiman ke pusat layanan pendidikan.
- Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan SD/SMP.

Untuk Dana BOS Tahun 2017 Kabupaten Bone Bolango mendapatkan alokasi untuk :

**Tabel 4.13**  
**Alokasi Dana BOS**

SD	SMP / SLB	ALOKASI JUMLAH SISWA		JUMLAH DANA		
		SD	SMP	SD	SMP	TOTAL
129	35	18.148	6.669	14.328.400.000	6.669.000.000	21.187.400.000

## 2. Urusan Kesehatan

Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh 3 (empat) OPD yaitu: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dan Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato, dengan rincian sebagai berikut

### a. Kinerja Program dan kegiatan

Urusan wajib Kesehatan dilakukan oleh tiga OPD yaitu Dinas Kesehatan, rumah Sakit Toto kabila dan Rumah Sakit Tombulilato yaitu mendapat alokasi anggaran dari APBD 2017 sebesar Rp. 148.677.324.927,18,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.130.976.379.168,- atau 88,09% yang dialokasikan untuk program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program perbekalan kesehatan, melalui kegiatan :



- Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
  - Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
  - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU)
  - Belanja Bahan Obat (370 item)
  - Belanja Reagen (26 Jenis)
- 2) Program upaya kesehatan masyarakat, melalui kegiatan :
- Revitalisasi sistem kesehatan
  - Peningkatan kesehatan masyarakat
  - Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
  - Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik & esensial
  - Belanja Bahan obat Pasien Jiwa dan NAPZA (5 item)
- 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, melalui kegiatan :
- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
  - Pembuatan Neon Box Rumah sakit Tombulilato
  - Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
  - Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
  - Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
- 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, melalui kegiatan :
- Pemberian tambahan makanan dan vitamin
  - Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
  - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi



- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, melalui kegiatan :
  - Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
  - Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
  - Peningkatan imunisasi
  - Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
  - Penanganan KLB Penyakit Menular yang Terdeteksi; Pemeriksaan sampel darah, (40 Sampel)
  - Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 7) Program standarisasi pelayanan kesehatan, melalui kegiatan :
  - Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
  - Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 8) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, melalui kegiatan :
  - Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)
- 9) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
  - Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
- 10) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
  - Pelatihan dan pendidikan perawat anak balita



- 11) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
  - Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
  - Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
- 12) Program Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)
  - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
  - Akreditasi Puskesmas
  - Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
- 13) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
  - Pembangunan rumah sakit
  - Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
  - Pembangunan Kamar Operasi
  - Pembangunan Selasar
  - Rehabilitasi UGD
  - Rehabilitasi Instalasi rawat jalan
  - Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
  - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
    - Pengadaan Meja Operasi
    - Pengadaan EKG 12 Chanel
    - Pengadaan Fetal Dopler
    - Pengadaan USG
  - Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit (DAK); Pembangunan IPAL
  - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
  - Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) (DAK Lanjutan)
  - Pembangunan kamar jenazah (Bantuan Provinsi)

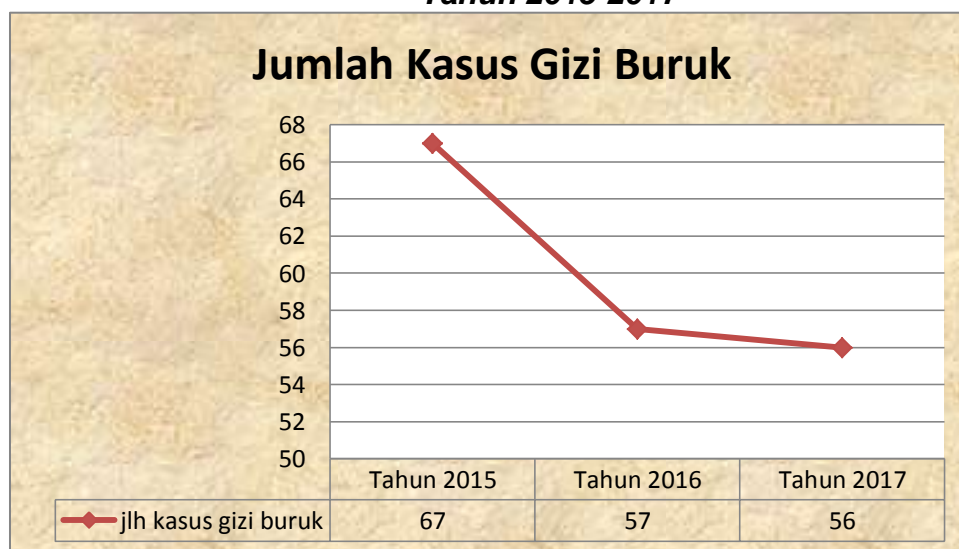


## b. Capaian Kinerja

### a. Prevalensi Gizi Buruk

Prevalensi Gizi Buruk di kabupaten Bone Bolango umumnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang sehat. Berikut trend kasus gizi buruk di Kab Bone Bolango Tahun 2015-2017.

**Grafik 4.16**  
**Kasus Gizi Buruk Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2015-2017**



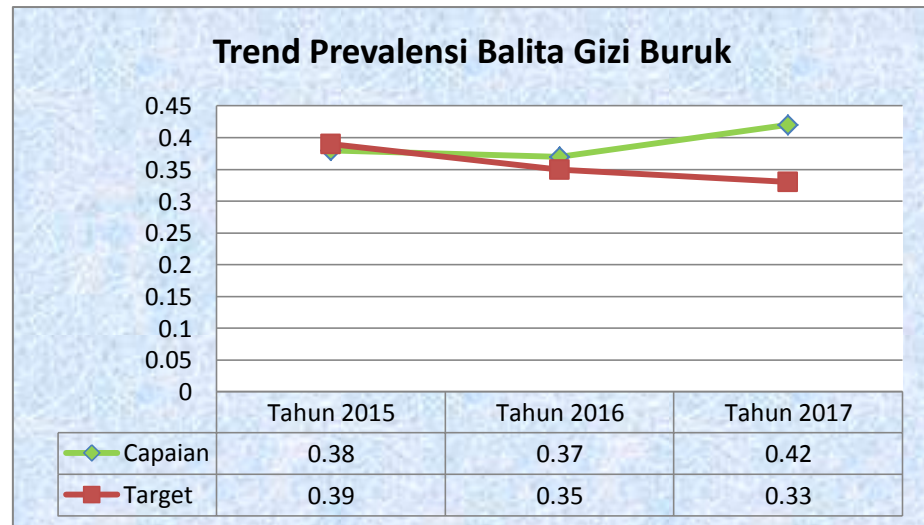
Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 kasus gizi buruk ditemukan sebanyak 56 kasus dari 13,274 balita, turun dari jumlah kasus di tahun 2016 yaitu 57 kasus dari 15,238 balita. Jumlah tersebut semua mendapat perawatan (100%) yang meliputi pemeriksaan secara komprehensif, program ini merupakan upaya perbaikan status gizi pada balita gizi buruk yang dipusatkan di Panti Pemulihan Gizi/TFC dan Puskesmas.

Trend prevalensi balita gizi buruk jika dilihat pada grafik pertama mengalami penurunan jumlah kasus, namun jika dilihat dari angka prevalensi dengan menghitung jumlah kasus dibagi dengan jumlah balita yang ada, maka terlihat bahwa terjadi peningkatan. Jika angka capaian ini dibandingkan dengan target RPJMD, maka dapat dikatakan belum mencapai target yang diinginkan. Seperti yang digambarkan pada grafik dibawah ini:



**Grafik 4.17**  
**Trend Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2015-2017**



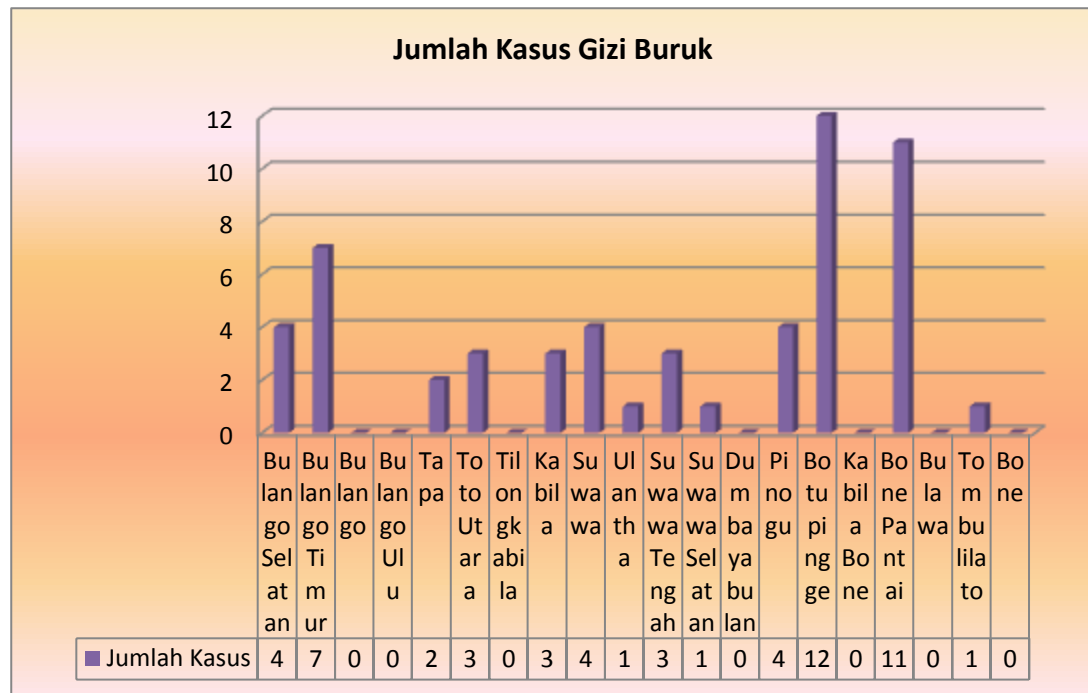
Sumber Data : Dinas Kesehatan

Upaya pencegahan serta penanggulangan balita gizi buruk memang sudah dilakukan oleh puskesmas dan dinas kesehatan melalui berbagai kegiatan seperti pemberian makanan tambahan (PMT) penyuluhan dan PMT Pemulihan baik berbahan dasar lokal maupun pabrikan (susu formula dan mineral mix), tetapi hal ini masih belum sepenuhnya mampu mengatasi terjadinya gizi buruk. Tenaga pelaksana Gizi (TPG) puskesmas harus lebih giat lagi dalam melakukan penyuluhan gizi melalui pendekatan keluarga, mengadvokasi lintas sektor, terutama ibu-ibu PKK, dalam menanggulangi ternyadinya kasus balita gizi buruk di Kabupaten Bone Bolango.

Grafik dibawah ini memperlihatkan pemetaan kasus balita gizi buruk di Kabupaten Bone Bolango. Jumlah kasus terbanyak adalah di wilayah kerja Botupingge dan Bonepantai. Sehingga perlu menjadi perhatian petugas kesehatan terutama untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan balita gizi buruk.



**Grafik 4.18**  
**Persebaran Balita Gizi Buruk Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2017**



Sumber Data : Dinas Kesehatan

Hasil laporan anak gizi buruk yang dirawat TFC adalah masalah dan kendala dalam perawatan anak gizi buruk yaitu sebagian dari pasien yang dirawat di TFC memiliki masa rawat yang cukup singkat atau pulang paksa karena alasan keluarga yang ditinggalakan di rumah tidak ada yang mengurus, dan pasien pulang paksa alasan pekerjaan. Penanggulangan masalah yang telah dilakukan adalah perlu adanya komitmen keluarga pasien yang mau dirawat di TFC dengan pihak puskesmas sehingga pasien yang dirawat tidak bermasalah dan memberikan pemahaman kepada keluarga pasien akan perlunya perawatan balita gizi buruk dan dampak yang ditimbulkan apabila tidak dirawat. Apabila ada pasien gizi buruk yang tidak mau dirawat di TFC, maka akan dilakukan perawatan dan pemantauan status gizi oleh petugas puskesmas baik melalui POSYANDU atau kunjungan ruma

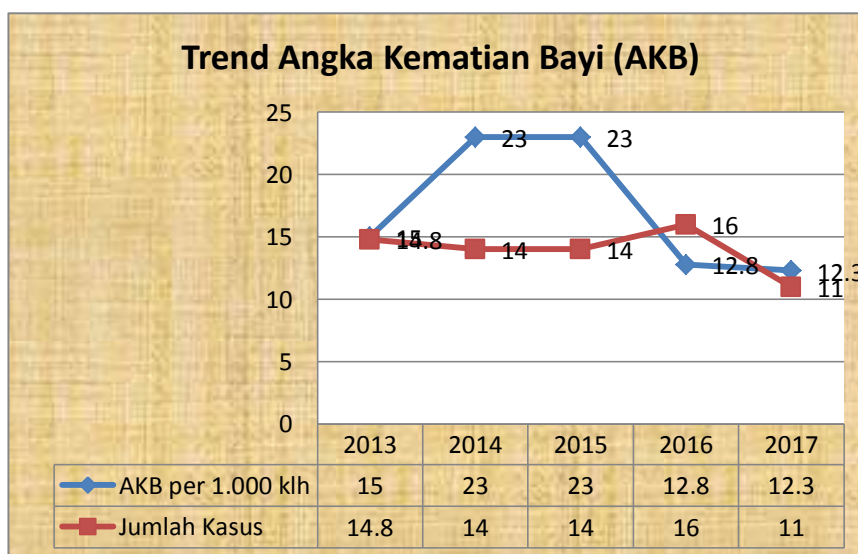




### c. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) untuk Kabupaten Bone Bolango adalah 11 per 1.000 KLH, dengan jumlah kasus 30 kematian dari 2.659 kelahiran hidup, angka ini lebih baik dari target yaitu 13.2 per 1000 kelahiran hidup (KLH) dan turun dari angka tahun 2016. Kematian bayi yang terdiri dari 22 kasus kematian neonatal (0-30 hr) dan 8 kasus untuk bayi umur 1 – 12 bulan. Kasus kematian bayi banyak disebabkan oleh *BBLR, asfiksia, dan kelainan kongenital, pneumonia, infeksi* serta penyakit lainnya seperti *aspirasi, hernia, suspek gagal jantung, hidrocephalus, hernia dan febris*. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah kematian bayi tahun 2017 sebanyak 30 kasus menurun dari tahun 2016 yakni 39 Kasus. Target yang ingin dicapai untuk AKB untuk tahun 2017 yaitu sebesar 13.2 per 1.000 KLH, target ini adalah target yang masuk dalam Perjanjian Kinerja. Adapun trend Angka Kematian Bayi (AKB) selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 4.19**  
**Trend Angka Kematian Bayi**  
**Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 – 2017**



Sumber data: Dinas Kesehatan Bone Bolango



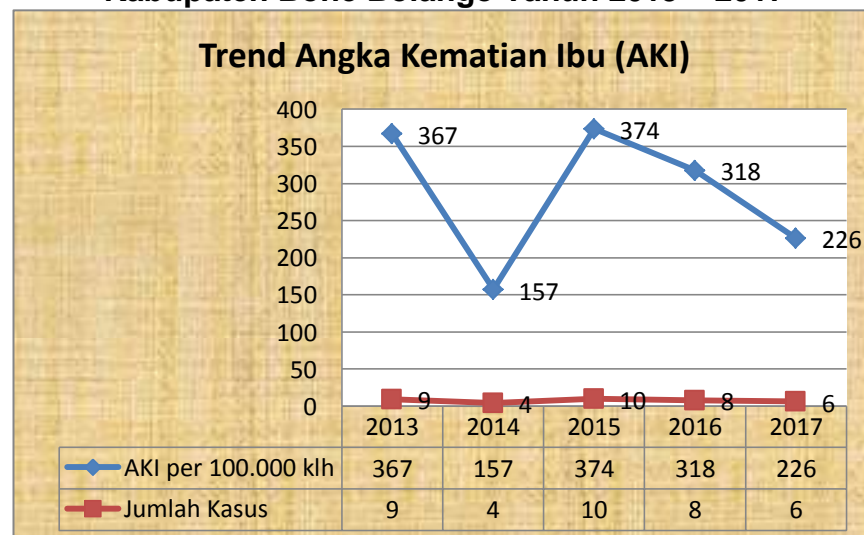
#### d. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2017, dimana target yang ingin dicapai yaitu 301.4 per 100.000 kelahiran hidup (KLH). Target ini jauh lebih tinggi dengan target nasional serta target pencapaian SDGs hingga tahun 2030 dengan target AKI yakni 70/100.000 KLH. Tahun 2017, AKI yang dicapai yakni 226 per 100.000 KLH atau 6 kasus kematian, dimana angka ini dibawah target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Angka ini juga mengalami penurunan dari tahun 2016, 318 per 100.000 KLH dimana terjadi 8 kasus kematian ibu.

Penyebab kematian ibu antara lain akibat penyakit penyerta yaitu *Pre Eklamsi Berat* (PEB) yang disertai penyakit Asma brokhitis, Eklampsia, kehamilan diluar kandungan, kelainan jantung (CHF), Ilius (gagal Ginjal). Dimana wilayah kerja puskesmas yang terdapat kematian ibu yaitu di Puskesmas Kabila, Tapa, Bulango Selatan, dan Bone Pantai. Dengan jumlah kematian ibu terbanyak yakni di wilayah Puskesmas Kabila yaitu 3 kasus.

Adapun trend AKI Kabupaten Bone Bolango selama 5 tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 4.20**  
**Trend Angka Kematian Ibu (AKI)**  
**Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 – 2017**



Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango



Grafik diatas menunjukkan nilai kinerja yang dinilai sudah cukup baik, penurunan yang signifikan sudah turun dari tahun ketahun. Program penurunan AKI dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompetensi, kepedulian ibu hamil itu sendiri dalam memeriksakan kehamilan di layanan kesehatan seperti Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, sehingga deteksi dini terhadap terjadinya komplikasi selama masa kehamilan dapat dilakukan.

Pemantapan implementasi Program Penanganan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta kemitraan bidan dan dukun. Pelaksanaan manajemen sistem rujukan ibu hamil risiko tinggi serta penambahan Puskesmas mampu *PONED* dan adanya partisipasi masyarakat dalam menyediakan rumah tunggu ibu hamil. Kemudahan dalam mengakses layanan kebidanan juga merupakan faktor yang mempengaruhi, ketersediaan sarana dan prasarana seperti Poskesdes serta alat kesehatan untuk layanan kebidanan telah tersedia. Dukungan dana dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak juga merupakan faktor penting dalam menurunkan AKI. Selain itu salah satu program inovasi dalam mengurangi jumlah kematian ibu dan anak yaitu *Gerakan Mutiara Berlian* (Muliakan Hati Atas Ridho Allah Bersama Lindungi Ibu dan Anak) serta gerakan *Infak Seribu* untuk ibu bersalin.

Semua pelayanan ibu hamil dan sistem rujukan sudah berjalan dengan baik namun masih tetap terjadi kematian ibu. Tingginya AKI di Kabupaten Bone Bolango lebih banyak disebabkan oleh penyakit penyerta yang diderita oleh ibu hamil, ibu hamil meninggal bukan dikarenakan oleh keterlambatan penanganan atau sistem rujukan yang kurang baik melainkan karena faktor ibu itu sendiri. Ibu hamil yang meninggal, rata-rata meninggal setelah di Rumah Sakit.



#### e. Cakupan Masyarakat Miskin yang terlayani dalam JKN

Strategi meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dan Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato. Dari table di atas terlihat, bahwa target indikator dari sasaran strategis 2 sebesar 98.4% dengan realisasi mencapai 100% sehingga capaian kinerja sebesar 108.33%, kategori nilai capaian **Sangat Tinggi**.

**Tabel 4.14**  
**Cakupan Jumlah Peserta Terdaftar**  
**Berbanding dengan Jumlah Penduduk**

NO	DATI II	JUMLAH PENDUDUK	PBI APBN	PBI APBD	PEKERJA PENERIMA UPAH	BUKAN PEKERJA	PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH	TOTAL PESERTA		BELUM PESERTA	
								JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/3)	11= (3-9)	12= (11/3)
1	KAB. BOALEMO	143.689	69.874	44.057	12.017	739	5.723	132.410	92%	11.279	8%
2	KAB. BONE BOLANGO	160.154	71.679	77.193	15.895	2.588	5.476	172.831	108%	-12.677	-8%
3	KAB. GORONTALO	391.935	236.247	82.071	39.435	6.970	18.137	382.860	98%	9.075	2%
4	KAB. GORONTALO UTARA	124.202	59.411	46.734	8.483	384	2.940	117.952	95%	6.250	5%
5	KAB. POHUWATO	141.281	59.093	60.003	12.678	380	5.737	137.891	98%	3.390	2%
6	KOTA GORONTALO	196.055	49.975	62.260	50.592	6.744	15.918	185.489	95%	10.566	5%
<b>TOTAL</b>		<b>1.157.316</b>	<b>546.279</b>	<b>372.318</b>	<b>139.100</b>	<b>17.805</b>	<b>53.931</b>	<b>1.129.433</b>	<b>98%</b>	<b>27.883</b>	<b>2%</b>

Sumber Data : BPJS Kesehatan Gorontalo

**Tabel 4.15**  
**Kontribusi Pemerintah Daerah Prov dan Kab Segmen PBI APBD**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Penanggung			
			Provinsi	%	Kab./Kota	%
1	KAB. BOALEMO	44.057	20.593	47%	23.464	53%
2	KAB. BONE BOLANGO	77.193	44.301	57%	32.892	43%
3	KAB. GORONTALO	82.071	51.041	62%	31.030	38%
4	KAB. GORONTALO UTARA	46.734	20.853	45%	25.881	55%
5	KAB. POHUWATO	60.003	33.193	55%	26.810	45%
6	KOTA GORONTALO	62.260	33.912	54%	28.348	46%
<b>TOTAL</b>		<b>372.318</b>	<b>203.893</b>	<b>55%</b>	<b>168.425</b>	<b>45%</b>

Sumber data : BPJS Kesehatan Gorontalo



**Tabel 4.16**  
**Jumlah Peserta PBU/Mandiri**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta
1	KAB. BOALEMO	5.723
2	KAB. BONE BOLANGO	5.476
3	KAB. GORONTALO	18.137
4	KAB. GORONTALO UTARA	2.940
5	KAB. POHUWATO	5.737
6	KOTA GORONTALO	15.918
<b>TOTAL</b>		<b>53.931</b>

Terkait dengan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Toto, berikut gambaran kinerja layanan rumah sakit untuk tahun 2017, yakni sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Toto**  
**Tahun 2017**

N O	Sasaran Strategis	Indikator Ke inerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Pelayanan yang bermutu berfokus pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan kurun waktu tertentu (BOR)	65 %	59 %	91 %
		Rata –rata lama rawatan seorang pasien (LOS)	6 hari	5 hari	83 %
		Frekwensi pemakaian tempat tidur beberapa kali dalam satuan waktu tertentu (BTO)	50 kali	46 kali	92 %
		Rata-rata hari tempat tidur ditempati dari saat terisis kesaat terisi berikutnya (TOI)	3 hari	3 hari	100 %
		Angka kematian ≥ 48 jam dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (NDR)	10 ‰	10 ‰	100 %
		Angka kematian untuk tiap – tiap 1000 penderita keluar (GDR)	20 ‰	20 ‰	100 %
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Pelanggan	90	89 %	99 %
3	Meningkatkan kinerja tata kelola BLUD RSUD	Persentase temuan material	0 %	0 %	100 %
		Nilai Sakip	B (70)	-	-
		Persentase penyerapan anggaran	100 %	84.8%	85 %



Sementara itu perkembangan kinerja layanan Rumah Sakit Tombulilato pada tahun 2017 juga mengalami perbaikan sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 4.18**

**INDIKATOR KEPERAWATAN RS  
SELANG TAHUN 2012 s/d 2017**

RL 1.2 Indikator Pelayanan Rumah Sakit (58 Bed/TT Klas III, 6 Bed/TT Klas II)

Tahun	BOR (60-85 %)	LOS (6-9 Hr)	BTO (40-50 Kali)	TOI (1-3 Hr)	NDR (/MIL)	GDR (/MIL)	Rata-rata Kunjungan rajal / Hari
1	2	3	4	5		7	8
Tahun 2012	4.4	2.1	7.6	45.85	0	0.89	5.94
Tahun 2013	7,6/9,96	3.2	8,5/11	39,7/29,3	22.3	24.3	5.85
Tahun 2014	12,2/9,24	9,40	32,52	10,28	0	11,05	5,64
Tahun 2015	20,42	2	47	6	0	0	8,33
Tahun 2016	26,6	8,1	17,5	22,7	13,7	1,3	14,98
Tahun 2017	45,7	7,3	20,3	9,7	12,8	0,8	16.1

**c. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

- Masih adanya petugas kesehatan yang belum memahami definisi operasional yang ada
- Petugas yang ada di beberapa puskesmas masih memiliki rangkap tugas sehingga keberhasilan program yang dipegang kurang maksimal
- Belum maksimalnya intervensi pengelola program dinas kesehatan pada kegiatan yang ada di setiap puskesmas
- Lemahnya sistem pengendalian intern, sehingga cenderung memperbesar terjadinya berbagai penyimpangan.



## Solusi

- Memberikan Bimbingan Teknis kepada seluruh pengelola program tentang Definisi operasional dan arti pentingnya pencapaian SPM bidang kesehatan
- Memaksimalkan fungsi manajemen dalam peningkatan kinerja program baik di dinas kesehatan maupun di puskesmas
- Melakukan pengusulan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPD) untuk permintaan penambahan pegawai sesuai dengan latar pendidikan yang diharapkan.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Kinerja Program dan kegiatan

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah guna mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka menempatkan sektor pekerjaan umum sebagai sektor yang strategis. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah Tahun 2017, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi anggaran pada APBD sebesar Rp.107.637.852.238 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 96.059.017.837 atau 89,24%.

#### 1) Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

- Pembangunan Jalan
  - Ruas Jalan danau perintis-sungai bone
  - Ruas Jalan SP mamungaa Cs
  - Ruas Jalan SP Tingkohubu barat-duano
  - Ruas Jalan SP akses kantor camat botupingge Cs
  - Ruas Jalan Bandungan-Longalo Cs
  - Ruas Jalan Desa Gintapi (Lanjutan)



- Ruas Jalan Desa Waolo
- Ruas Jalan Tulabolo-Pinogu
- Ruas Jalan Toto utara-KPU
- Ruas Jalan dunggala-talumopatu
- Ruas Jalan lomaya
- Ruas Jalan Poowo
- Ruas Jalan Moutong-bube Baru
- Ruas Jalan boludawa
- Ruas Jalan bubeya( lorong emes)
- Ruas Jalan Boludawa (Tolomato)
- Ruas Jalan Lompotoo
- Ruas Jalan Luwohu
- Ruas Jalan Pesantren-pasar botupingge
- Ruas Jalan Jalan desa Butu
- Ruas Jalan Huloduotamo
- Ruas Jalan Dumbaya bulan
- Ruas Jalan desa tingkohubu dusun III
- Ruas Jalan Desa Duano
- Ruas Jalan Desa Bulotalangi timur
- Pembangunan Jembatan
  - Pembangunan jembat polanggua
  - Pembangunan jembatan abudmen
  - Pembangunan jembatan pelintas desa mongiilo
- Pembangunan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan)
  - Peningkatan Jalan Ruas SP Dutohe -Dutohe Dalam, Cs
  - Peningkatan Jalan Ruas Sp. Ayula - Huntu Selatan, Cs
  - Peningkatan Jalan Ruas Permata - KPU, Cs
  - Peningkatan Jalan Desa Duano-Alale
  - Peningkatan Jalan Desa Bongoime
  - Peningkatan Jalan Desa Mootilango
  - Peningkatan Jalan Desa Moutong
  - Peningkatan Jalan Desa Huntu Barat





- Peningkatan Jalan Desa Buata-Lowohu
  - Peningkatan Jalan Desa Kramat (Akses Kantor Desa Kramat)
  - Peningkatan Jalan Desa Talulobutu Selatan
  - Peningkatan Jalan Desa Pangi
- 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
    - Pembangunan drainase desa Poowo
- Pembangunan drainase desa toto utara-selatan
  - Pembangunan drainase desa bongoime
  - Pembangunan drainase desa huloduotamo
  - Pembangunan drainase jalan BJ Habibie I
  - Pembangunan drainase jembatan merah
- 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (1920 meter)
- 4) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Rehabiltasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
  - Peningkatan saluran irigasi desa Bongoime
  - Rehabiltasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
    - Peningkatan jaringan irigasi DI Butaiyo
    - Peningkatan jaringan irigasi DI Bosolo
    - Peningkatan jaringan irigasi DI Tunggulo
    - Peningkatan jaringan irigasi DI Sambahuga
    - Peningkatan jaringan irigasi desa Bongopini-Bongohulawa
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
- Penyediaan Prasarana dan Sarana air limbah
    - Pembangunan sanitasi komunal kec Suwawa
    - Pembangunan sanitasi komunal kec Suwawa Selatan
    - Pembangunan sanitasi komunal kec Suwawa Tengah
  - Pengembangan sistem distribusi air minum



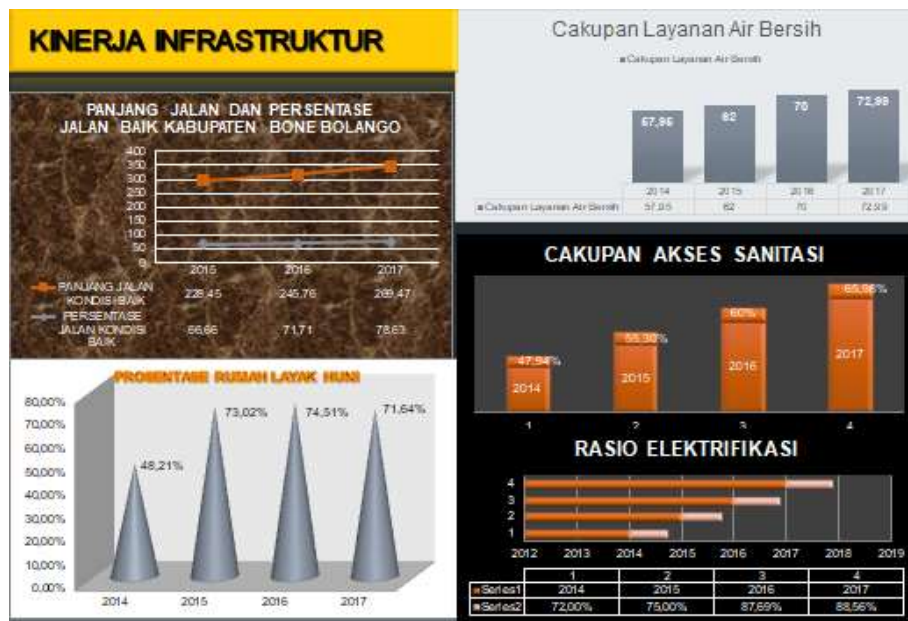
- Jaringan cabang distribusi jaringan distribusi utama perdesaan
  - Perluasan infrastruktur air minum perdesaan
  - Jaringan air minum sambungan rumah perdesaan
  - Penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)
    - Pamsimas Desa Tombulilato
    - Pamsimas Desa Bondauna
    - Pamsimas Desa Mootawa
    - Pamsimas Desa Muara Bone
- 6) Program Pembangunan Bangunan Pemerintahan
- Pembangunan Gedung Auditorium
  - Pembangunan Islamic Centre
  - Pembangunan lanjutan Gedung VIP RS Toto.
  - Pembangunan Gedung Bedah dan ICU RS Toto
  - Pembangunan lanjutan BPU Bone
  - Pembangunan lanjutan BPU Suwawa Timur
  - Rehab Gedung BKD Diklat Cs.
  - Penataan Halaman Kantor Pemerintahan BPKAD Cs.
- 7) Program Perencanaan Tata Ruang
- Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan (1 Dokumen KLS)
  - Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
  - Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
  - Survey dan pemetaan

**b. Capaian Kinerja**

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pekerjaan umum sebagai berikut:



**Grafik 4.21**



### Kinerja Bidang Jalan

Terpeliharanya kondisi jalan kabupaten dengan total panjang jalan 325.184 meter. Adapun rekapitulasi dari kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 4.19**

### Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja	2016 (km)	2017 (km)
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	245.76	269.47
2	Panjang Jalan Terbangun (Km)	17,31	23,71

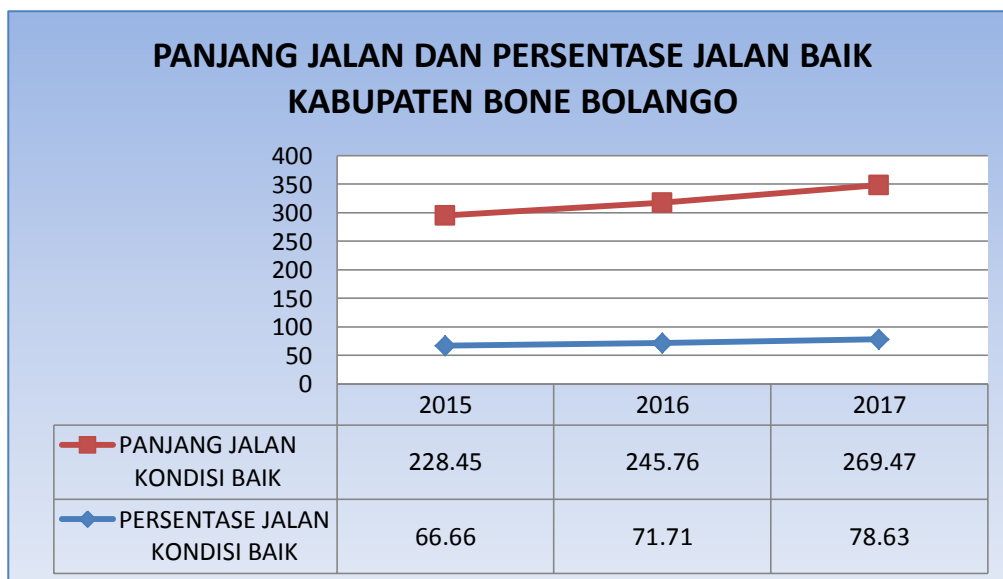
Sumber : Dinas PUPR

Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum melalui Program Kegiatan Tahun 2017 telah melaksanakan peningkatan jalan sebesar 23,71 km, jika dilihat pada tabel di atas maka realisasi jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Bone Bolango sebesar 78,63 % atau sepanjang 269,47 Km dengan capaian kinerja sebesar 107%.





**Grafik 4.22**  
**Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik**  
**Tahun 2015 – 2017**



Sumber data :Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango

**Tabel 4.20**  
**Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik**  
**Tahun 2013-2017**

Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	34,28%	43,78 %	66,66%	71,71%	78,63%

Sumber data :Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango

### Kinerja Pengelolaan Irigasi

Untuk Jaringan irigasi (sekunder) kondisi baik tahun 2017 mencapai 7.759 meter atau sebesar 77,59 %. Sedangkan untuk luas jaringan irigasi mencapai 721 ha, meningkat sebesar 325 ha dari tahun sebelumnya, seperti yang digambarkan pada tabel berikut:



**Tabel 4.21**  
**Kinerja jaringan irigasi selang tahun 2014-2017**

NO	KINERJA	2014	2015	2016	2017
1	Irigasi (meter)	2.367	3.683	3.728	7759
2	Luas Jaringan Irigasi (ha)	269,86	316	396	721

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango

### Kinerja Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Infrastruktur keciptakarya yang dibangun pada tahun 2017 dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 4.22**

<b>Pekerjaan Bidang Cipta Karya</b>
Pembangunan VIP Rumah Sakit Toto
Pembangunan Ruang Bedah
Pembangunan Auditorium
Pembangunan Islamic Centre
Pembangunan BPU Taludaa
Pembangunan BPU Suwawa Timur Tahap II

<b>P e k e r j a n Bidang Tata Ruang</b>
Pembangunan RTH Kec. Bone Pantai
Pembangunan Trotoar
Penataan Kawasan Pemerintahan (Inspektorat, DPKAD)
Pembangunan Pagar Jalan Masuk Alun-alun (Capil dan Perizinan)
Pembangunan RTH Bone Raya
Pembangunan RTH Ipot Tapa
Pembangunan RTH Perbatasan Kabupaten (Bone)
Pembangunan Median Jalan (Suwawa)
Penataan Kawasan Pemerintahan (Inspektorat, DPKAD)
Peningkatan Joging Track Lapangan Ippot Tapa



Penataan Jalan Masuk Pendopo Bupati  
pembangunan Tugu Kebangsaan

### Kinerja Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi

Perkembangan cakupan layanan air bersih di Kabupaten Bone Bolango setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.23**  
**Kondisi Masyarakat Perdesaan Yang Terlayani Air Minum**

NO	TAHUN	MASY PERDESAAN YG TERLAYANI AIR MINUM (JIWA)	MASY PERDESAAN YG TERLAYANI AIR MINUM SAMPAI DENGAN (JIWA)	%
1	2015	n/a	27.785	53,88
2	2016	2.600	30.385	58.92
3	2017	5.500	35.885	69,59

Sumber Data: Dinas PUPR Kab.Bone Bolango

**Tabel 4.24**  
**Kondisi Masyarakat Perdesaan Yang memiliki akses sanitasi**

NO	TAHUN	MASY PERDESAAN YG MEMILIKI AKSES SANITASI (RT)	MASY PERDESAAN YG MEMILIKI AKSES SANITASI SAMPAI DENGAN (RT)	%
1	2015	n/a	14.075	39,83
2	2016	1.760	15.835	44,81
3	2017	2.800	18.635	52,73

Sumber Data: Dinas PUPR Kab.Bone Bolango

PDAM Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pembangunan sambungan pipa perkotaan melalui program sambungan gratis bagi masyarakat Bone Bolango yang ingin melakukan penyambungan pipa ke rumah. Adapun jumlah sambungan rumah yang tersambung sampai tahun 2017 melalui sambungan pipa perkotaan oleh PDAM sebanyak 14.365 SR.



Selain penyambungan pipa perkotaan yang dilakukan oleh PDAM, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga membangun akses jaringan air minum melalui program PAMSIMAS yang melayani sambungan pipa pedesaan yang dilaksanakan di 20 desa dengan jumlah sambungan rumah yang dilayani sebanyak 7.177 Rumah Tangga Desa. Sehingga total sambungan rumah yang dilayani melalui kegiatan sambungan pipa perkotaan dan pedesaan sebanyak 21.542 rumah. Hal ini seperti yang tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 4. 25**  
**Jumlah Sambungan Air Minum Kab. Bone Bolango**  
**Tahun 2015 – 2017**

No.	URAIAN	2015	2016	2017
1.	SR Air Minum Perkotaan Terpasang (PDAM)	9.742	11.765	14.365
2.	SR Air Minum Perdesaan Terpasang	5557	6077	7177
<b>TOTAL</b>		<b>15.299</b>	<b>17.842</b>	<b>21.542</b>

Sumber Data: Dinas PU dan PDAM Kab. Bone Bolango

Faktor yang mendukung keberhasilan layanan air bersih dan sanitasi adalah ketersediaan Sumber Air Baku yang saat ini sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Bone Bolango sebanyak 3 sumber air baku yaitu sungai bone, sungai bolango dan mata air ulantha.

### **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang ke PU an antara lain:

- Penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur adalah kendala paling mendasar yang sering menyebabkan terlambatnya atau tertundanya pekerjaan bidang infrastruktur.

Solusi yang ditempuh adalah dengan memastikan ketersediaan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Koordinasi dengan Dinas Perkimtan juga diperkuat untuk mendukung penyediaan lahan untuk infrastruktur.



- Tingginya laju tingkat kerusakan jalan pertahun di Kabupaten Bone Bolango menjadi kendala yang cukup besar dalam pencapaian target kinerja hal tersebut disebabkan karena pembebanan lalu lintas yang melebihi kapasitas pembebanan rencana/excessive overloading dan umur teknis jalan yang sebagian besar memang telah melampaui batas optimalnya.  
Solusi yang dilakukan dengan tingginya laju kerusakan jalan melalui program pemeliharaan berkala/overlay dan pemeliharaan rutin yang ditunjang dengan dioperasikan kendaraan multi fungsi/multi purpose vehicle untuk penutupan lubang/patching dan pelapisan ulang permukaan/surface dressing.
- Belum optimalnya perencanaan infrastruktur khususnya dalam penyediaan database infrastruktur sehubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur dasar baik menyangkut desain, pemeliharaan jalan dan jembatan, bidang air minum dan sanitasi serta pengelolaan irigasi, penanganan kawasan genangan banjir dan abrasi pantai.  
Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam penyediaan basis data infrastruktur sebagai landasan dalam perencanaan infrastruktur.
- Permasalahan yang dihadapi yang menjadi penghambat kinerja layanan air bersih seperti masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan air bersih, ketersediaan sebagian sumber air yang digunakan terletak di daerah yang rawan bencana yang jika terjadi bencana longsor sering mempengaruhi distribusi air baku terhadap masyarakat, serta penggunaan teknologi pengelolaan air baku masih sederhana sehingga terkadang pada saat musim hujan Instalasi Pengelolaan Air tidak bisa berjalan normal yang menyebabkan distribusi air ke pelanggan terganggu.  
Solusi yang dilakukan utamanya berupa sosialisasi tentang pengelolaan air bersih, memberdayakan pengelolaan air bersih





berbasis pedesaan yang dikelola masyarakat, serta optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman

##### a. Kinerja Program dan kegiatan

Untuk tahun 2017 Alokasi Anggaran sebesar Rp.6.718.013.244,- dengan realisasi Rp.5.568.016.617,- atau 82,88% yang dikelola oleh Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman.

- 1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :
  - Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
  - Pembangunan Hunian Pantas 150 unit
  - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
- 2) Program Pengembangan Permukiman, dengan kegiatan :
  - Penyusunan dokumen rencana kawasan permukiman (RKP)
    - Penyusunan RP2KKPKP
  - Penyusunan Peraturan Daerah penyelenggaraan Permukiman
  - Penyusunan database kawasan permukiman kumuh
  - Penyiapan/pematangan lahan lokasi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah untuk Perumahan komunal terintegrasi
  - Pembangunan Jalan lingkungan kawasan permukiman

##### b. Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja cakupan rumah layak huni tidak sesuai target tahun 2017 yang telah ditetapkan yakni sebesar 76,5% atau sebanyak 26.761 rumah layak huni dari total





rumah di Kabupaten Bone Bolango sebesar 34.982 unit rumah. Sedangkan Realisasi rumah cakupan rumah layak huni di tahun 2017 sebesar 48.14% atau sebanyak 16.841 unit rumah dengan capaian kinerja sebesar 62,93%. Perubahan data yang menyebabkan perubahan besar dalam proporsi rumah tidak layak tersebut akibat ketentuan baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur tentang kriteria rumah layak huni.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 500 unit rumah yang menggunakan dana APBN sebanyak 350 unit rumah dan dana APBD sebanyak 150 unit rumah.

**Tabel 4.26**  
**Jumlah Rumah Layak Huni**  
**selang tahun 2014-2017**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA PERTAHUN			
	2014	2015	2016	2017
Cakupan Rumah layak huni bagi masyarakat	15.365	25.099	26.044	16.841

Sumber Data: Dinas Perumahan Kab.Bone Bolango

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 3 Huruf f yang dimaksud dengan “rumah yang layak huni dan terjangkau” adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dan pasal 24 huruf a bahwa yang dimaksud dengan “rumah yang layak huni” adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Ukuran standar kecukupan minimal



luas bangunan rumah adalah luas lantai perkapita sebesar 7,2 meter per segi.

Berdasarkan data Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Permen PUPR No. 13 Tahun 2017 jumlah total rumah yang tersebar di seluruh Kecamatan sebanyak 34.982 unit. Jumlah rumah layak huni sebanyak 16.841 unit dan rumah tidak layak huni 18.141 unit. Untuk lebih jelasnya sebaran rumah layak huni perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.27**  
**Rekapitulasi Jumlah Rumah, Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bone Bolango**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SELURUH RUMAH	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK
1	Tapa	1468	1084	384
2	Kabila	3751	2711	1040
3	Suwawa	2392	1647	745
4	Bone Pantai	1109	185	924
5	Bulango Utara	1453	731	722
6	Tilongkabila	10272	4083	6189
7	Botupingge	1164	523	641
8	Kabila Bone	1970	1188	782
9	Bone	1646	562	1084
10	Bone Raya	1214	398	816
11	Suwawa Timur	1109	455	654
12	Suwawa Selatan	953	279	674
13	Suwawa Tengah	1144	723	421
14	Bulango Ulu	776	304	472
15	Bulango Selatan	1961	986	975
16	Bulango Timur	1027	630	397
17	Bulawa	1112	241	871
18	Pinogu	461	111	350
<b>TOTAL</b>		<b>34982</b>	<b>16841</b>	<b>18141</b>

Sumber Data: Dinas Perumahan Kab.Bone Bolango

Untuk tahun 2017 kabupaten bone bolango membangun 612 unit rumah layak huni dengan rincian 500 unit bersumber dari



APBN, 61 unit berasal dana desa, 52 berupa bantuan BBR serta 1 unit dari bedah rumah.

Berikut kami tampilkan dalam tabel yang merupakan pendukung cakupan rumah layak huni.

Adapun untuk kinerja perumahan berikut ditampilkan trend dari tahun 2014-2017.

**Tabel 4.28**  
**Kinerja Perumahan Tahun 2014-2017**

NO	KINERJA	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Rumah Layak Huni	48,21%	73,02%	74,51%	71,64%
2	Cakupan Akses Sanitasi Layak	47,94%	55,30%	60%	65.98%
3	Cakupan Akses air Bersih	57,95%	62%	70%	72.99%
4	Rasio Elektrifikasi	72%	75%	87,69%	88,56%

Sumber Data: Dinas Perumahan Umum Kab. Bone Bolango

**Tabel 4.29**  
**Program Pendukung Cakupan Rumah Layak Huni**

No.	URAIAN	2015	2016	2017
1.	SR Air Minum Terpasang	15.299	17.842	21.542
2.	Listrik terbangun (SR)	1061	1274	1274
3.	Rumah Layak Huni Terbangun	1754	2345	2957
4.	Ipal Komunal terbangun	5 Unit	13 Unit	13 Unit

Sumber Data: Dinas Perumahan, Dinas PU dan PDAM Kab.Bone Bolango

Beberapa upaya pendukung dalam mempercepat kinerja perumahan di Kabupaten Bone Bolango, yakni:

- Kinerja PDAM Kabupaten Bone Bolango dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian target rumah layak huni yaitu melalui memberikan sambungan gratis bagi warga Bone Bolango yang ingin melakukan penyambungan pipa kerumah penduduk.



Adapun jumlah sambungan rumah yang tersambung sampai tahun 2017 sebanyak 14.365 SR.

- Melalui program yang berbasis masyarakat diwilayah pedesaan dilaksanakan pula Program PAMSIMAS di 20 Desa yang diarahkan pada wilayah pedesaan dengan akses jaringan yang sulit dipenuhi oleh PDAM. Jumlah Sambungan rumah yang dilayani program ini sejumlah 7.177 Rumah Tangga Desa.
- Bantuan Rumah yang layak bagi MBR setiap tahun baik berupa bantuan stimulan rumah swadaya alokasi dana dari APBN, rumah khusus bagi nelayan alokasi dana dari APBN, bantuan rumah Hunian Pantas (HP) dengan alokasi anggaran APBD kabupaten dan bantuan bahan rumah (BBR) dengan dana APBD serta dukungan hunian pantas melalui APBDes.

**c. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian cakupan rumah layak huni dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- Rendahnya kinerja rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango disebabkan adanya Perubahan Peraturan Menteri PUPR dimana pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 tahun 2016 menyebutkan bahwa rumah yang rusak ringan tidak lagi termasuk dalam kategori rumah layak huni, sehingga jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 jika menurut Permen PUPR Nomor 39 Tahun 2015 yang berjumlah 27.222 rumah berkurang menjadi 16.841 rumah.
- Kepastian lahan masyarakat: kendalanya adalah bahwa persyaratan bantuan rumah bagi MBR harus menyertakan dukungan kepemilikan lahan, sedangkan kebanyakan masyarakat yang memasukkan usulan bantuan rumah tidak memiliki lahan atau belum memiliki lahan sendiri dan hanya merupakan lahan keluarga.



- Bantuan rumah hanya berupa stimulan bagi MBR, sedangkan rata-rata MBR tidak mempunyai tambahan dana yang akan digunakan untuk menambah bantuan stimulan rumah yang diberikan pemerintah karena penghasilan mereka yang sangat minim jauh dari penghasilan yang layak.

### **Solusi**

Solusi yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah adalah harus memberikan bantuan secara utuh untuk pembangunan rumah, bukan hanya berupa bantuan stimulant.

Oleh karena itu Bupati Bone Bolango telah membuat terobosan baru yaitu dengan memberikan bantuan rumah utuh bagi masyarakat MBR dengan membangun rumah melalui Dana Desa berupa hunian pantas yang berjumlah 60 rumah dan Alokasi Dana Desa berupa pembangunan hunian pantas sebanyak 25 rumah ditahun 2017.

Bupati Bone Bolango menghimbau kepada semua desa di Kabupaten Bone Bolango agar bisa mengalokasikan anggaran setiap tahun 1 rumah utuh sebagai bantuan Hunian Pantas (HP) bagi masyarakat MBR di desa tersebut. Karena jika hal ini bisa diwujudkan maka dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango yaitu 160 desa maka setiap tahun bisa menyediakan rumah sebanyak 160 rumah Hunian Pantas utuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah di setiap desa di Kabupaten Bone Bolango. Dengan harapan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

## **5. Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat**

### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

Urusan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga kententraman dan ketertiban umum juga dilaksanakan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal untuk tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Stauan Polisi pamong praja, badan



kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan bencana Daerah dan Sekretariat Daerah dengan anggaran Rp.10.743.477.500,- dengan realisasi anggaran Rp.10.236.594.810,- atau 95,28%.

1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan:

- Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Pelaksanaan DIKLAT PPNS
- Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
  - Pelaksanaan RAZIA Balap Liar
- Pengendalian keamanan lingkungan
  - Razia Tempat Hiburan Malam
  - Razia kost-kostan
  - Razia Izin bangunan tempat Usaha
  - Razia Izin galian c dan izin-izin tertentu lainnya
  - Pengendalian Hewan Lepas
  - Patroli wilayah Gaktratibum

2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
  - Penindakan disiplin Pegawai
  - Pengawasan dan pengamanan Kunjungan kerja
- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
  - Pelaksanaan Rakor Keamanan
- Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
  - Pelaksanaan Latsar Satuan Polisi Pamong Praja

3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan



- Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat
  - Sosialisasi Solidaritas dan ikatan sosial
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
  - Sosialisasi Solidaritas dan ikatan sosial
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
  - Pelaksanaan kegiatan hari-hari besar keagamaan Isra Mi'raj
  - Pelaksanaan kegiatan keagamaan nisfu sya'ban
  - Pelaksanaan kegiatan keagamaan safari ramadhan
  - Pelaksanaan kegiatan keagamaan nuzulul qur'an
  - Pelaksanaan kegiatan keagamaan Buka Puasa bersama
  - Pelaksanaan kegiatan keagamaan Hai Asyura
  - Pelaksanaan kegiatan keagamaan STQ tingkat kabupaten dan provinsi
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
  - Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat
  - Pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
  - Sosialisasi Tim terpadu Penanganan Konflik di masyarakat
- 5) Program Pendidikan Politik Masyarakat
  - Penyuluhan Kepada Masyarakat
  - Penyuluhan Undang-undang Pemilu
  - Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
  - Sosialisasi budaya dan etika politik berbasis budaya lokal
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan





- 6) Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat
  - Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat
    - Sosialisasi FKUB
- 7) Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi
  - Sarasehan dan Dialog Ketahanan Ekonomi
    - Dialog Ketahanan Ekonomi
- 8) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
  - Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam seperti penyediaan Mobil Dalmas, operasional mobil Damkar dan sarana prasarana lainnya.
  - Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sampah
- 9) Program Penanganan Darurat dan Logistik
  - Perbaikan Darurat Bencana Dalam Rangka Pemulihan Dini Sarana dan Prasarana Vital di Daerah Terkena Bencana Alam (Lanjutan)
- 10) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
    - Pelaksanaan HUT Bone Bolango
    - Pelaksanaan peringatan hari patriotik 23 januari
    - Pelaksanaan Peringatan HUT Republik Indonesia
  - Fasilitas pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan



## **b. Capaian Kinerja**

Capaian urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2017 adalah pelaksanaan DIKLAT PPNS sebagai bentuk keseriusan dalam tindakan pengawasan internal pemerintah kabupaten bone bolango selain itu dilakukannya razia-razia dalam usaha peningkatan keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat untuk kerukunan beragama dibentuk FKBU sebagai wadah pemersatu antar umat beragama. Selain itu pelaksanaan hari-hari besar keagamaan menjadi keluaran dari program-program strategis yang dilaksanakan pada urusan ini.

## **c. Permasalahan dan solusi**

### **Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan bidang kesatuan bangsa adalah

- Belum optimalnya pembinaan Sumberdaya aparatur dengan tugas khusus (intelijen) dirasakan masih kurang secara kualitatif dan kuantitatif sehingga pelaksanaan tugas SKPD belum maksimal.
- Belum lancar dan optimalnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga informasi dan isu-isu aktual tentang keadaan sosial politik daerah kurang memadai.

### **Solusi**

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan di atas adalah

- Meningkatkan implementasi menyangkut beberapa kegiatan yang dapat disinergikan seperti sosialisasi Pilkades, Koordinasi Penanganan Masalah Strategis, Sosialisasi Bahaya Pornografi Pornoaksi, Komunitas Intelijen Daerah, Pembinaan dan Pendidikan Politik Masyarakat



- Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait melalui wadah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat berkala
- Mengusulkan perubahan ketentuan tentang standar bantuan yang dapat diberikan oleh daerah untuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) kepada Mendagri

## 6. Urusan Sosial

### a. Kinerja Program dan kegiatan

Untuk urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.092.587.500,- Dengan realisasi sebesar Rp. 15.686.614.784,- atau 97,48 %.

Adapun rincian Program dan Kegiatan adalah

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
  - Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya sebanyak 18 petugas
  - Honorarium tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) 18 orang
  - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
    - Pemberian Bantuan KUBE kepada 40 kelompok
    - Pemberian bantuan UEB janda miskin berjumlah 40 orang
    - Pemberian bantuan usaha kepada 100 orang berupa bantuan untuk warung kecil, kantin, penjual ikan, alat pangkas rambut, percetakan dan pembuatan kue
- 2) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



- Pelaksanaan Festival Anak yatim 5 jenis lomba yang diikuti 150 peserta anak yatim
  - Pelaksanaan Khitanan/Pembeatan anak yatim diikuti 400 orang anak yatim
  - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
    - Pemberian Bantuan disabilitas dan anak cacat sebanyak 20 orang
    - Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS berupa Pemberian Bantuan Rumah Kepada 10 orang Janda Miskin
  - Pelaksanaan Bimtek PBIJKN diikuti oleh 165 orang perwakilan desa dan kelurahan
  - Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
    - Verivali basis data terpadu (BDT)
  - Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan penurunan kesenjangan
    - Pendampingan PKH terhadap 8059 KK dengan jumlah pendamping sebanyak 49 orang.
  - Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
    - Pemberian bantuan Bencana
    - Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) Suwawa Timur yang berpusat di Desa Panggi
- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha
    - Pemberian sarana usaha bagi karang taruna sebanyak 10 karang taruna



- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
  - Sosialisasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
  - Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
    - Peringatan Hari Pahlawan
- 4) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
  - Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana alam

#### **b. Capaian Kinerja**

Jumlah PMKS semakin meningkat dari 3.380 PMKS tahun 2016, saat ini mencapai 7.050 PMKS. Tahun 2017 pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui urusan sosial memberikan intervensi pada masyarakat miskin melalui pemberian KUBE/UEP. Selain itu juga dilakukan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya. Pelaksanaan festival anak yatim menjadi hasil dari Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Pembentukan kampung siaga bencana di Kecamatan Suwawa Timur serta pemberian bantuan untuk karang taruna.

Pada tahun 2017 dilakukan pembeatan dan sunat masal yang diikuti oleh 200 orang untuk beat masal dan 200 orang untuk sunat masal dimana seluruhnya adalah anak yatim dan anak yatim piatu selain itu keseluruhan anak-anak itu diberikan perlengkapan sekolah berupa tas dan sepatu.

Untuk intervensi pemerintah dalam bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, diberikan bantuan kepada 100 orang berupa bantuan untuk warung kecil, kantin, penjual ikan, alat pangkas rambut, percetakan dan pembuatan kue.



Untuk bantuan kepada para janda miskin diberikan bantuan berupa modal dagang kecil, kantin dan pembuatan kue yang jumlah keseluruhannya sebanyak 40 orang.

Untuk PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 20 orang dari 1.329 orang atau sebesar 1,50 % dan terealisasi 100 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.30**

NO	Jenis PMKS	Jumlah yang direhabilitasi	Jumlah yang seharusnya direhabilitasi
1.	Anak Cacat	10 orang	589 orang
2.	Penyandang Disabilitas	11 orang	740 orang
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>1.329 orang</b>
<b>Persentase</b>		<b>1,50 %</b>	

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memberikan bantuan kursi roda, alat bantu dengar dan tangan palsu kepada masyarakat penyandang disabilitas sebanyak 11 orang. Namun walaupun target kinerja tercapai tapi Penanganan penyandang cacat/disabilitas dirasakan belum optimal, hal ini terkendala oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial harus disertakan dengan proposal pengajuan bantuan sosial yang disampaikan satu tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial tidak dapat dengan leluasa



memberikan bantuan sosial berupa alat bantu bagi penyandang cacat seperti kursi roda, hearing-aid, tongkat putih, dan sebagainya.

Kurangnya data tentang minat, bakat dan potensi para penyandang cacat, sehingga menyebabkan keterbatasan



pemerintah memaksimalkan bantuan. Selain itu stigma dalam masyarakat bahwa memiliki anggota keluarga cacat merupakan aib menyebabkan ada penyandang cacat yang tidak terdata sehingga tidak masuk dalam daftar yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Oleh sebab itu memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas tentang potensi dirinya sendiri agar dapat mengembangkan diri serta dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan memberikan pemahaman serta mendorong keluarga agar dapat memberikan motivasi kepada anggota keluarganya yang menyandang disabilitas.

Untuk Meningkatkan Pelayanan bagi PMKS dan Mengurangi Beban Sosial PMKS yang menjadi Korban Bencana dilakukan kegiatan pemberdayaan bagi keluarga miskin sebanyak 25 kepala keluarga dari 99 kepala keluarga.

### **c. Permasalahan dan solusi**

#### **Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan pada bidang sosial ini adalah:

- Belum optimalnya perencanaan serta updating sasaran program perlindungan sosial seperti PKH, JKN, dan program perlindungan sosial sehingga sering terjadi tumpang tindih bantuan sosial
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program sehingga unsur keadilan dan pemerataan dalam program ini masih belum memenuhi harapan masyarakat.

#### **Solusi**

Adapun yang menjadi solusi pada program perlindungan sosial adalah:

- Penguatan basis data dengan memvalidasi data RTM untuk optimalisasi penentuan karakteristik penerima bantuan yang didasarkan kebutuhan sasaran program.



- Optimalisasi pemberian bantuan sosial yang didasarkan pada aspek keadilan dan pemerataan yakni dilihat dari besaran yang diterima penduduk miskin setiap tahun serta karakteristik penduduk miskin (sangat miskin, miskin dan hampir miskin).

## **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

### **1. Urusan Tenaga Kerja**

#### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja untuk urusan Tenaga Kerja pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 118.645.000,- Dengan realisasi sebesar Rp. 117.570.000,- atau 99,09 %. Urusan tenaga kerja tersebut diarahkan untuk program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  - Pemberian Fasilitas Dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
- 3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
  - Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

#### **b. Capaian Kinerja**

Adapun yang menjadi capaian kinerja outcome program ketenagakerjaan adalah:

- Menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Bone Bolango sebesar 4,28% di tahun 2016.

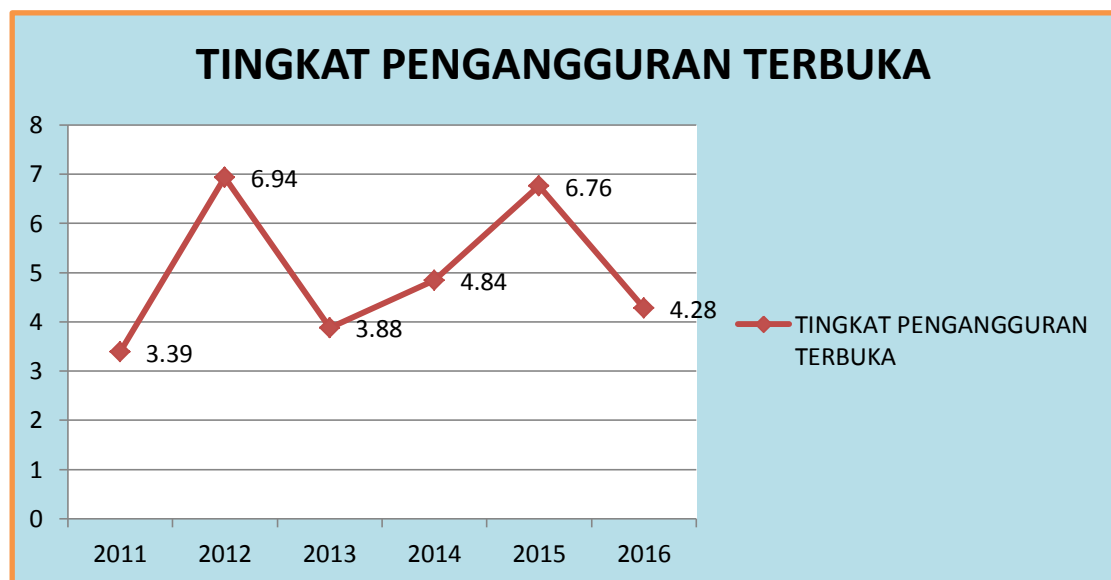
Tenaga kerja terkait langsung dengan tingkat pengangguran. Sesuai data BPS Kabupaten Bone Bolango tingkat pengangguran di Kabupaten Bone Bolango mengalami fluktuasi setiap tahunnya





dimana pada Tahun 2011 tingkat pengangguran di Kabupaten Bone Bolango sebesar 3,39 % di tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 6,94 %. Akan tetapi dari Tahun 2013 sampai Tahun 2015 tingkat pengangguran terus mengalami peningkatan sampai 6,76 %. Di tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,28%. Hal ini seperti yang di gambarkan pada grafik berikut :

**Grafik 4.23**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2016**



Sumber data : BPS Kabupaten Bone Bolango

### c. Permasalahan dan solusi

#### Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang ketenagakerjaan adalah

- Penyediaan lapangan kerja dalam rangka menurunkan angka pengangguran
- Belum optimalnya pembinaan bagi calon tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja
- Belum optimalnya kerja sama dengan pihak swasta dalam perekrutan tenaga kerja dalam daerah



## **Solusi**

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan bidang ketenagakerjaan adalah

- Pengoptimalisasikan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam proyek proyek pemerintahan serta advokasi pada investasi swasta dalam pemanfaatan tenaga kerja lokal.
- Meningkatkan proyek-proyek padat karya utamanya yang dilaksanakan melalui APBDesa.
- Meningkatkan fasilitas dibidang industri dalam upaya penciptaan lapangan kerja
- Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola kekayaan alam daerah sehingga akan tercipta lapangan kerja baru yang membutuhkan tenaga kerja

## **2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak**

### **a. Program Kegiatan dan Capaian Kinerja**

Pada tahun 2017, untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yang memiliki 3 program dan 7 kegiatan strategis yang terinci sebagai berikut

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
    - Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
      - Pembayaran kontrak rumah untuk P2TP2A (1 Tahun)
    - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
      - Publikasi lembaga pemberdayaan perempuan dan anak melalui media massa
    - Pengembangan sistem informasi gender dan anak
- Penyusunan Data terpilah



2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
  - Pemberian Visum pada korban kekerasan (34 orang)
  - Pendampingan korban kekerasan (34 Orang)
  - Sosialisasi Pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - Penyusunan Dokumen Monev usaha perempuan

3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

- Pembinaan Organisasi Perempuan
  - Pelaksanaan peringatan hari Ibu
- Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
  - Pelatihan Ibu rumah tangga (100 orang)

Untuk urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 dialokasikan anggaran APB tahun 2017 sebesar Rp.222.045.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 212.658.500 atau 95,77%. Selain alokasi anggaran diatas melalui DPMDesa dialokasikan pula anggaran untuk pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan PKK Kabupaten sejumlah Rp.350.000.000, serta melalui belanja tidak langsung dialokasikan anggaran untuk kegiatan Dharma Wanita Kabupaten sejumlah Rp.250.000.000.



**Tabel 4.31**  
**KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak					
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi	
Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Hak-hak Perempuan dan Anak	%	184,6	19.40% (menurun 13 kasus)	32.84% (103 kasus atau menurun 44 kasus)	169.28

Sumber Data: Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, diperoleh gambaran indikator kinerja persentase penurunan kasus pelanggaran hak-hak perempuan dan anak tahun 2017 ditetapkan sebesar 19.40% sedangkan realisasinya sebesar 32.84% atau penurunan kasus pelanggaran hak-hak perempuan dan anak sampai tahun 2017 sebesar 44 kasus dengan persentase kinerja sebesar 169% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Meski konsekuensi hukumannya cukup berat, dan pemerintah maupun masyarakat sipil di Kabupaten Bone Bolango pun telah bekerja keras mengatasinya dengan menghabiskan dana serta sumber daya lainnya, namun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah justru terus terjadi. Sepertinya para pelaku kekerasan itu tidak takut sedikit pun. Untuk lebih jelasnya peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



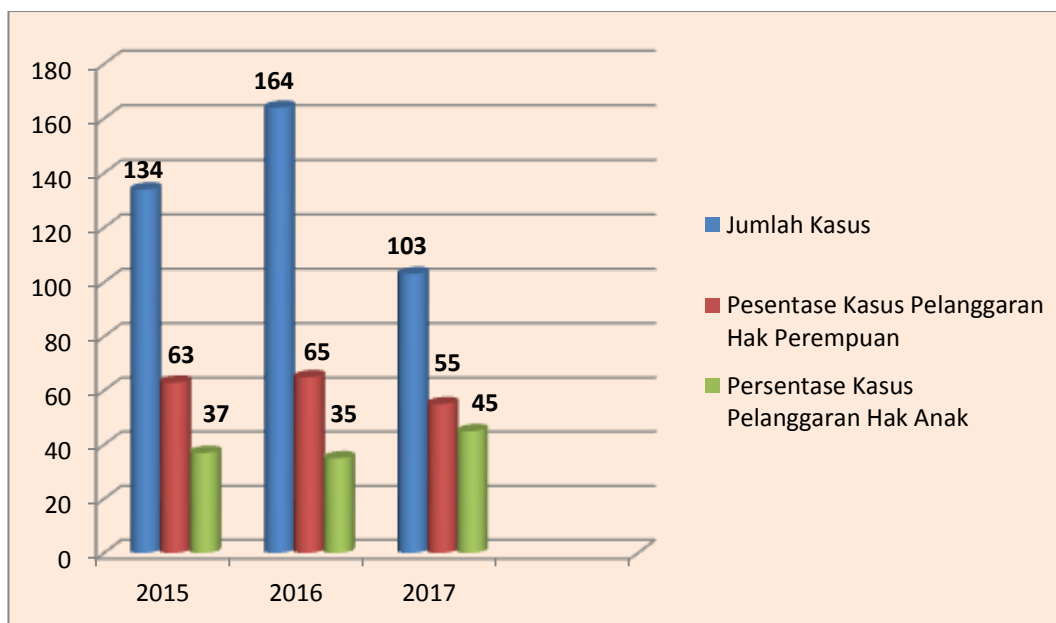
**Tabel 4.32**  
**Perkembangan Jumlah Kasus Pelanggaran Hak-hak Perempuan dan Anak tahun 2015 - 2017**

Uraian	2015	2016	2017
Kasus pelanggaran hak anak	50 kasus	57 kasus	46 kasus
Kasus pelanggaran hak perempuan	84 kasus	107 kasus	57 kasus
<b>Total</b>	<b>134 Kasus</b>	<b>164 kasus</b>	<b>103 kasus</b>

Sumber Data: Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tabel di atas jika dibandingkan dengan tahun 2016 kasus pelanggaran hak perempuan dan anak pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 61 kasus, dimana kasus pelanggaran hak perempuan menurun sebanyak 11 kasus dan kasus pelanggaran hak anak menurun sebanyak 50 kasus

**Grafik 4.24**  
**Perkembangan Capaian Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Hak-hak Perempuan dan Anak tahun 2015 – 2017**



Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pelanggaran yang terjadi setiap tahun lebih banyak pelanggaran terhadap hak perempuan pada tahun 2017 pelanggaran Hak perempuan sebesar



55 % dan pelanggaran hak anak sebesar 45 % dari total 103 kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.

- **Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian sasaran :**

1. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mengadakan Sosialisasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
2. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (P2TP2A). Penguatan Kelembagaan ini senantiasa bekerjasama dengan Unit PPA Reskrim Bone Bolango sebagai upaya pendampingan untuk bantuan hukum dan peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
3. Ketua Bunda PAUD Kabupaten Bone Bolango senantiasa mengkampanyekan anti kekerasan terhadap anak dengan berharap masyarakat harus lebih peduli, perhatian dan berikan kasih sayang terhadap anak. Dengan mengajarkan kebaikan kepada anak akan menjadikan mereka manusia yang bermanfaat bagi bangsa maupun agama.



**Tabel 4.33**  
**Perkembangan Jumlah Kasus Pelanggaran Hak-hak Perempuan dan Anak tahun 2015- 2017**

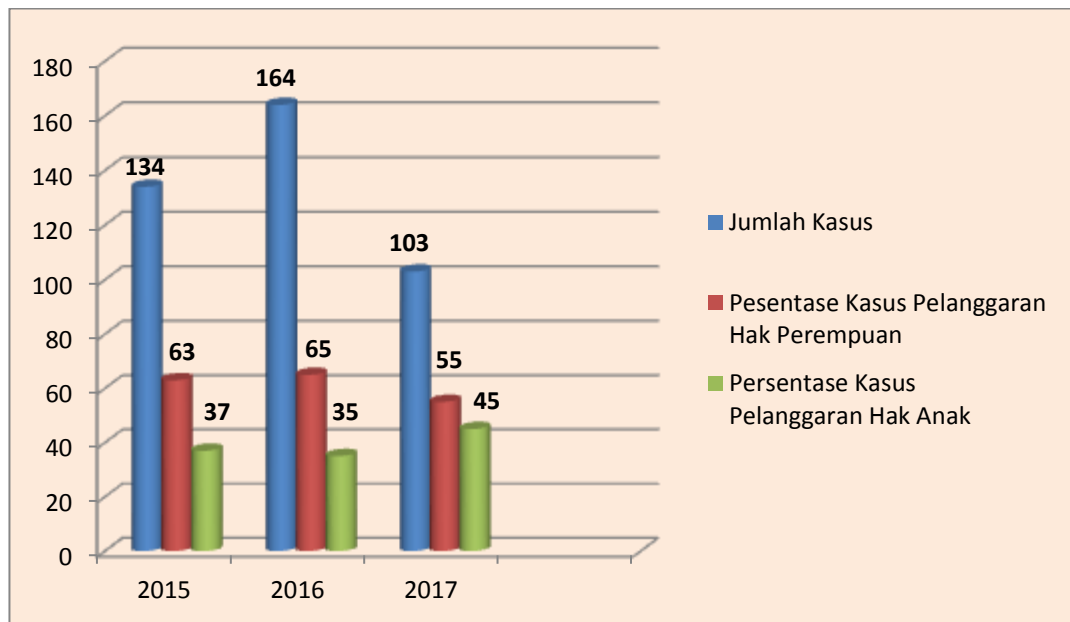
Uraian	2015	2016	2017
Kasus pelanggaran hak anak	50 kasus	57 kasus	46 kasus
Kasus pelanggaran hak perempuan	84 kasus	107 kasus	57 kasus
<b>Total</b>	<b>134 kasus</b>	<b>164 kasus</b>	<b>103 kasus</b>

Sumber Data: Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



. Berdasarkan tabel di atas jika dibandingkan dengan tahun 2016 kasus pelanggaran hak perempuan dan anak pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 61 kasus, dimana kasus pelanggaran hak perempuan menurun sebanyak 11 kasus dan kasus pelanggaran hak anak menurun sebanyak 50 kasus.

**Grafik 4.25**  
**Perkembangan Capaian Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Hak-hak Perempuan dan Anak tahun 2015– 2017**



Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pelanggaran yang terjadi setiap tahun lebih banyak pelanggaran terhadap hak perempuan pada tahun 2017 pelanggaran Hak perempuan sebesar 55 % dan pelanggaran hak anak sebesar 45 % dari total 103 kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.

Beberapa dekade terakhir ini, kita dapat melihat kiprah kepemimpinan wanita dalam berbagai peran dan posisi strategis dalam kehidupan masyarakat. Kiprah kepemimpinan wanita tersebut menunjukkan bahwa wanita Indonesia memang merupakan sumber daya yang potensial apabila kualitasnya ditingkatkan dan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, pemerintah berupaya melakukan kegiatan pembangunan. Upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Untuk mencapai sasaran di atas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Persentase perempuan yang menduduki jabatan publik.

Capaian kinerja kebijakan “Bone Bolango Cemerlang” melalui strategi pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkiprah sesuai dengan kemampuannya serta memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan publik merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja.

Pada Tahun 2017 ditargetkan persentase perempuan yang menduduki jabatan publik adalah 20,34% atau sebanyak 518 pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari total pegawai perempuan yang berjumlah 2545 orang, namun yang terealisasi sebesar 11,94% atau 291 pegawai perempuan dengan persentase kinerja sebesar 58,7% dengan kategori **Rendah**.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran indikator kinerja persentase perempuan yang menduduki jabatan public, capaian kinerja tahun 2017 masih lebih tinggi tingkat pencapaian yaitu sebesar 11,94% dari capaian tahun 2016 sebesar 10,19%.. Jika dibandingkan dengan komposisi pegawai Bone Bolango, pegawai perempuan mencapai 64,84% dari total pegawai di Kabupaten Bolango. Jika dilihat dari total jabatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017 berjumlah 637 jabatan dan yang diduduki oleh perempuan sebesar 47,72%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





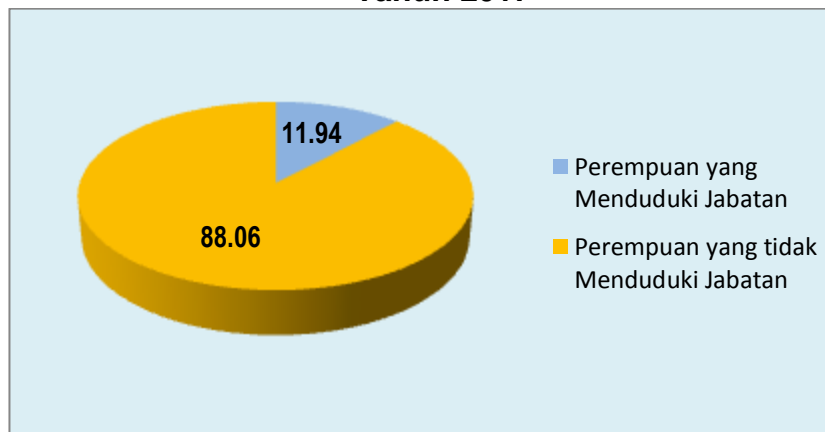


**Tabel 4.34**  
**ASN yang menduduki jabatan berdasarkan jenis kelamin**

No	Esselon	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2A	1	-	1
2	2B	25	5	30
3	3A	40	14	54
4	3B	69	33	102
5	4A	180	221	401
6	4B	18	31	49
7	Staf	1.047	2.2241	3.288
<b>TOTAL</b>		<b>1.380</b>	<b>2.545</b>	<b>3925</b>

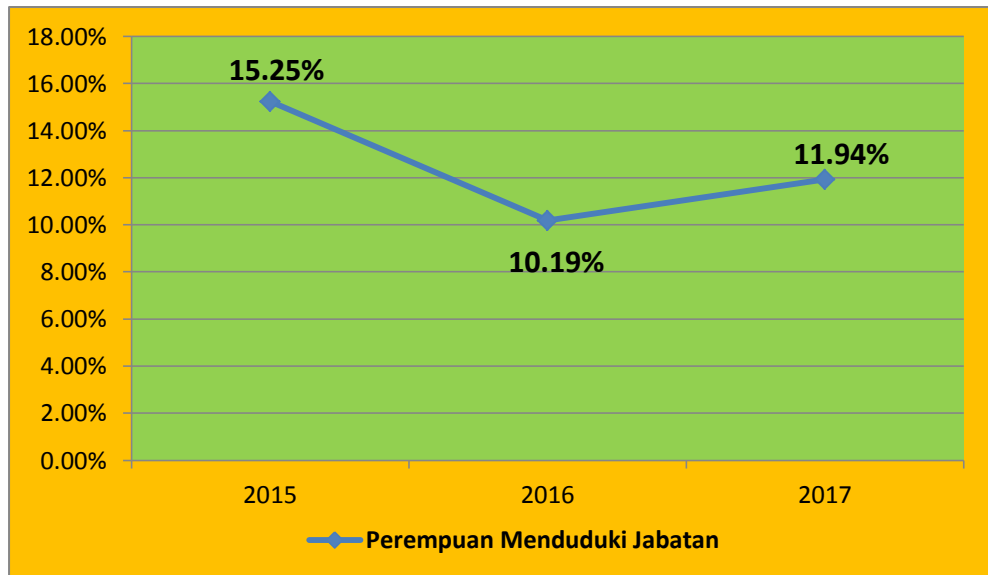
Sumber Data: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

**Gambar 4.1.**  
**Diagram Persentase Perempuan yang menduduki Jabatan Tahun 2017**





**Grafik 4.26**  
**Persentase Capaian Perempuan Menduduki Jabatan**  
**Tahun 2015-2017**



- **Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian sasaran :**  
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017 telah memberdayakan dan meningkatkan kompetensi para perempuan yang menduduki jabatan publik di jajaran birokrasi pemerintah daerah melalui pendidikan, kemampuan kepemimpinan, baik pelatihan formal maupun non formal guna mendukung kinerjanya sebagai pemegang jabatan publik. Pemerintah juga memberi kesempatan buat ASN perempuan Bone Bolango untuk bersaing menduduki jabatan publik melalui "*job bidding*" tanpa ada unsur diskriminasi.

Faktor penyebab keberhasilan lainnya adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bekerjasama dengan PKK dan Dharma Wanita Kabupaten Bone Bolango, sering melakukan agenda rutin organisasi yakni kegiatan pelatihan bagi anggotanya baik pelatihan keterampilan maupun pelatihan kepemimpinan.

### **c. Permasalahan dan solusi**

#### **Permasalahan**

Adapun permasalahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :



- Belum optimalnya koordinasi penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan pihak terkait
- Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan masyarakat termasuk perempuan yang mempengaruhi ketahanan masyarakat
- Belum optimalnya penjaminan terhadap terpenuhinya hak-hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi sesuai amanat UU Nomor 23/2001 yang ditandai dengan masih terdapatnya anak-anak yang menjadi pengemis di jalan, anak-anak pengasong pada malam hari

### **Solusi**

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah

- Melaksanakan *Training of Trainers* (TOT) perencanaan yang berwawasan gender bagi aparat perencanaan pada seluruh SKPD.
- Mengalokasikan bantuan modal usaha kepada perempuan dan melakukan pelatihan keterampilan terhadap kaum perempuan.
- Mengoperasikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- Mendorong semua SKPD untuk mulai melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender dibawah pengendalian sekretaris SKPD sebagai *Vocal point gender* dimasing-masing SKPD

## **3. Urusan Pangan**

### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

Untuk urusan wajib Pangan pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Pangan dengan alokasi anggaran APBD tahun 2017



sebesar Rp. 2.801.157.100 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.725.905.415 atau 97,31%.

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan  
(Pertanian/Perkebunan)

- Penanganan daerah rawan pangan
  - Penanganan rawan pangan pada desa
- Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
  - Penyusunan dokumen neraca bahan makanan (1dokumen)
- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
  - Pemberdayaan kelompok KRPL Flamboyan
  - Pemberdayaan kelompok KRPL oginawa
  - Pemberdayaan kelompok KRPL cendrawasi
  - Pemberdayaan kelompok KRPL bougenvile
  - Pemberdayaan kelompok KRPL cahaya bolu
  - Pemberdayaan kelompok KRPL teratai 2
  - Pemberdayaan kelompok KRPL wigati
  - Pemberdayaan kelompok KRPL lestari jaya
  - Pemberdayaan kelompok KRPL huyula 2
  - Pemberdayaan kelompok KRPL buhuta
- Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
  - Pendampingan Kelompok KRPL (10 Kelompok)
- Pengembangan desa mandiri pangan
  - Pengembangan desa mandiri olele
  - Pengembangan desa mandiri desa oluhata
  - Pengembangan desa mandiri bulontalangi timur
  - Pengembangan desa mandiri ilomata
  - Pengembangan desa mandiri kopi
- Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
  - Penyusunan Dokumen Usaha pemanfaatan usaha dan distribusi cadangan pangan



- Pengembangan sistem informasi pasar
    - Penyusunan dokumen harga komoditas bahan pangan masyarakat
  - Peningkatan mutu dan keamanan pangan
    - Sosialisasi keamanan pangan (180 orang)
- 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi/Pertanian
- Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
    - Pelaksanaan Lomba cipta menu
    - Pelaksanaan Pameran daerah
    - Pencanangan one day no rice
    - Peringatan hari pangan sedunia

#### **b. Capaian Kinerja**

Pada tahun 2017 urusan wajib pangan bertujuan untuk menurunkan rumah tangga rawan pangan dimana berhasil menurunkan sebanyak 230 rumah tangga dari target 303 rumah tangga dimana rumah tangga tersebut telah mencapai taraf swasembada pangan.

Pada tahun 2017 disusun 1 dokumen neraca bahan makanan, dibentuknya 10 kelompok rumah pangan lestari sebai usaha swasembada pangan di tingkat kelompok keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah.

5 (lima) desa mandiri pangan dicetuskan pada 2017 sebagai hasil dari program peningkatan ketahanan pangan.

#### **c. Permasalahan dan solusi**

##### **Permasalahan**

Penetapan target yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan sumber daya sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai.

##### **Solusi**

Dilakukan perubahan target dengan memperhitungkan Sumberdaya yang dimiliki.



#### 4. Urusan Pertanahan

##### a. Kinerja Program dan kegiatan

Pada tahun 2017 Urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp. 2.945.146.655 dengan realisasi Rp. 2.279.445.607 atau sebesar 77,40 %

- 1) Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
  - Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah
  - Pembebasan lahan (92.917 m<sup>2</sup>)

##### b. Capaian Kinerja

Adapun yang menjadi capaian kinerja outcome adalah

- Tersosialisasinya hukum dan peraturan perundangan tentang pertanahan
- Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan

##### c. Permasalahan dan solusi

###### Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang pertanahan utamanya adalah terkait belum optimalnya pembinaan masyarakat tentang peraturan pertanahan terutama menyangkut hak milik dan pengelolaan tanah

###### Solusi

Pada awalnya upaya sosialisasi dan negosiasi yang dilakukan pemerintah berjalan lancar, namun seringkali pada saat pelaksanaan pekerjaan tetap mendapat penolakan dari sebagian masyarakat dengan alasan pembayaran lahan tidak sesuai keinginan mereka, sehingga menyebabkan pemerintah melakukan tindakan pengalihan lokasi alternatif pembangunan jalan ke lokasi yang lain. Ini menyebabkan perubahan target lokasi pelaksanaan pembangunan jalan.



## 5. Urusan Lingkungan Hidup

### a. Kinerja Program dan kegiatan

Program dan kegiatan pada tahun 2017 terdiri dari 5 Program dan 19 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penatan ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian :

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah
    - Pengadaan tong sampah 3R (194 Unit)
    - Pengadaan tong sampah terpilah 2 (52 Unit)
    - Mesin Pencacah Plastik (1 Unit)
    - Tempat pengomposan Sederhana (70 Unit)
  - Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
    - Pemeliharaan Kendaraan Operasional
  - Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
  - Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan
  - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Perbinaan Kesampahan
    - Pembinaan Kelompok Persampahan
  - Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan (Lanjutan)
- 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - Penataan RTH
    - Pembangunan RTH Kec. Bone Pantai
    - Pembangunan Trotoar Di Arah MAN Cendekia, dari Pertanian dan dari Arah Helumo Ke Center Point dan Pembangunan Center Point
    - Penataan Kawasan Pemerintahan (Inspektorat, DPKAD)
    - Pembangunan Pagar Jalan Masuk Alun-alun (Capil dan Perizinan)



- Pembangunan RTH Bone Raya
  - Pembangunan RTH Ipot Tapa
  - Pembangunan RTH Perbatasan Kabupaten (Bone)
  - Pembangunan Median Jalan (Suwawa, Tapa)
  - Penataan Jalan Masuk Pendopo Bupati
  - Pembangunan Tugu Adipura
  - Pembangunan Tugu Kebangsaan
  - Pembangunan RTH Rumah sakit Tombulilato
  - Pembangunan RTH Edukasi
  - Penataan RTH (Lanjutan)
    - Pembangunan Alun-alun Kawasan Pemerintahan (Lanjutan)
    - Penataan Kawasan Pemerintahan (Inspektorat, DPPKAD, dan Pemdes) (Lanjutan)
  - Pemeliharaan RTH
    - Pemeliharaan RTH Kecamatan (10 Unit)
- 3) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
  - Pelaksanaan Sosialisasi Adipura dan Adiwiyata
  - Pemantauan Kualitas Lingkungan
    - Pengujian kualitas air dan udara
  - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
    - Sosialisasi Izin Lingkungan
- 4) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA
    - Penanaman Pohn (730 Pohon)
- 5) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
- Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
- Kegiatan-kegiatan itu didukung oleh anggaran sebesar Rp.11.035.821.225,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan





program dan kegiatan sebesar Rp.10.778.187.684,- atau 97,67 %

**b. Capaian Kinerja.**

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut :

**Tabel 4.35  
KINERJA LINGKUNGAN HIDUP**

Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan					
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
Peningkatan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Buatan yang dibangun	titik	120	10	6	60

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone Bolango



Untuk terciptanya penataan ruang yang memiliki Daya tampung dan daya dukung lingkungan menggunakan indikator kinerja peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) buatan

yang dibangun dengan target tahun 2017 adalah 10 titik RTH terbangun. Dari hasil realisasi tahun 2017 setelah dilakukan pendataan bahwa terdapat 6 titik RTH yang terbangun di tahun 2017. Sehingga capaian kinerja tahun 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 60 % .

Pembangunan RTH dilaksanakan oleh 2 Organisasi Pemerintah daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. Pada Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango telah membangun 4 RTH yang berlokasi di





Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bone. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango telah membangun 2 RTH yaitu RTH Rumah Sakit Tombulilato dan RTH Edukasi. Selain membangun RTH Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pemeliharaan terhadap 10 lokasi RTH yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

Dari realisasi yang diperoleh tahun 2017 sebanyak 6 titik RTH, ditambahkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2016 30 titik, maka total RTH yang dibuat sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 37 titik.



Mengapa ruang terbuka hijau buatan ini merupakan indikator sangat penting dalam rangka pencapaian sasaran 10 Terciptanya Penataan Ruang yang Memiliki Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan. Secara definitife, Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau budidaya pertanian. Selain itu untuk meningkatkan kualitas atmosfir, menunjang kelestarian air dan tanah. RTH di tengah-tengah kota juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.

Kegunaan dari RTH adalah diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olahraga dan komunikasi publik. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 % dari luas wilayah. Ruang terbuka hijau yang dibuat di Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 telah memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Ini dibuktikan dengan semakin banyak masyarakat berkunjung dan memanfaatkan RTH ini sebagai tempat interaksi sosial, taman bermain dan sebagai tempat foto-foto selfie. RTH yang paling banyak dikunjungi saat ini di Kabupaten Bone Bolango adalah Center Point. Pada umumnya pengunjung Center Point adalah remaja yang ingin foto selfie atau sekedar duduk santai dan menjadi tempat pertemuan para kawula muda. Yang menarik pada RTH Center



Point ini adalah gapura Center Point yang berupa gerbang yang ditiru dari bangunan terkenal di Paris yaitu bangunan Arch de Triomphe (Gerbang Kemenangan), sehingga menjadi lokasi favorit bagi kawula muda di Bone Bolango maupun se Provinsi Gorontalo bahkan dari luar Provinsi Gorontalo untuk melakukan pengambilan gambar.

**Tabel 4.36**  
**Perkembangan capaian kinerja**  
**Peningkatan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Buatan**  
**yang dibangun selang Tahun 2014-2016**

No	Capaian Kinerja	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Buatan yang dibangun	14	4	12	6

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup

### c. Permasalahan dan solusi

#### Permasalahan

- Pembebasan lahan masyarakat merupakan masalah yang utama bagi lahan yang bukan lahan pemerintah.
- Masih Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau

#### Solusi

- Solusinya adalah negosiasi dengan masyarakat dan pembayaran tanah harus dilakukan tahun sebelum pelaksanaan pekerjaan. Dengan kata lain pemerintah harus memastikan bahwa tanah yang akan dibangun Ruang Terbuka Hijau telah menjadi milik pemerintah.
- Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau

## 6. Urusan Administasi Kependudukan dan Catatan Sipil

### a. Kinerja Program dan kegiatan

Untuk tahun 2017, pada urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat anggaran sebesar Rp.4.671.986.100,-



dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.4.528.005.771,- atau 96,92 %.

Berikut rincian program dan kegiatan selama tahun 2017

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
  - Pembangunan Dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
    - Pembangunan SIAK
  - Pemeliharaan Aplikasi SIAK
  - Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)
  - Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
  - Pembuatan dokumen laporan kependudukan
    - Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
    - Pelaksanaan Pelayanan Mobile
      - Pelayanan Mobile (17 Kecamatan)
    - Sosialisasi kebijakan kependudukan
    - Pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran penduduk
    - Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

#### b. Capaian Kinerja

Pada tahun 2017 mendekatkan pelayanan masyarakat menjadi prioritas, dengan dilakukannya pelayanan mobile untuk mengejar kepemilikan KTP 100 %. Dinas kependudukan dan catatan sipil selaku pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan modal 1 program dan 6 kegiatan berhasil menaikkan persentase kepemilikan KTP elektronik dari 89,42 % menjadi 95,34 %

**Tabel 4.37**  
**Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2016	Capaian Kinerja 2017
1.	Kepemilikan KTP	89,42 %	95,34 %

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah baik di daerah maupun ditingkat pusat. Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2016 adalah 159.673 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 80.444 jiwa dan penduduk perempuan 79.222 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016 sebesar 80 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bulango Selatan, yaitu 1.098 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Pinogu yaitu 6 jiwa per km<sup>2</sup>. pada tahun 2017 KTP yang dicetak sebanyak 108.573 jiwa untuk kartu keluarga sebanyak 48.018 KK

### **c. Permasalahan dan solusi**

#### **Permasalahan :**

- a) Belum optimalnya pembinaan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil sebagai pencerminan warga negara;
- b) Belum optimalnya pembinaan sumber daya manusia sebagai pelaksana untuk mewujudkan keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

#### **Solusi :**

- a) Melakukan pembinaan masyarakat dalam bentuk sosialisasi melalui program dan kegiatan kependudukan ditingkat kecamatan sampai ke desa
- b). Mengikutsertakan aparatur dinas kependudukan dan catatan Sipil untuk mengikuti bimbingan teknis atau diklat.

### **7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa**

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk kabupaten bone bolango pada tahun 2017 berhasil melakukan pelaksanaan sosialisasi lembaga pemberdayaan masyarakat, selain itu pelaksanaan lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat kabupaten



yang bertujuan untuk menemukan inovasi baru dari desa dalam pelaksanaan kelembagaan dan kemasyarakatan desa.

Pada tahun 2017 pula dilakukan lomba desa dan dusun heroik yang bertujuan meningkatkan rasa nasionalisme pada masyarakat.

#### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

Untuk tahun 2017, pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat anggaran sebesar Rp.5.106.255.200,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.4.966.681.345,- atau 97,27 %.

Adapun program dan kegiatan pada tahun 2017 adalah :

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  - Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
    - Terlaksananya sosialisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
  - Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat
    - Penyusunan Modul Kurikulum Komite Standar Pelayanan (1 Dokumen)
  - Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa
    - Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten
    - Tersusunnya Laporan Sisten Informasi Posyandu
    - Tersusunnya Data Profil Desa
- 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
  - Pelatihan Keterampilan manajemen badan usaha milik desa
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
  - Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)



- Pencanaan BBGRM
- Pelaksanaan Lomba Kebersihan Lingkung RTM
- Lomba gotong royong masyarakat tingkat desa se kabupaten
- Kegiatan HKG PKK
- Pengembangan kawasan perdesaan
- Lomba desa/kelurahan
  - Lomba desa/kelurahan
  - Lomba dusun heroik
  - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
    - Kegiatan Bimtek SISKEUDES
    - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen keuangan desa
    - Sosialisai awal masa jabatan kepala desa
  - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
    - Monitoring Perencanaan dan pengelolaan Keuangan desa
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  - Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
- 6) Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
  - Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
    - Rapat koordinasi dan evaluasi Pemerintah desa

**b. Capaian Kinerja**

Untuk tahun 2017 yang menjadi sasaran strategis adalah terwujudnya kemandirian desa.



Tabel 4.38

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Terwujudnya kemandirian desa					
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
Berkurangnya $\Sigma$ desa tertinggal	Desa	100	80 desa ST/T	95 desa ST/T	81,25%
Jumlah Desa Maju	Desa	33,3	8	1	12,5%
<b>Rerata Capaian Kinerja</b>					<b>46,87</b>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk pencapaian sasaran strategis terwujudnya kemandirian desa menggunakan indikator kinerja berkurangnya jumlah desa tertinggal serta indikator jumlah desa maju. Dari hasil realisasi tahun 2016 dengan menggunakan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo, ternyata jumlah desa tertinggal dan desa maju di Kabupaten Bone Bolango tidak mengalami perubahan berdasarkan data di tahun 2015 yaitu jumlah desa sangat tertinggal/ tertinggal tetap sebanyak 105 desa dan desa maju sebanyak 1 desa. Sehingga capaian kinerja tahun 2017 tidak mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja hanya 46,87% dengan kategori capaian rendah. Pada tahun 2017 desa maju masih tetap sama seperti tahun sebelumnya karena pihak kementerian belum mengeluarkan status desa. Karena dalam prediksi ada kenaikan walaupun dalam kenyataan masih sama seperti tahun sebelumnya tetapi karena ada peningkatan target sehingga terjadi penurunan pencapaian kinerja. Capaian kinerja untuk





berkurangnya desa tertinggal hanya mencapai 81,25% dan desa maju sebesar 12,5%.

Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo, maka status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun Provinsi Gorontalo Tahun 2016, digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.39**  
**Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun**  
**Provinsi Gorontalo Tahun 2016**

No.	Status Desa	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	TOTAL
1	Desa Mandiri	0	0	0	0	0	0
2	Desa Maju	2	2	7	3	2	14
3	Desa Berkembang	51	82	52	62	26	265
4	Desa Tertinggal	26	100	41	88	87	349
5	Desa Sangat Tertinggal	3	7	1	7	8	29
Jumlah Total		<b>82</b>	<b>191</b>	<b>101</b>	<b>160</b>	<b>123</b>	<b>657</b>
IDM Provinsi Gorontalo		<b>0.6062</b>	<b>0.5906</b>	<b>0.6088</b>	<b>0.5740</b>	<b>0.5695</b>	<b>0.5898</b>

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa untuk Kabupaten Bone Bolango, persentase status desa yang dominan adalah jumlah desa tertinggal sebanyak 59%, tertinggi ke-2 setelah Kabupaten Gorontalo Utara.

Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019), yakni mengurangi jumlah Desa



Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan *lokus* (Desa) dan status perkembangannya. Indeks Desa Membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap Desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN 2015 –2019 dan koordinasi K/L dalam pembangunan Desa.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2016 mulai menggalakkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Namun hingga saat ini, dari 165 desa yang ada di Bone Bolango baru sekitar 40% yang terbentuk. Disamping itu, untuk menciptakan pemberdayaan dan kemandirian desa, Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD setiap tahunnya mengalami kenaikan, disamping Dana Desa dari APBN yang alokasinya rata-rata mencapai 1 Milyar per-desa.

### **c. Permasalahan dan solusi**

#### **Permasalahan**

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa untuk Kabupaten Bone Bolango, persentase status desa yang dominan adalah jumlah desa tertinggal sebanyak 59%, tertinggi ke-2 setelah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi pergeseran nilai atau skor dari 3 dimensi IDM yaitu sosial, ekonomi dan budaya. Untuk dimensi sosial untuk indikator akses terhadap pendidikan dasar, memang disadari masih banyak sekolah yang memiliki akses fisik > 3 Km, misalnya sekolah-sekolah yang berada di desa-desa terpencil di Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bonepantai, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Raya dan Kecamatan Bone yang kondisi desanya berada di pegunungan. Demikian pula untuk variable kesehatan, disamping indikator waktu tempuh pelayanan



kesehatan yang masih jauh, juga kondisi ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lainnya yang masih terbatas.

### **Solusi**

Untuk meningkatkan skor nilai Indeks Desa Membangun (IDM) khususnya di desa sangat tertinggal dan tertinggal, diperlukan support anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan yang diharapkan mampu memperpendek rentang kendali pelayanan dan akses masyarakat kefasilitas pendidikan dan kesehatan. Disamping itu, perlu di kembangkan juga program ADD Afirmatif yang diperuntukkan buat desa-desa terpencil yang masih berstatus sangat tertinggal dan tertinggal.

## **8. Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana**

### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

Tahun 2017 dengan anggaran Rp. 6.695.894.900,- dan realisasi Rp. 6.472.841.525,- urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dilakukan oleh Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

#### **1) Program Keluarga Berencana**

- Pembinaan Keluarga Berencana
- Penyusunan dokumen laporan Kegiatan Pelayanan KB
- Sosialisasi Tribina (BKB, BKR, BKL)
- Pengadaan sarana mobilitas Tim KB keliling
  - Pengadaan Sarana kerja PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ) 165 orang
  - Pengadaan Motor PLKB (15 Unit)
  - Pengadaan Mobil Jemput akseptor
  - Pengadaan Smartphone (8 Unit)
- Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)
  - Pembiayaan Operasional Balai Penyuluh KB (18 Kecamatan)
  - Kontribusi Alat Kontrasepsi (20 Titik)
- Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Lanjutan 2016)



- Pembangunan Pagar Balai Penyuluh KB (5 %)
- Rehab Balai Penyuluh Kecamatan Bone Raya
- 2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
  - Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
    - Sosialisasi dan Pembentukan kampung KB (18 Kecamatan)
- 3) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
  - Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
    - Sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja
    - Sosialisasi Program Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan Keluarga
    - Advokasi dan KIE melalui Pemutaran film (18 kecamatan)
    - Upacara Puncak Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi Gorontalo

#### b. Capaian Kinerja

**Tabel 4.40**  
**JUMLAH PESERTA/ AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA**  
**MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	PESERTA KB PEREMPUAN						PESERTA KB LAKI-LAKI			TOTAL
		MOW	IUD	IMP	STK	PIL	JLH	MOW	KDM	JLH	
1	SUWAWA	115	106	351	524	654	1750	48	2	48	3596
2	SUWAWA TENGAH	29	274	271	128	180	882	4	40	44	1862
3	SUWAWA TIMUR	27	250	206	254	149	886	-	89	89	1950
4	PINOJU	6	60	298	149	101	614	-	10	10	1248
5	SUWAWA SELATAN	9	10	251	212	250	732	2	3	5	1474
6	KABILA	134	266	703	1362	236	2701	42	285	327	6096
7	TILONGKABILA	120	185	934	720	669	2628	13	4	17	5290
8	TAPA	55	568	224	221	258	1326	9	32	41	2734
9	BULANGO UTARA	41	400	278	264	146	1129	2	21	23	2304
10	BULANGO ULU	-	151	207	100	71	529	2	18	20	1098
11	BULANGO TIMUR	22	375	123	172	77	769	2	25	27	1592
12	BULANGO SELATAN	65	860	227	296	104	1552	4	12	16	3136
13	BOTUPINGGE	17	90	219	360	196	882	30	44	74	1912
14	KABILA BONE	15	182	651	263	188	1299	6	103	109	2816
15	BONE PANTAI	15	185	563	323	203	1289	10	178	188	2954
16	BULAWA	6	151	260	167	138	722	-	13	13	1470
17	BONE RAYA	19	117	303	380	245	1064	2	99	101	2330
18	BONE	30	61	481	530	344	1446	-	5	5	2902
	JUMLAH	725	4291	6550	6425	4209	22200	174	983	1157	46714



Sampai dengan tahun 2017 jumlah peserta KB implant merupakan jumlah terbesar dalam kepesertaan KB perempuan. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin maka jumlah akseptor KB dari jenis kelamin perempuan masih mendominasi. Hal ini terjadi karena lebih banyaknya pilihan dalam KB perempuan dibandingkan KB laki-laki.

Untuk Peserta laki-laki, KB Kondom merupakan jenis yang diminati hal ini ditunjukkan dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan MOP.

Secara keseluruhan, jumlah akseptor KB Kabupaten Bone Bolango adalah sebanyak 46.714 yang terdiri dari 22.200 peserta perempuan dan 1.157 peserta laki-laki.

### **c. Permasalahan dan solusi**

#### **Permasalahan**

Adapun permasalahan bidang keluarga berencana adalah :

- Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat terutama remaja tentang arti pentingnya pemeliharaan kesehatan alat reproduksi dan pencegahan penyakit menular seksual serta upaya pencegahan dari yang diakibatkan karena pergaulan bebas
- Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program keluarga berencana akibat keterbatasan pilihan kontrasepsi dan terbatasnya jumlah tenaga medis dalam inovasi pelayanan kontrasepsi.

#### **Solusi**

Adapun solusi atas permasalahan diatas adalah

- Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat secara terus menerus tentang reproduksi dan segala hal yang menyangkut tentang program keluarga berencana serta perilaku sehat yang dimulai dari SD sampai perguruan tinggi
- Meningkatkan kualitas perencanaan urusan keluarga berencana secara matang dan terarah setiap tahunnya.



- Mengoptimalkan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) di seluruh kecamatan, yang berfungsi untuk mensosialisasikan upaya-upaya pencegahan kerusakan alat reproduksi dan bahaya penyakit menular seksual kepada remaja.

## 9. Urusan Perhubungan

### a. Kinerja Program Kegiatan dan Capaian Kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
  - Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - Pengadaan Bus
- 3) Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
  - Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Untuk tahun 2017, untuk urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terdapat anggaran sebesar Rp.7.011.225.100,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.6.882.801.538,- atau 98,17 %. Pada tahun 2017 diadakan 3 unit kendaraan bus sekolah untuk siswa sekolah di kabupaten bone bolango. Selain itu pengadaan rambu-rambu lalu lintas untuk keamanan berlalu lintas menjadi hasil dari kegiatan pada urusan wajib perhubungan. Selain itu pendisiplinan operasi angkutan umum di jalan raya juga dilakukan pada tahun 2017.

### b. Permasalahan dan solusi

#### Permasalahan

- Belum optimalnya pembinaan pengemudi kendaraan bermotor di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sehingga tingkat kecelakaan lalu-lintas relatif masih tinggi.



- Belum optimalnya Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan yang dilaksanakan masih belum mencukupi.
- Belum optimalnya pembinaan aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sektor perhubungan
- Belum tersediaanya terminal yang menjadi simpul transportasi antar wilayah serta balai uji kendaraan yang masih tergantung di Kota Gorontalo

### **Solusi**

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah dengan meningkatkan Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut Keselamatan dan Pengawasan Angkutan di jalan terutama Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan secara lebih luas. Sedangkan untuk penyediaan sarana terminal dan balai uji kendaraan telah dilakukan upaya koordinasi dan penyiapan dokumen teknis untuk pembangunan balai uji dan penyediaan lahan terminal.

## **10. Urusan Komunikasi dan Informasi**

### **a. Kinerja Program dan Kegiatan**

Untuk tahun 2017, untuk urusan Komunikasi dan Informatika dengan pelaksana urusan Dinas komunikasi dan Informasi serta Sekretaris Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp.7.011.225.100,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.6.882.801.538,- atau 98,17 %.

Adapun Rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut

#### **1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
  - Pemasangan WMS Suwawa (11 Titik)
  - Pemasangan WMS Kabila (6 Titik)
  - Pemasangan WMS Tapa (9 Titik)



- Pemasangan WMS Tilongkabila (7 Titik)
  - Pemasangan WMS Kabila Bone (3 Titik)
  - Pemasangan WMS Bulango Selatan (7 Titik)
  - Pemasangan WMS Suwawa Tengah (1 Titik)
- 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan komunikasi
- Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
  - Penyusunan masterplan e-Goverment
- 3) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
  - Pelaksanaan Pelatihan komunikasi dan informasi
- 4) Program kerjasama informasi dengan mas media
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik

#### **b. Capaian Kinerja**

Adapun capaian kinerja outcome yang dihasilkan adalah:

- Meningkatnya pengelolaan informasi yang berkualitas serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat

#### **c. Permasalahan dan solusi**

##### **Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan Urusan komunikasi dan informatika adalah :

- Belum optimalnya pelayanan informasi bagi masyarakat dalam menerima informasi bidang pembangunan terutama di desa-desa yang tidak dapat dijangkau dengan media informasi
- Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur informasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan pelayanan





perkembangan ekonomi pasar, status sosial serta informasi penanganannya.

- Belum optimalnya perencanaan SDM berlatar belakang komunikasi dan informatika yang diharapkan dapat mengelola sarana dan prasarana informasi daerah khususnya pengelolaan media center sebagai pusat informasi daerah.

### **Solusi**

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan bidang komunikasi dan informatika adalah:

- Meningkatkan pelayanan informasi pada masyarakat dengan membangun sarana dan prasarana infrastruktur jaringan dan software yang dijadikan sumber informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika sehingga kemudahan, kecepatan dalam pelayanan dapat dijamin keberlanjutannya serta kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat tetap terjaga

## **11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

Dengan anggaran Rp.1.004.075.000,- dan realisasi Rp.900.845.962,- atau sebesar 89,72% dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan program dan kegiatan sebagai berikut.

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
  - Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha-usaha kecil menengah
    - Pendataan badan usaha kecil menengah
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
  - Sosialisasi terhadap kelompok UMKM



- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
    - Sosialisasi sertifikat Hak atas tanah
  - Pelatihan manajemen pengelolaan kopeasi/KUD
    - Pelatihan anggota koperasi
  - Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  - Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah
    - Sewa Galeri Bandara
  - Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
    - Penyelenggaraan Pameran Produk
- 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
  - Pembinaan, Pengawasan, Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
    - Pelaksanaan Hari koperasi nasional
    - Pemberian Penghargaan (6 Koperasi)
  - Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
    - Sosialisasi temu usaha
    - Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
    - Bimbingan teknis pengelolaan keuangan koperasi

#### **b. Capaian Kinerja**

Indikator koperasi aktif yaitu bertambahnya komposisi koperasi aktif dari total koperasi atau semakin berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif dari total koperasi. Sebuah koperasi



dikatakan sebagai koperasi aktif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kantor koperasi
- 2) Kegiatan koperasi masih berjalan

Organisasi koperasi masih lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tiga pedoman koperasi yang dikenal dengan tiga sehat adalah meliputi bentuk sehat pada usaha, dalam organisasi serta mental. 3 macam pedoman yang menyangkut kesehatan sebuah koperasi yaitu sebagai berikut :

Pedoman Organisasi sehat dalam koperasi akan mencakup hal-hal berikut ini :

- Segala macam bentuk kegiatan koperasi atau aktivitas koperasi akan dijalankan sesuai kesadaran dan peran masing-masing anggotanya
- Kesadaran koperasi untuk hidup dan berkembang atas dasar anggaran dasar yang dimiliki koperasi
- Tugas dari ketiga alat pelengkap organisasi dapat berjalan dengan baik
- Bagian-bagian yang ada di dalam organisasi mampu bekerja secara normal dalam hubungan organik
- Komunikasi yang terjalin antara pengurus dan anggota, pengurus ke pengurus lain, serta anggota satu dengan anggota lainnya terjalin dengan baik dan lancar dalam memberikan informasi

Usaha koperasi dikatakan sehat jika memenuhi beberapa faktor pedoman berikut ini:

- Aktivitas usahanya berjalan didasarkan atas asas serta tujuan koperasi tersebut dibentuk
- Jalannya usaha berlangsung terus menerus atau secara kontinu
- Pembagian SHU sesuai dengan jasa-jasa dari peran anggotanya



• Tingkat efisiensi yang dicapai sesuai dengan rencana  
Mental koperasi dibidang sehat apabila pedoman faktor dibawah ini mampu dipenuhi :

- Anggota maupun pengurus memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap koperasi
- Pengurus maupun anggota koperasi tidak semata-mata memikirkan hal-hal materialistis saja atau yang berupa benda saja, akan tetapi juga harus memperhatikan kegiatan bentuk nilai sosial dan kemanusiaan yang bisa diutamakan
- Aktivitas pengurus maupun aktivitas anggotanya haruslah adil dan jujur
- Kesejahteraan anggota baik itu secara spirituil maupun materiil menjadi fokus utama koperasi
- Adanya aktivitas maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat
- Koperasi wajib memiliki swadaya, swakerta dan juga swasembada
- Keuntungan yang tidak berdasarkan prinsip koperasi wajib diabaikan atau ditiadakan

Pada tahun 2017 Indikator Presentase Koperasi Sehat di targetkan 39,29% (22 Koperasi Sehat dari 56 Koperasi Aktif) dengan realisasi 30,48 (25 Koperasi Sehat dari 82 Koperasi Aktif) dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 77,59% dengan kriteria **Tinggi**.

Walaupun capaian kinerja tahun 2017 turun dari capaian kinerja tahun 2016 disebabkan koperasi aktif tahun 2017 bertambah dari tahun 2016 sebanyak 56 koperasi menjadi 82 koperasi pada tahun 2017.



**Tabel 4.41**  
**Indikator Koperasi Tahun 2014 – 2017**

NO	INDIKATOR KOPERASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
1	Jumlah Seluruh Koperasi	121	123	135	139
2	Jumlah Koperasi Aktif	57	67	76	82
3	Jumlah Koperasi Sehat	21	26	25	25
4	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	56	56	56	56
5	Jumlah Koperasi Baru	0	4	5	3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

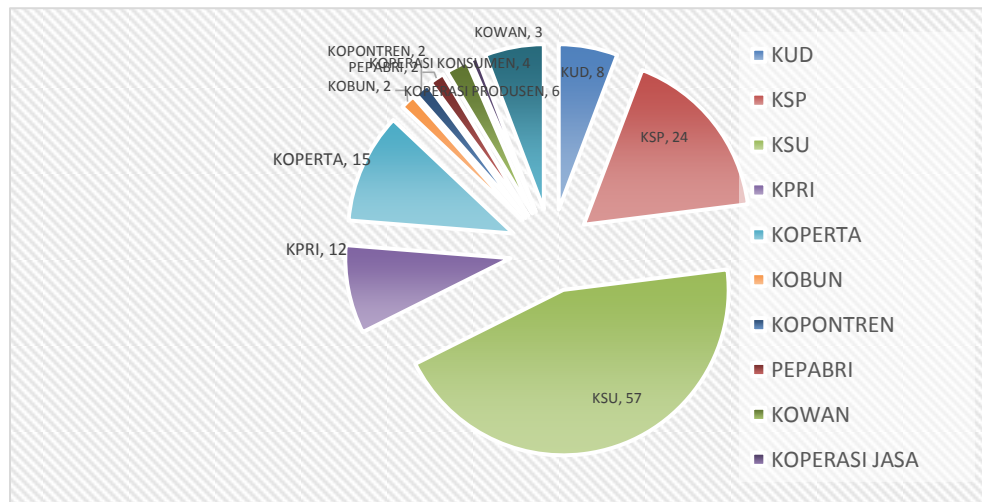
**Tabel 4.42**  
**KONDISI KOPERASI DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 – 2017**

No.	JENIS KOPERASI	JUMLAH KOPERASI		
		2015	2016	2017
1	Koperasi Unit desa (KUD)	8	8	8
2	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	24	24	24
3	Koperasi Serba Usaha (KSU)	51	57	62
4	Koperasi Pegawai republik Indonesia (KPRI)	12	12	12
5	Koperasi Tani (KOPERTA)	15	15	15
6	Koperasi Perkebunan (KOBUN)	2	2	2
7	Koperasi Pesantren (KOPONTREN)	2	2	2
8	Koperasi PEPABRI	2	2	2
9	Koperasi Produsen	2	6	-
10	Koperasi Konsumen	2	4	-
11	Koperasi Wanita (KOPWAN)	3	3	3
12	Koperasi Jasa	-	-	1
13	Koperasi Nelayan	-	-	8
	<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>135</b>	<b>139</b>

Sumber Data : Dinas Perindag Kop dan UMKM



**Gambar 4.2**  
**JENIS KOPERASI di KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017**



Indikator Prosentase pertumbuhan UMKM mengindikasikan meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah setiap tahun yang memiliki kelembagaan yang berkualitas dan memiliki keunggulan kompetitif. Dengan kualitas seperti itu UMKM diharapkan mampu memperluas basis ekonomi kerakyatan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktur yaitu :

- 1) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk mengatasi pengangguran
- 2) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat untuk mengatasi kemiskinan.

Disamping itu UMKM memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak, karena UMKM merupakan cerminan pelaku ekonomi dalam jumlah besar dan menyebar diseluruh pelosok wilayah hingga ke pedesaan di Kabupaten Bone Bolango. Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki aktifitas yang sangat luas, meliputi hampir seluruh jenis lapangan usaha dan menjadi sumber kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat kecil (sektor pertanian, peternakan perikanan, perkebunan, perdagangan industri dan lainnya).



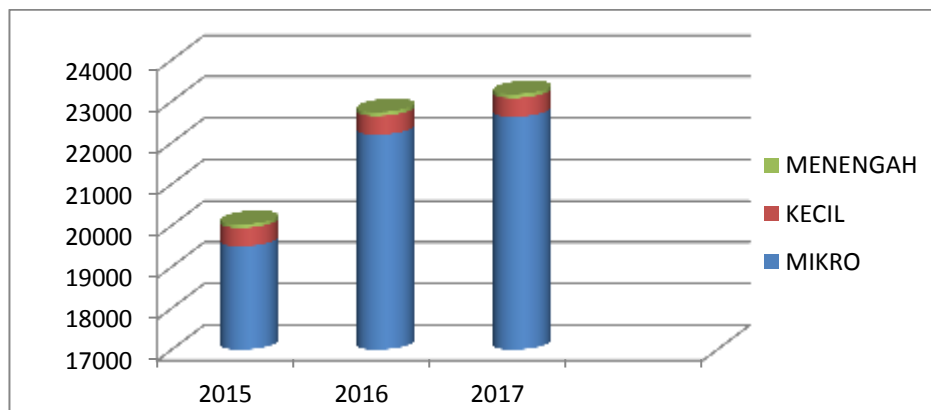
Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan UMKM di bone bolango mengalami peningkatan, dari yang ditargetkan hanyaa 0,7% tetapi bisa terealisasi sampai dengan 0,77% atau sebanyak 147 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 110% dengan kriteria **Sangat Tinggi**

**Tabel 4.43**  
**Perkembangan UMKM Kab. Bone Bolango Tahun 2015-2017**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Usaha Mikro	19,499	22,195	22,265
2	Usaha Kecil	444	451	454
3	Usaha Menengah	88	92	93
	<b>JUMLAH</b>	<b>20,031</b>	<b>22,738</b>	<b>22,812</b>

**Grafik 4.27**

**Perkembangan UMKM Kab. Bone Bolango Tahun 2015-2017**



### c. Permasalahan dan solusi

#### Permasalahan

Belum optimalnya manajemen pengendalian koperasi untuk mencegah tingginya angka pertumbuhan Koperasi dan tidak dibarengi dengan persentase jumlah Koperasi yang tidak meningkat.

Pada sektor UMK, perkembangan sektor ini cenderung menurun karena keterbatasan intervensi pemerintah yang terkendala dengan regulasi hibah dan bansos.



## **Solusi**

Meningkatkan upaya pembinaan bagi SDM perkoperasian terutama pengelola koperasi dalam bentuk diklat teknis perkoperasian sehingga pengelola dapat memajemen koperasi secara proporsional dan profesional sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi.

Pengembangan sektor UMK didorong melalui peningkatan intervensi program melalui APBDes, serta juga melakukan solusi lain melalui kredit ultra mikro yang bekerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah.

## **12. Urusan Penanaman Modal**

### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

Untuk tahun 2017, pada urusan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Dinas penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja terdapat anggaran sebesar Rp.3.877.852.800,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.3.799.472.663,- atau 97,98 %, yang dialokasikan untuk pelaksanaan program:

untuk urusan Penanaman Modal melaksanakan

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Pengembangan potensi unggulan daerah
  - Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
  - Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Penyelenggaraan Pameran Investasi
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - Pengembangan sistem informasi dan penanaman modal
  - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal





## b. Capaian Kinerja

Kewenangan pemerintah kabupaten pada urusan penanaman modal mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas promosi investasi dan kerjasama investasi, baik PMA maupun PMDN dan menciptakan dan meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing global melalui promosi peluang-peluang investasi yang dapat dilakukan di kabupaten Bone Bolango maupun di Luar Negeri.

Sasaran Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan indicator persentase peningkatan nilai investasi PMA dan PMDN adalah meningkatkan minat investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta investasi Daerah di Kabupaten Bone Bolango serta Peningkatan realisasi nilai investasi PMA dan PMDN serta Investasi Daerah.

### - Investasi PMDN

Dari evaluasi realisasi investasi PMA ditahun 2017 sebesar 631.239.923.044 dengan target Rp. 96.713.781.000 atau dengan capaian target 652% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

### - Investasi PMDN

**Tabel 4.44**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2017**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah nilai Investasi PMA, PMDN	Rp. 64.475.854.000	Rp. 631.239.923.044	Rp. 631.239.923.044
			Rp. 625.305.345.142	Rp.613.315.022.491	Rp. 657.959.522.491
<b>Total Nilai Investasi PMA, PMDN</b>			<b>Rp.689.781.199.142</b>	<b>Rp.1.244.554.945.535</b>	<b>Rp.1.289.199.445.535</b>



### **c. Permasalahan dan solusi**

#### **Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan bidang penanaman modal adalah:

- Belum optimalnya koordinasi dalam penanganan pengurusan perizinan antar sektor atau OPD.
- Belum optimalnya publikasi data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ditawarkan.
- Belum sinerginya pelaksanaan promosi daerah baik antar instansi terkait di daerah maupun di Pusat dalam upaya penyebar luasan informasi potensi dan peluang investasi

#### **Solusi**

Adapun solusi yang dilakukan untuk memecahkan masalah diatas adalah:

- Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan terpadu untuk peningkatan kualitas dan kecepatan layanan.
- Meningkatkan pelayanan dengan mensosialisasikan serta melaksanakan proses perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Pelayanan masing-masing jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Meningkatkan kualitas SDM petugas pelayanan melalui peningkatan kompetensi dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai diklat, orientasi pelaksanaan tugas ke beberapa daerah, penyediaan pakaian khusus, dan peningkatan kesejahteraan

### **13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

#### **a. Kinerja Program dan Kegiatan**

Untuk tahun 2017, urusan Kepemudaan dan Olahraga oleh dinas Pemuda dan olahraga mengelola anggaran sebesar



Rp.7.548.706.500,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.7.457.462.398,- atau 98,79 %.

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
  - Pembinaan Organisasi Kepemudaan
  - Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
  - Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
  - Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
- 2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
  - Pelatihan keterampilan bagi pemuda
- 3) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
  - Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
- 4) Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga
  - Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
  - Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah
  - Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi
  - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
  - Permasalahan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
  - Pengembangan olahraga rekreasi
  - Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga
- 5) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
  - Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
  - Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga berupa GOR Boludawa dan 5 lapangan olahraga kecamatan.



## b. Capaian Kinerja

**Tabel 4.45**  
**Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Peningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga					
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
Persentase keikutsertaan organisas pemuda dalam kegiatan daerah	%	110,7	30	37	123,3
<b>Rerata Capaian Kinerja</b>					<b>123,3</b>

Dari pengukuran capaian kinerja atas keikutsertaan pemuda dalam kegiatan daerah pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, dimana target yang telah ditetapkan hanya sebesar 30% atau 15.605 pemuda yang dihitung dari total usia pemuda mulai dari 16 s/d 30tahun dengan total pemuda di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 52.018 (Range Data BPS 15-34 Tahun) ternyata melebihi target sampai 37% atau 18.402 pemuda dengan capaian 123,3% sehingga masuk dalam criteria **Sangat Tinggi**.



Dalam rangka peningkatan kualitas pemuda di kabupaten Bone Bolango maka pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Keterlibatan pemuda bone bolango dapat dilihat dari kegiatan pemuda yang dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini



**Tabel 4.46**  
**Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Daerah Tahun 2017**

No	Uraian Kegiatan	Jumlah s/d Tahun 2016	Tahun 2017	Total
1	Kemah Bhakti Pemuda	180	108	288
2	Seleksi Paskibraka	100	190	290
3	Seleksi JPI	36	36	72
4	Wirausaha Pemuda	20	20	40
5	Gerak Jalan	1.275	1.340	2.615
6	Pembibitan Atlit Berbakat	60	75	135
7	Kejurnas Olah Raga	14	14	28
8	Pekan Olah Raga Provinsi	90	200	290
9	Tournament Sepak Bola	-	300	300
10	Tournamet Volly Ball	300	120	420
11	Olahraga Tradisional	40	20	60
12	Tournament Bulutangkis	159	150	309
<b>TOTAL</b>				<b>18.402</b>

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga



Dalam rangka peningkatan kualitas diri, selain sebagai seorang individu maupun tim yang bisa berkiprah diajang perlombaan dan pertandingan, pemuda Bone Bolango juga aktif di organisasi kepemudaan. Pemerintah berusaha memberikan fasilitas kepada pemuda yang mau aktif di organisasi. Ada beberapa organisasi kepemudaan yang ada di kabupaten bone bolango, seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

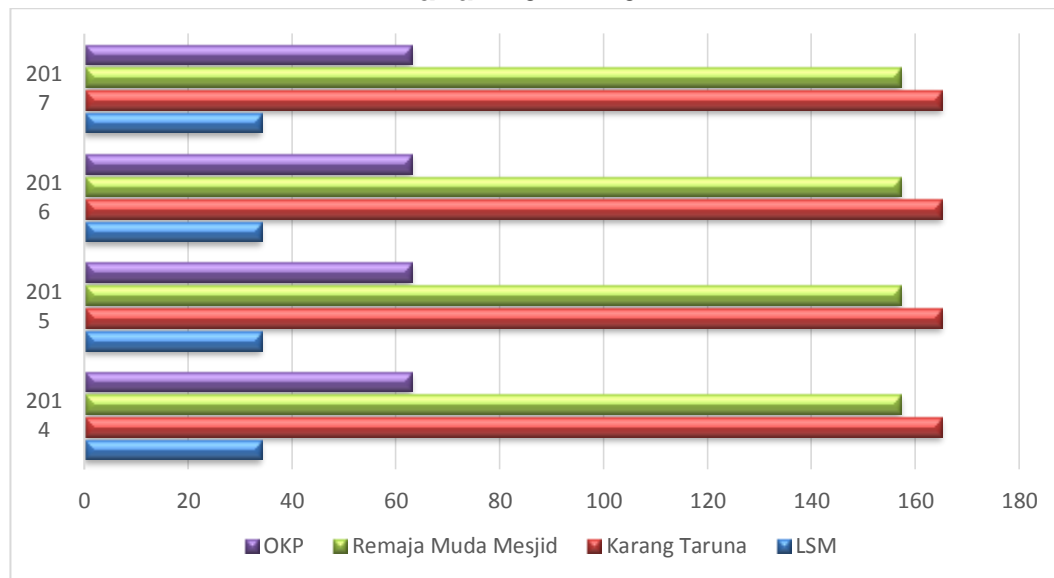


**Tabel 4.47**  
**Organisasi Kepemudaan Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2014-2017**

No	Organisasi Kepemudaan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Lembaga Swadaya Masyarakat	34	34	34	34
2	Karang Taruna	165	165	165	165
3	Remaja Muda Mesjid	157	157	157	157
4	OKP	62	63	63	63
TOTAL		418	419	419	419

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga

**Grafik 4.28**  
**Lembaga Organisasi Kepemudaan Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2014 - 2017**





**Tabel 4.48**  
**Keikutsertaan Pemuda Dalam Kegiatan Daerah**  
**Tahun 2017**

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Kemah Bakti	108
2	Seleksi Paskibraka	190
3	Seleksi JPI	36
4	Wirausaha	20
5	Kejuaraan Pencak Silat	190
6	Kejuaraan Tenis Meja	20
7	Pekan Olahraga Tkt provinsi	200
8	Gerak Jalan	1.340
9	Turnamen bulutangkis	100
10	Turnamen volly	120
11	Olahraga tradisional	20

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga

### c. Permasalahan dan solusi

#### Permasalahan

Disadari bahwa capaian Indikator kinerja persentase atas keikutsertaan pemuda dalam kegiatan daerah mencapai 123,3% atau kategori sangat tinggi, namun masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk pengembangan kelembagaan pemuda dan olahraga, diantaranya:

1. Masih kurangnya pemahaman para pemuda akan manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
2. Masih kurangnya jumlah pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing perilaku kewirausahaan.
3. Lemahnya kemampuan, etos kerja dan profesionalisme.
4. Kabupaten Bone Bolango masih mengalami kekurangan tenaga pelatih dan keterbatasan fasilitas olahraga.



5. Peran swasta masih terbatas sekali dalam mendukung olahraga dan pengembangan kegiatan pemuda di daerah

### **Solusi**

1. Mengembangkan bakat dan minat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing dan unggul melalui pelatihan dan pemberian modal usaha.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya generasi muda yang berkualitas, sehat, mandiri dan berprestasi;
3. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kehidupan berorganisasi melalui pelatihan kepemimpinan.
4. Memberikan pendidikan dan latihan pada para pelatih serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana olahraga yang representative sampai dengan di desa.

## **14. Urusan Statistik**

### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- Penyusunan Dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
- Penyusunan Dokumen Kabupaten Dalam Angka (1 dokumen)
- Penyusunan Dokumen Kecamatan Dalam Angka(1 dokumen)
- Penyusunan Dan Pengumpulan Data PDRB
  - Tersusunnya Dokumen PDRB(1 dokumen)
  - Penyusunan Dokumen PDRB(1 dokumen)

Untuk tahun 2017, untuk urusan Statistik oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan terdapat anggaran sebesar Rp.15.175.000,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.15.156.020,- atau 99,87 %.

### **b. Capaian Kinerja**

Adapun capaian kinerja bidang statistik yang dihasilkan adalah

- 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dikarenakan data statistik yang akurat dan terpercaya





Publikasi program nda kegiatan lebih akuntabel, cepat, tepat, terarah dan terpadu

### c. Permasalahan dan solusi

#### Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang statistik adalah Belum optimalnya publikasi data disebabkan pengolahan data statistik yang masih terkesan lambat

#### Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan bidang statistik adalah :

Optimalisasi publikasi data melalui kerja sama dengan BPS baik data makro aupun data mikro yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah

## 15. Urusan Kebudayaan

### a. Kinerja Program dan kegiatan

Pada tahun 2017 hanya ada dua Program dan dua kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretaris Daerah selaku pelaksana urusan ini yaitu :

- 1). Program pengembangan nilai budaya
  - Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- 2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Untuk urusan Kebudayaan terdapat anggaran sebesar Rp.351.968.000,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.317.580.000,- atau 90,23 %.

### b. Capaian Kinerja

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kebudayaan adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara budaya daerah sebagai wujud sikap dan perilaku masyarakat yang berbudaya
- b. Terpeliharanya budaya daerah sebagai perwujudan bangsa yang berbhineka tunggal ika dimana diantara berbagai suku



bangsa, kebudayaan bone bolango merupakan salah satu suku bangsa yang kaya akan adat dan budaya daerah.

- c. Meningkatnya rasa persatuan dan solidaritas antar masyarakat dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga terhindar dari tindakan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

### **c. Permasalahan dan solusi**

#### **Permasalahan**

Permasalahan utama pada urusan kebudayaan di Kabupaten Bone Bolango antara lain:

- 1) Belum optimalnya pembinaan budaya daerah sehingga dalam situasi dan kondisi tertentu masih mengedepankan sifat kedaerahan yang sering memicu konflik antar suku, adat dan budaya
- 2) Belum optimalnya organisasi budaya daerah dalam mengembangkan adat budaya daerah sehingga adat budaya daerah dapat dikenal di tingkat nasional maupun internasional

#### **Solusi**

Berkenaan dengan permasalahan diatas, beberapa solusi :

1. Membentuk wadah atau forum budaya yang membahas tentang perkembangan budaya daerah kabupaten bone bolango sehingga budaya daerah tetap lestari dan terjaga nilai-nilainya
2. Memfasilitasi organisasi masyarakat yang bergerak dibidang pengembangan budaya sehingga budaya dapat berkembang serta mampu memfilter adat atau budaya asing yang tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan budaya masyarakat daerah.

## **16. Urusan Perpustakaan**

### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

Untuk tahun 2017, untuk urusan Perpustakaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat anggaran



sebesar Rp.2.133.168.800,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.2.056.091.466,- atau 96,39 %.

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
- Pengembangan Minat dan Budaya Baca
- Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
- Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
- Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

**b. Capaian Kinerja**

Adapun capaian kinerja outcom bidang perputakaan adalah

- 1) Meningkatnya budaya baca dikalangan masyarakat alam meningkatkan pemahaman masyarakat melalui media-media non elektonik
- 2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pustaka dalam meberikan layanan informasi di segala bidang

**c. Permasalahan dan solusi**

**Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan bidang perustakaan adalah

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana perustakan dalam enjangkau kebutuhan informasi sampai ke pelosok-peosok desa
- b) Terbatasnya petugas atau pustakawan dalam memberikan layanan pustaka kepada masyarakat

**Solusi**

Adapun solusi atas permasalahan diatas adalah sebagai berikut :



- a) Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan desa yang diharapkan dapat menjangkau kebutuhan informasi sampai di desa yang sulit dijangkau
- b) Mengikutsertakan aparatur dalam bimbingan teknis, diklat atau sosialisasi tentang manajemen perpustakaan desa
- c) Meningkatkan jumlah buku-buku perpustakaan yang dijadikan bahan bacaan dan literatur bagi kalangan masyarakat, peneliti dan pihak lain yang terlibat langsung dengan pencarian informasi

## **17. Urusan Kearsipan**

### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

Untuk tahun 2017, untuk urusan Kearsipan dengan pelaksana Dinas Perpustakaan dan kearsipan terdapat anggaran sebesar Rp.204.955.000,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.204.708.680,- atau 99,88 %.

- 1) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
  - Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
  - Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
- 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
  - Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
  - Penyediaan sarana layanan informasi arsip

### **b. Capaian Kinerja**

Adapun capaian kinerja outcome yang telah dicapai adalah

1. Meningkatnya pengelolaan dan arsip daerah sebagai dokumen daerah yang menggambarkan proses kinerja daerah setiap tahunnya

### **c. Permasalahan dan solusi**

#### **Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam kearsipan adalah



- a) Belum optimalnya pembinaan aparatur dalam merencanakan, mengelola serta mendokumentasikan peristiwa pembangunan daerah
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan dalam mendukung proses pengarsipan dokumen daerah yang profesional

### **Solusi**

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah

- a) Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam mengelola arsip daerah
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dalam mendukung proses pengarsipan dokumen daerah sehingga terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam

### **Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan**

#### **1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

##### **a. Kinerja Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
  - Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
  - Pengadaan Pakan benih
  - Pendampingan Pembudidaya
  - Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
- 2) Program pengembangan perikanan tangkap
  - Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
  - Penguatan Kapasitas Pelaku Usaha
  - Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
  - Pengadaan Sarana prasarana Bantuan berupa katinting 5PK 32 unit, rumpon 4 unit, dan motor box 4 unit.
  - Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap (DAK Lanjutan)
- 3) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
  - Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar



- Pengadaan Bibit Udang
- Pembangunan kawasan budidaya Vaname

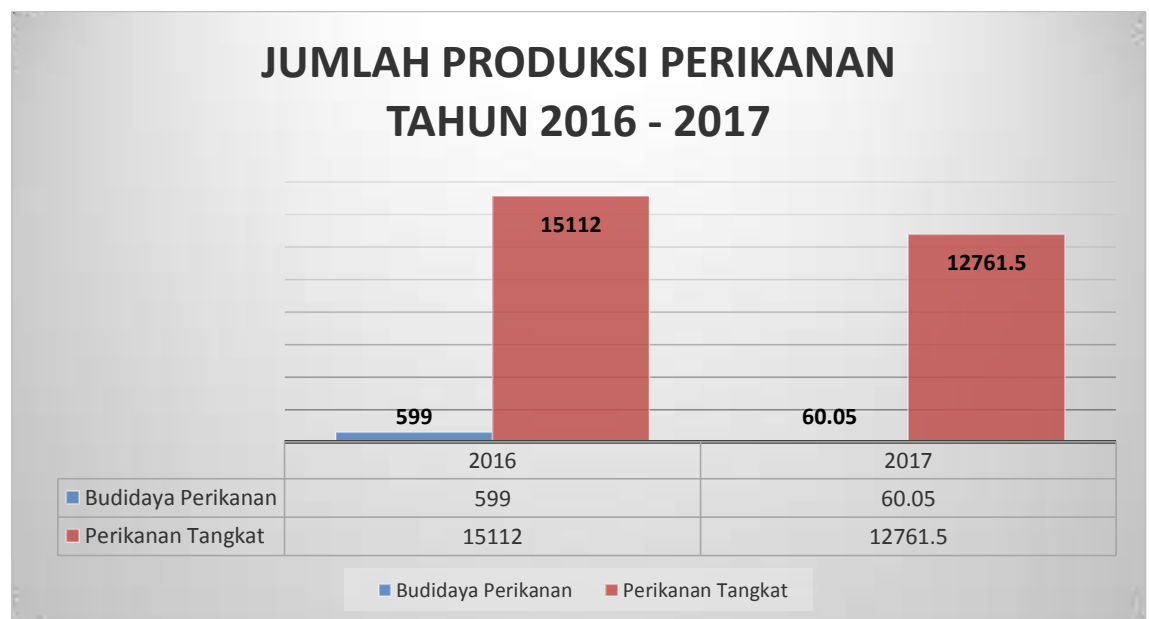
Untuk tahun 2017, urusan Kelautan dan Perikanan dengan pelaksana urusan Dinas Kelautan terdapat anggaran sebesar Rp.4.839.657.864,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.4.251.617.835 atau 87,85 %.

#### b. Capaian Kinerja

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- Meningkatnya produksi perikanan juga dapat meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri sebagai indikator kinerja dan bagian penting untuk ketahanan pangan, terutama sebagai sumber protein.
- Dalam pencapaian target peningkatan produksi perikanan mengalami penurunan. Target yang telah ditetapkan sebesar 15.136,8 ton hanya dicapai sebesar 12.911,35 ton.

Grafik 4.29



Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Bolango



Penurunan persentase jumlah produksi dari target yang telah ditetapkan, cukup signifikan. Selain faktor alam yang mempengaruhi hasil produksi

Selain faktor alam yang mempengaruhi hasil produksi, Beberapa faktor eksternal lainnya yang turut mempengaruhi rendahnya data produksi adalah pendataan yang kurang akurat, sebab tidak ada lagi petugas statistik perikanan, sehingga sumber data produksi hanya berasal dari data TPI Inengo dan cold storage milik pemerintah.

### **c. Permasalahan dan solusi**

#### **Permasalahan**

- Bantuan sarana dan prasarana banyak yang tidak dapat didistribusikan karena terbitnya aturan Permendagri no 14, tahun 2016.pasal 7 (point G), “bahwa setiap penerima bantuan wajib berbadan hukum.
- Perikanan budidaya realisasi produksi relative sedikit, salah satu yang mempengaruhi karena masyarakat penerima bantuan yang berusaha hanya pada saat menerima bantuan saja dan tidak berkelanjutan.Dengan kata lain, jika ada bantuan maka ada produksi.

#### **Solusi**

- Merubah mainset masyarakat dengan sosialisasi ataupun pelatihan dalam pengembangan budidaya perikanan dalam peningkatan produksi perikanan yang hanya mengharapkan bantuan dari Pemerintah sehingga budidaya perikanan berkelanjutan tanpa bantuan Pemerintah.
- Membina kelompok nelayan dari nelayan pemula memiliki badan hukum

## **2. Urusan Pariwisata**

### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  - Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata



- Promosi di media cetak dan elektronik
  - Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri
    - Event festival unggulan Bone Bolango
    - Event festival kalender event
    - Event festival wisata bahari
    - Event festival Tur d' pinogu
    - Pameran Apkasi
    - Event festival kemilau sulawesi
    - Gebyar Ketupat
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
    - Pengadaan Jet bike
    - Pengadaan Banana boat
    - Pengadaan Air mancur danau perintis
    - Pengadaan Bendi air
    - Pembangunan Masjid Lombongo
    - Pembangunan Kamar Bilas Botutonuo
    - Pedestrian di Botutonuo
    - Pebangunan Restoran Danau Perintis
- 3) Program Pengembangan Kemitraan
- Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
    - Lomba fotografi
  - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
    - Sosialisasi kelompok sadar wisata
    - Pelatihan pembuatan souvenir

Untuk tahun 2017, pada urusan Pariwisata dengan pelaksana Dinas Pariwisata dan Ekonomoi Kreatif terdapat anggaran sebesar Rp.7.274.582.775,- dengan realisasi keuangan





pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.6.973.176.634,- atau 95,86 %.

#### b. Capaian Kinerja

Sektor pariwisata merupakan sektor yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan dari sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang berarti dan terus tumbuh, Jumlah kunjungan wisata merupakan indikator penting atas tumbuhnya sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan atau penurunan dari kunjungan wisatawan dipengaruhi baik oleh faktor internal berupa kondisi destinasi wisata. Pada tahun 2017 terjadi Peningkatan kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan pada tahun 2017 mencapai 136.762 kunjungan wisatawan. Lebih jelasnya tentang peningkatan kunjungan wisata sampai Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.49**  
**PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATA**  
**DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

Indikator Kinerja Utama	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ket
jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bone Bolango	1208	13.206	23.878	26.078	45.688	136.762	NAIK

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango

Peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Bone Bolango disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- Pengelolaan obyek wisata yang mulai ditangani secara





profesional

- Kabupaten bone bolango mulai aktif mengikuti event promosi pariwisata tingkat nasional dan internasional
- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- Pendataan atas jumlah kunjungan mulai menunjukkan perbaikan
- Pelestarian dan Pengembangan adat budaya mulai maksimal
- Mulai terjadi pergeseran budaya/kebiasaan masyarakat yang dahulu waktu liburan diisi dengan istirahat di rumah, saat ini menghabiskan waktu liburan di tempat-tempat wisata dan hiburan. Dan hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengunjung wisata membludak yang tentunya diikuti dengan pertumbuhan sejumlah pusat perbelanjaan yang otomatis terjadi perputaran ekonomi yang cepat.

### **c. Permasalahan dan solusi**

#### **Permasalahan**

Disamping keberhasilan yang dicapai di bidang pariwisata yang ditandai dengan peningkatan kunjungan wisata masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu di perbaiki seperti :

- Promosi tentang wisata Bone Bolango yang masih kurang
- Minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat dalam menjaga kelestarian dan kelangsungan sebuah objek wisata.

#### **Solusi**

- Promosi berbagai destinasi wisata harus lebih ditingkatkan disertai dengan pembenahan obyek wisata dan peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan wisata
- Menyampaikan secara bijak kepada pengunjung akan pentingnya menjaga kebersihan dilingkungan objek wisata
- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata



- Sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan BUMN serta akademis diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif yang pada gilirannya mampu menumbuhkan ekonomi nasional.
- Pengembangan budaya terus dilakukan melalui pelestarian budaya tari-tarian yang dilakukan oleh dinas pariwisata juga dispora sebagai dinas yang membina bakat pemuda serta dinas Pendidikan dan kebudayaan yang melakukan Pendidikan sejak dini tentang pelestarian budaya pada siswa-siswa.
- Semangat dan kesadaran dari masyarakat akan sadar wisata terus ditingkatkan melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata di setiap desa yang memiliki obyek wisata dibawah binaan dinas pariwisata serta pelestarian budaya yang merupakan kolaborasi tanggungjawab dinas pariwisata, dinas pemuda dan olah raga, dinas pendidikan dan kebudayaan serta bagian kesra.

### **3. Urusan Pertanian**

#### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
  - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
  - Pengembangan pertanian pada lahan kering
  - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
  - Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
- 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna



- Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
  - Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
  - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)
- 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
  - Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
- 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
  - Pembibitan dan Perawatan Ternak
  - Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
- 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Untuk tahun 2017, pada urusan Pertanian dengan pelaksana dinas pangan dan dinas pertanian dan peternakan terdapat anggaran sebesar Rp. 35.811.530.900,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.35.149.823.818,- atau 98,15 %.

#### **b. Capaian Kinerja**



Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya. ditahun 2017 ditargetkan 104 dengan realisasi 105,38. Produksi pertanian padi di Kabupaten Bone Bolango terjadi penurunan hasil, dilihat dari tabel dibawah bahwa capaian kinerja atas realisasi pencapaian produksi padi dari kondisi tahun 2016 realisasi sebesar 5,2 ton dengan target 6,28 ton dengan capaian 82,8% sedangkan tahun 2017 dengan target sebesar 6,46 ton dengan realisasi 5,4 atau pencapai kinerja sebesar 83,59%.

Pada Produksi pertanian jagung di kabupaten Bone Bolango terjadi peningkatan produksi yang sangat besar dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja atas realisasi pencapaian produksi jagung dari kondisi capaian tahun 2016 sebesar 142,1% dengan target sebesar 3,44 ton dengan realisasi sebesar 4,89 ton. Sedangkan tahun 2017 produksi jagung dengan target 3,70 ton dan realisasi 4,48 ton atau pencapai kinerja sebesar 121% dengan kriteria.

**Tabel 4.50**

**Luas Panen, Produktivitas dan Produksi**

No	Komoditas	Luas Panen			Produktivitas			Produksi (Ton)			Ket
		2015	2016	2017	2015 (KU/HA)	2016 (KU/HA)	2017 (KU/HA)	2015	2016	2017	
1.	Jagung	2.801	10.021	12.698	14.430	49.074	56.925	5,15	4,89	4,48	Ubinan
2.	Padi	3.970	4.090	4.932	63,62	52,56	54,03	25.258	21.496	26.650	Gabah Kering Panen



Kawasan Utara-utara dari 3 provinsi yaitu Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah untuk berkonsentrasi menghasilkan 5-10 tahun mendatang satu juta ekor sapi. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang menjadi Ketua BKSU menyediakan wilayahnya untuk pengembangan sapi yakni seluas 1,250 hektare. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap mendapat dukungan pemerintah pusat agar akselerasi pencaangan 1 juta ekor sapi ini dapat terwujud lebih cepat\ dengan harapan pencaangan 1 juta ekor sapi ini mampu terwujud kurang dari 5 tahun dan mendapatkan dukungan penuh Pemerintah Pusat untuk mendukung program ini. Dengan melihat impor sapi dari tahun ke tahun, pencaangan 1 juta ekor sapi ini dari empat kabupaten diprediksi mampu membuat swasembada daging sapi.

Untuk tahun 2017 pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengadakan 1.960 ekor sapi dengan sumber anggaran APBD Kabupaten bone Bolango. Berikut table populasi ternak di Kabupaten Bone Bolango.

**Tabel 4.51**  
**Populasi Ternak di Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2016 – 2017**

NO	TERNAK	TAHUN		KET
		2016	2017	
1	Sapi	31.718	35.974	
2	Kambing	7.321	7.321	
3	Kuda	268	268	
4	Babi	31	31	
<b>TOTAL</b>		<b>39.338</b>	<b>43.595</b>	

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa jumlah Populasi Ternak (khusus ternak sapi) di bone bolango sangat pesat, dengan kondisi awal RPJMD sebanyak 27.714 ekor pada tahun 2016 ditargetkan menjadi 30.368 ekor, sedangkan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 36.128 ekor dengan realisasi sebanyak 43.495 ekor.



**Grafik 4.30**  
**Populasi Ternak Sapi Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2014 – 2017**



### c. Permasalahan dan solusi

#### Permasalahan

Untuk tahun 2017 produksi padi meningkat dibandingkan tahun 2016 akan tetapi dalam target RPJMD belum tercapai, Penyebab menurunnya produksi padi di Bone Bolango adalah karena adanya kegiatan rehabilitasi saluran irigasi pada desa-desa sentra beras dan berkurangnya luas lahan tanam karena beralih fungsi dan pergeseran jadwal tanam yang disebabkan kekeringan.

#### Solusi

- Penanaman padi dilaksanakan secara serentak untuk menghindari hama penyakit.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak – pihak terkait berkaitan dengan ketersediaan air.
- Memastikan Ketersediaan obat – obatan dan koordinasi dengan petugas Hama di tingkat Kabupaten dan Provinsi.



#### 4. Urusan Energi

##### a. Kinerja Program dan kegiatan

- 1) Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
  - Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan berupa pembayaran rekening penerangan jalan umum di Kabupaten Bone Bolango.

Ditahun 2017 urusan Energi dengan pelaksana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan terdapat anggaran sebesar Rp.2.779.287.456,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.2.728.016.212,-atau 98,16 %.

##### b. Capaian Kinerja

Bahwa untuk melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia dan serta mahluk hidup lainnya, pengendalian galian C telah dilaksanakan secara tertib untuk mengurangi masyarakat yang merusak lingkungan. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kelistrikan dibutuhkan sumber daya listrik yang cukup memadai dengan dukungan beberapa pembangkit listrik yang sudah dioprasikan untuk menjangkau kebutuhan penerangan khususnya di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh aliran listrik PLN.

##### c. Permasalahan dan solusi

###### Permasalahan

- Masih minimnya pengetahuan penambang akan aturan dan teknik penambangan yang benar, sehingga secara kontinyu perlu dilakukan pengawasan dalam melakukan penambangan bahan galian C.
- Kurangnya peralatan dalam sistem yang berkaitan dengan kemampuan penyediaan daya untuk menghadapi beban

###### Solusi

- Pemantauan dan pengawasan kegiatan pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan.





- Pemeliharaan peralatan penunjang jaringan tenaga listrik yang sudah beroperasi.

## 5. Urusan Perdagangan

### a. Kinerja Program dan kegiatan

- 1) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
  - Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
  - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
  - Pengawasan LPG, Harga Bahan Pokok
  - Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah
  - Pelaksanaan tera ulang timbangan
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk
  - Rehab Pasar Taludaa
  - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (DAK)
  - Revitalisasi Pasar Mopuya Bone Raya, Bulango timur
- 3) Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
  - Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
  - Penertiban Pedagang Kaki lima

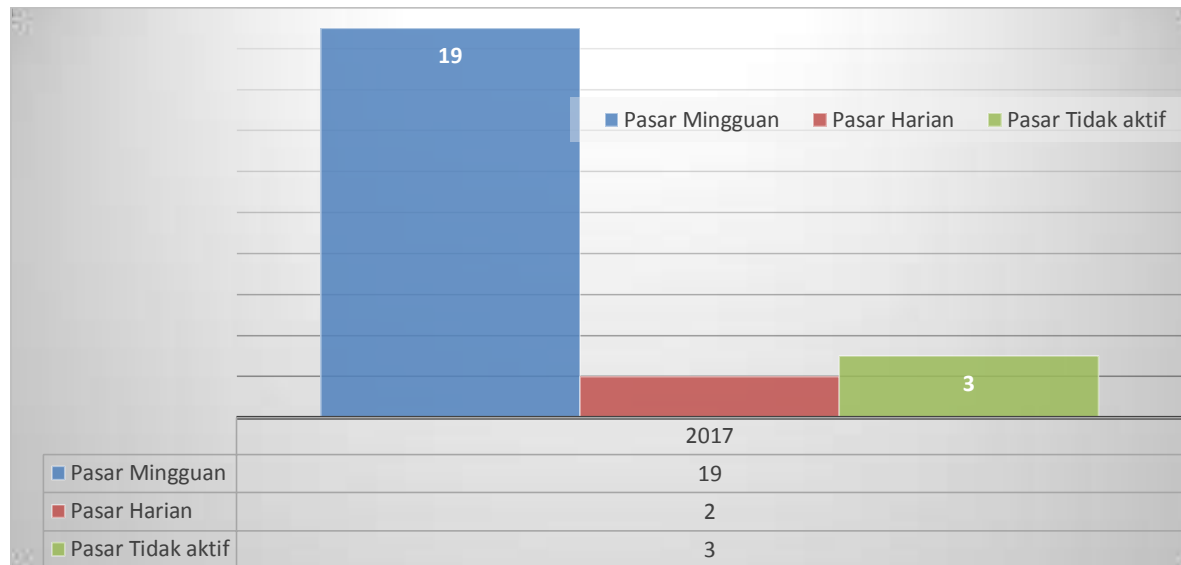
Untuk tahun 2017, pada urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdapat anggaran sebesar Rp.4.260.671.518,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.4.160.784.550,- atau 97,66%.

### b. Capaian Kinerja

Dalam pencapaian indikator RPJMD, pada tahun 2017 status pasar harian ditargetkan sebanyak 3 unit dengan realisasi 2 unit dengan capain kinerja sebesar 66,67%.



**Grafik 4.31**  
**Data Pasar Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017**



Pasar di Kabupaten yang berstatus harian yaitu Pasar Kamis Kecamatan Tapa. Pasar tersebut di bangun pada tahun 2017.

### c. Permasalahan dan solusi

#### Permasalahan

- Pedagang yang menjual dipasar harian berdomisili diluar Kabupaten Bone Bolango
- Budaya masyarakat pada siang hari tidak melakukan aktivitas maka berdampak pada perputaran ekonomi pasar.

#### Solusi

meningkatkan volume penjualan untuk produk pada pasar harian dan melakukan inovasi produk, mendapatkan pelanggan-pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan yang sudah ada menjadi pelanggan loyal.

## 6. Urusan Perindustrian

### a. Kinerja Program dan kegiatan

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
  - Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
  - Bimtek Pengembangan Industri aren
  - Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.



- Pembentukan Gugus Kendali Mutu
  - Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah
  - Pelaksanaan Penyuluhan
  - Revitalisasi/Pembangunan Sentra Industri Aren (DAK Lanjutan)
- 2) Program Penataan Struktur Industri
- Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
  - Penyusunan Dokumen Visibility
- 3) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
  - Pengembangan website Industri
  - Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM
  - Operasionalisasi sentra UPT aren
  - Pembangunan UPT dan revitaliasasi sentra IKM (DAK)

Untuk tahun 2017, urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdapat anggaran sebesar Rp.6.516.194.032,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.6.307.379.181,- atau 96,80 %.

#### **b. Capaian Kinerja**

Terlaksana fasilitasi bagi Industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya alam berupa gula aren untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya kualitas prodak industri ditahun 2017.

#### **c. Permasalahan dan solusi**

##### **Permasalahan**

- Kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana sehingga produk yang dihasilkan masih belum dapat bersaing



- Sarana dan prasarana perdagangan sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga perlu pengembangan di wilayah lainnya
- Globalisasi dan liberalisasi yang berpengaruh terhadap daya saing produk UMKM.
- Masih rendahnya kemampuan penyerapan permodalan dan skill kreativitas pelaku usaha.

### **Solusi**

- Meningkatkan daya saing produk UMKM melalui keunggulan kompetitif
- Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan/permodalan dan meningkatkan skill kreativitas pelaku usaha. an teknis atau diklat
- Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan/permodalan dan meningkatkan skill kreativitas pelaku usaha. an teknis atau diklat
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

## **Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang**

### **1. Urusan Administrasi Pemerintahan**

#### **a. Program dan kegiatan**

Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan bidang administrasi pemerintahan, pada tahun 2017 telah dianggarkan anggaran sebesar Rp. 304.251.235.589,99- dengan realisasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.295.228.682.212,- atau sebesar 97,06% yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah yaitu

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Bagian Ekonomi Pembangunan



5. Bagian Tata Pemerintahan
6. Bagian Tata Usaha Pimpinan
7. Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana
8. Bagian Pelayanan Pengadaan
9. Sekretariat DPRD

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tahun 2017 antara lain :

- Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah (Bidang Ekonomi)
- Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
- Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
- Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah (Bidang Pembangunan)
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- 2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Adapun kegiatan yang yang dilaksanakan antara lain :

- Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
- Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

- 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Untuk mendukung program maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :



- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
- 4) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  
Untuk mendukung program administrasi terpadu kecamatan maka kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
  - Peningkatan penyelenggaraan Administrasi terpadu kecamatan
  - Pelaksanaan Rakor Kecamatan
  - Pengadaan Perlengkapan Peralatan PATEN
- 5) Program Kerjasama Pembangunan
  - Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
- 6) Program Mengintensifkan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
  - Fasilitasi Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
  - Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
  - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
  - Rapat-Rapat Paripurna
  - Reses
  - Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah
  - Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
  - Pemberitaan di dua media cetak dan dua media elektronik
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
  - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan
  - Pelaksanaan kegiatan musrembang



- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya tingkat kecamatan
- Pelaksanaan kegiatan olahraga seni dan budaya
- Sosialisasi bahaya Narkoba dan Minuman Keras
- Sosialisasi pengendalian dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah
- Kegiatan sosialisasi perda hewan lepas
- Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan
  - Pelaksanaan Bimtek siskeudes
  - Pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan aparat desa
  - Monev Dana desa
  - Kegiatan sosialisasi tatacara penyusunan dokumen perencanaan desa
  - Sosialisasi Siskeudes, Penyusunan RPJMdes
  - Fasilitasi Tim evaluasi APBDes
  - Pelaksanaan administrasi kelurahan

#### b. Capaian Kinerja

Adapun capaian kinerja outcome yang dihasilkan serta manfaat dalam pelaksanaan program/kegiatan di bidang administrasi pemerintahan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.52**

#### **Partisipasi dan Tranparansi Dalam Pelayanan Publik**

<b>Meningkatnya Partisipasi dan Tranparansi dalam Pelayanan Publik</b>					
<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)</b>	<b>Tahun 2016</b>		<b>Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)</b>
			<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	%	103,3	<70 (15 Parameter)	73,5 (15 Parameter)	107,8



Salah satu fungsi aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana publik dalam rangka memenuhi hak – hak publik sebagai warga negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dalam latar belakang (bab 1) menyebutkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk dapat dilakukan perbaikan terhadap kualitas layanan pemerintah adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap unit-unit layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dari hasil penghitungan atas setiap indicator kinerja sasaran diatas, diperoleh hasil persentase rata - rata capaian kinerja sasaran Tahun 2017 sebesar 107,8% dengan target <70% dengan realisasi 73,5%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pada sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan **sangat tinggi**.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bone Bolango terhadap layanan pemerintah dan program pembangunan Bone Bolango merupakan akumulasi keseluruhan jenis layanan dan program pembangunan yang dilaksanakan. Setiap jenis layanan dan atau program pemerintah yang diukur IKM-nya dapat memberikan unsur atau indikator layanan yang berbeda antara satu jenis layanan / program dengan jenis layanan / program lainnya. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang akan disurvei yakni 15 bidang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hanya 5 parameter/bidang.





**Tabel 4.53**  
**Perbandingan Bidang yang Disurvei**  
**Tahun 2015, 2016 dan 2017**

No	Bidang Tahun 2015	Bidang Tahun 2016 dan 2017
1.	Pendidikan	Pendidikan
2.	Kesehatan	Kesehatan
3.	Infrastruktur jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum
4.	Penanganan Bencana Alam	Penanggulangan Bencana Alam
5.	Bantuan Bagi Petani/Nelayan	Program Bantuan Lainnya
6.		Kependudukan
7.		Tata Ruang
8.		Sosial
9.		Kelautan dan Perikanan
10.		Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
11.		Pemberdayaan Ekonomi
12.		Pariwisata
13.		Keluarga Berencana
14.		Perpustakaan
15.		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bone Bolango terhadap layanan pemerintah dan program pembangunan Bone Bolango merupakan akumulasi keseluruhan jenis layanan dan program pembangunan yang dilaksanakan.

**Tabel 4.54**  
**Nilai Kepuasan, Nilai Interval IKM, Kualitas Pelayanan dan Kategori Tingkat Kepuasan**

Nilai	Nilai Interval IKM (%)	Kualitas Pelayanan	Kategori Tingkat Kepuasan
1	25,00 – 43,75	D	Tidak Memuaskan
2	43,76 – 62,50	C	Kurang Memuaskan
3	62,51 – 81,25	B	Memuaskan
4	81,26 – 100,00	A	Sangat Memuaskan



**Tabel 4.55**  
**Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017**

No	SKPD	IKM	Kategori	Kualitas
1	Dinas Kependudukan dan Capil	78,2	B	Memuaskan
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,7	B	Memuaskan
3	Dinas Kesehatan	78,2	B	Memuaskan
4	Rumah Sakit	77,9	B	Memuaskan
5	Dinas PUPR	69,2	B	Memuaskan
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	67,0	B	Memuaskan
7	Dinas Sosial	62,6	B	Memuaskan
8	Dinas Perikanan dan Kelautan	66,4	B	Memuaskan
9	Dinas Pertanian dan Peternakan	71,2	B	Memuaskan
10	Dinas Koperasi dan UMKM	65,0	B	Memuaskan
11	Dinas Pariwisata	67,3	B	Memuaskan
12	Dinas perpustakaan	73,1	B	Memuaskan
13	Dinas Satpol PP	60,8	C	Kurang Memuaskan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	71,5	B	Memuaskan
15	Dinas Perhubungan	62,7	B	Memuaskan
16	Dinas Pangan	68,4	B	Memuaskan
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	65,9	B	Memuaskan
18	Dinas Lingkungan Hidup	75,7	B	Memuaskan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	67,3	B	Memuaskan
20	Dinas penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja	85,3	A	Sangat Memuaskan
21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	72,8	B	Memuaskan

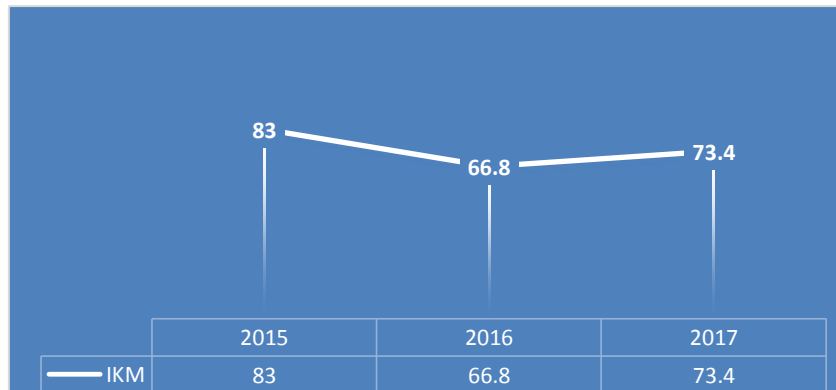


	Perempuan dan Perlindungan Anak			
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69,1	B	Memuaskan
23	Bappeda Litbang	70,2	B	Memuaskan
24	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	72,1	B	Memuaskan
25	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	68,0	B	Memuaskan
26	Sekretariat Daerah	67,3	B	Memuaskan
27	Sekretariat DPRD	67,5	B	Memuaskan
28	Inspektorat	70,7	B	Memuaskan
29	Kecamatan Bulango Ulu	67,6	B	Memuaskan
30	Kecamatan Bulango Selatan	78,1	B	Memuaskan
31	Kecamatan Bulango Timur	74,2	B	Memuaskan
32	Kecamatan Bulango Utara	77,8	B	Memuaskan
33	Kecamatan Bone	81,0	B	Memuaskan
34	Kecamatan Bone Raya	73,9	B	Memuaskan
35	Kecamatan Bulawa	86,7	A	Kurang Memuaskan
36	Kecamatan Bone Pantai	75,0	B	Memuaskan
37	Kecamatan Kabila Bone	73,4	B	Memuaskan
38	Kecamatan Suwawa	74,4	B	Memuaskan
39	Kecamatan Suwawa Tengah	71,5	B	Memuaskan
40	Kecamatan Suwawa Timur	74,3	B	Memuaskan
41	Kecamatan Suwawa Selatan	98,6	A	Sangat Memuaskan
42	Kecamatan Botupingge	75,4	B	Memuaskan
43	Kecamatan Tilongkabila	62,0	C	Kurang Memuaskan
44	Kecamatan Kabila	71,9	B	Memuaskan
45	Kecamatan Tapa	66,6	B	Memuaskan
46	Kecamatan Pinogu	77,1	B	Memuaskan
	<b>BONE BOLANGO</b>	<b>73,5</b>	<b>B</b>	<b>Memuaskan</b>



Dibanding dengan IKM Layanan publik Bone Bolango Tahun 2016, IKM Bone Bolango 2017 mengalami kenaikan. IKM Bone Bolango Tahun 2016 adalah 68,8% dan IKM Bone Bolango tahun 2017 adalah 73,4% atau mengalami kenaikan sebesar 4,8%.

**Grafik 4.32**  
**Trend Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2016 – 2017**



#### . Permasalahan dan solusi

##### Permasalahan :

- Belum optimalisasi pengendalian terhadap batas daerah Kabupaten Bone Bolango dengan daerah lainnya menyangkut persoalan perbatasan oleh Tim Penetapan Batas Daerah
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terutama menyangkut Dana Desa.
- Belum optimalnya informasi layanan informasi public yang dilakukan terutama menyangkut infrastruktur teknologi informasi baik untuk menunjang kinerja aparatur maupun untuk wilayah-wilayah terpencil.

##### Solusi :

- Mengoptimalkan pengendalian batas daerah dengan melakukan pemetaan terhadap batas wilayah.
- Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa menyangkut perencanaan dan monitoring dana alokasi desa.
- Meningkatkan kecermatan dalam penyusunan perencanaan terutama kegiatan-kegiatan yang benar-benar memecahkan permasalahan pokok informasi public dan tetap mengacu pada tujuan, sasaran, program dan kegiatan dan diikuti oleh



pengawasan agar rencana kegiatan dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.

- Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.

## 2. Urusan Pengawasan

### a. Program dan kegiatan

Untuk tahun 2017, untuk urusan Pengawasan dengan pelaksana Inspektorat Daerah terdapat anggaran sebesar Rp.2.928.550.000,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.2.895.601.642,- atau 98,87%. Adapun Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang telah dilaksanakan adalah 2 (dua) program dengan 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka pencapaian kinerja/outcome diatas maka program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
  - Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
  - Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
  - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  - Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

### b. Capaian Kinerja

Capaian kinerja/outcome pada sub urusan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kasus temuan yang diselesaikan



**Tabel 4.56**  
**Kasus Temuan yang Diselesaikan Pada Tahun 2017**

Jumlah kasus temuan yang diselesaikan	263 Kasus (*)
---------------------------------------	---------------

### c. Permasalahan dan solusi

#### Permasalahan :

- Belum optimalnya pengawasan terhadap obyek pemeriksaan karena kurangnya sarana/prasaran dan alat ukur dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik dilapangan.

#### Solusi :

- Meningkatkan sarana dan prasarana pemeriksaan Meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan agar mencapai sasaran dan tujuan yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

## 3. Urusan Perencanaan

### a. Program dan kegiatan

Untuk tahun 2017, pada urusan Perencanaan yang dilaksanakan olehh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Daerah dan Badan Poerencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdapat anggaran sebesar Rp.9.144.452.500,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.8.792.034.626,- atau 96,15% .

#### 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Untuk menunjang program maka kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Koordinasi Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

#### 2) Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :



- Penyusunan Dokumen Data Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD
  - Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten Bone Bolango.
  - Penyusunan Dokumen Dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Kabupaten Bone Bolango.
  - Bimbingan Teknis Aplikasi SIPPD dan SIMONEV
  - Pengembangan Aplikasi SIPPD, SIMONEV, SIPP
  - Pengembangan Aplikasi SIPP dan SIMONEV versi Android
  - Pemeliharaan Server dan Perangkat Infrastruktur Jaringan
  - Penyusunan Buku Satu Data Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017
  - Pembuatan Visualisasi Potensi dan Peluang Produk Unggulan Daerah
  - Penyusunan Buku Profil Daerah Tahun 2016
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Bimtek Tata Kelola Perencanaan SKPD
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
- Penyusunan Rancangan RKPD
  - Penyusunan dokumen RKPD tahun 2018
  - Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS tahun 2018
  - Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan tahun 2017
  - Penyusunan Dokumen KUPA dan PPASP tahun 2017
  - Keikutsertaan dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi
  - Keikutsertaan dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Nasional
  - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
  - Pelaksanaan kegiatan Forum SKPD, Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD



- Penyusunan Dokumen LKIP tahun 2016
  - Coaching clinic di Jakarta
  - Coaching clinic di Gorontalo
  - Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016
  - Penyusunan Dokumen IKM
  - Penyusunan Dok. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017.
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Penyusunan Laporan Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Ekonomi
  - Koordinasi Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Ekonomi antar Daerah Tingkat Provinsi Gorontalo
  - Koordinasi Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Ekonomi di Tingkat Kabupaten
- 6) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan
  - Kegiatan Rapat Teknis Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan
  - Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan
  - Kegiatan sosialisasi/bimtek pemutahiran mandiri BDT
  - Rapat Koordinasi Tata Pemerintahan
- 7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA
  - Kegiatan koordinasi bidang Fisik dan Prasarana Tingkat Provinsi dan Kabupaten
  - Penyusunan dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA
  - Penyusunan Dokumen JAKSTRADA





- Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
  - Publikasi Dokumen JAKSTRADA
  - Penyusunan KLHS, Dokumen RTRW, revisi RTRW, RDTRK dan RTRK
- 8) Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah
- Penyusun Road Map Penguatan SIDA Kabupaten Bone Bolango
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen Branding Identity
- Penyusunan Dokumen Kualitas Kopi Gabulu

#### **b. Capaian Kinerja**

- Meningkatnya kompetensi aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.
- Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan yang dilaporkan tepat waktu.
- Penyusunan dokumen APBD tepat waktu

#### **c. Permasalahan dan solusi**

##### **Permasalahan**

- Penjadwalan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama sehingga penyediaan dana anggaran untuk beberapa kegiatan mengalami hambatan.
- Tidak disiplinnya pelaksana kegiatan melaksanakan Rencana Anggaran Kas yang sudah disusun sebelumnya
- Adanya pergeseran anggaran yang merubah volume output yang telah ditetapkan.

##### **Solusi**

- Perlu penjadwalan/pengkajian kembali pelaksanaan kegiatan, sehingga penyediaan dana anggaran untuk tiap-tiap kegiatan tersedia dan tidak mengalami hambatan



- Program dan kegiatan dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.
- Memberdayakan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan keahlian.
- Sedapat mungkin tidak melakukan pergeseran anggaran sehingga volume output tidak berubah.
- Pelaksanaan setiap kegiatan harus sesuai RAK (Rencana Anggaran Kas), sehingga pelaksanaan kegiatan bisa diatur sesuai jadwal yang telah ditentukan.

#### **4. Urusan Keuangan**

##### **a. Kinerja Program dan kegiatan**

Untuk tahun 2017, pada urusan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah terdapat anggaran sebesar Rp.9.144.452.500,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.8.792.034.626,- atau 96,15%. Program dan Kegiatan Strategis yang telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 14 (empat belas) kegiatan strategis dalam rangka pencapaian target.

- 1) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Penyusunan Dokumen Standar harga
  - Penyusunan Dokumen revisi Standar harga
  - Penyusunan Perda APBD
  - Penyusunan Perda APBD-P
  - Penyusunan Dokumen LPKD
  - Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Pelaksanaan Bimtek Keuangan(124 orang)
  - Pelaksanaan Inventarisasi BMD
  - Pelaksanaan pelabelan Aset
  - Pemeliharaan SIMDA Keuangan dan Gaji



- Penghapusan Aset
- Pengumpulan pajak daerah, Retribusi da PBB
- Penyusunan Perda dan Perbup APBD
- Anggaran Program Strategis;

#### b. Capaian Kinerja

Outcome pada urusan ini adalah menaikan pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi

**Tabel 4.57**  
**Pendapatan Daerah Tahun 2017**

Jenis Pendapatan	Jumlah
Pajak Daerah	Rp. 9.494.746.023
Retribusi	Rp. 1.275.340.230

#### c. Permasalahan dan solusi

banyaknya potensi-potensi PAD yang belum dapat ditaruik retribusinya karena belum adanya peraturan daerah terkait retribusi.

### 5. Urusan Kepegwaian

#### a. Kinerja Program dan kegiatan

Untuk tahun 2017, pada urusan Kepegawaian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdapat anggaran sebesar Rp.2.735.891.900,- dengan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.2.708.769.521,- atau 99,01%.

- 1) Pogram Peningkatan kapasitas sumebr daya Aparatur
  - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
    - Terlaksananya Diklat struktural PIM II, III, IV (43 Orang)
  - Pendidikan dan pelatihan formal
    - Terlaksananya Bimtek kepegawaian (40 orang)
- 2) Pogram Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
  - Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
  - Tersusunnya Analisis Jabatan ASN



- Seleksi Penerimaan Calon PNS
  - Konsultasi Penerimaan CPNS
- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
- Pemberian penghargaan satya lencana (56 orang)
- Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
  - Pelaksanaan sidang kode etik (5 orang)
- Penempatan PNS
  - Honorarium Baperjakat
- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
  - Pengantaran Dokumen Kenaikan pangkat PNS (8 Kali)
  - Pelaksanaan Sosialisasi Sistem manajemen Kepegawaian berbasis aplikasi (3 kali)
- Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
  - Pembuatan aplikasi Administrasi kepegawaian (2 Aplikasi)

#### **b. Capaian Kinerja**

Pada tahun 2017 untuk urusan kepegawaian aparat pemerintah kabupaten bone bolango yang mendapatkan penghargaan satyalencana karyasatya XXX, XX, X tahun sebanyak 46 orang dengan rincian :

- Satyalencana Karya Satya XXX Tahun 9 orang
- Satyalencana Karya Satya XX Tahun 10 orang
- Satyalencana Karya Satya X Tahun 27 orang

Pada tahun yang sama ada 43 aparat sipil negara yang mengikuti diklat penjenjangan yang terdiri dari 40 orang diklat pim IV dan 3 orang diklat pim III

Selain itu ada 5 aparat yang mendapatkan hukuman disiplin dimana 4 diantaranya berupa penjatuhan hukuman disiplin ringan dan 1 orang berupa penjatuhan hukuman disiplin sedang



Untuk tingkat pendidikan aparat 53,07 % dari jumlah total aparat merupakan lulusan strata 1 atau setara yang terinci sebagai berikut

SD	:	8 orang
SLTP	:	46 orang
SLTA/D1	:	1.093 orang
D2	:	125 orang
D3	:	407 orang
S1/D4	:	2.083 orang
S2	:	162 orang
S3	:	1 orang

### c. Permasalahan dan solusi

Disiplin Aparatur yang masih relatif kurang khususnya pada ketaatan terhadap jam kantor dan partisipasi pada kegiatan-kegiatan keagamaan adalah hal dominan yang banyak terjadi dilingkungan OPD. Solusi Alternatif terhadap permasalahan ini adalah dengan mengoptimalkan pengawasan aparatur dilingkungan kantor masing-masing maupun pengawasan eksternal. Tindakan lainnya yaitu dengan menerapkan reward and punishment terhadap aparatur melalui insentif dan disinsentif pemberian tunjangan kinerja.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan kompetensi aparatur yang memiliki pendidikan penjenjangan baik diklat struktural maupun fungsional. Solusi yang ditempuh ditengah keterbatasan anggaran daerah adalah dengan bekerja sama dengan unit diklat lainnya dalam peningkatan kualitas kompetensi aparatur. Anggaran peningkatan kualitas aparatur pada masing masing OPD juga dioptimalkan pemanfatannya dengan meminta setiap OPD untuk mengalokasikan anggaran pada setiap OPD di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bone Bolango.



## BAB V

### PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan sebagai salah satu strategi pelaksanaan pembangunan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah sehingga perlu untuk dilakukan pendelegasian tugas kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah dibebankan kepada APBN. Sebagaimana yang dijelaskan kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur pada pasal 48 ayat 1. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik (pasal 49 ayat 2). Kegiatan yang bersifat fisik, antara lain: pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran (*output*) dan menambah nilai aset Pemerintah. Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untuk kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya (penjelasan pasal 49 ayat 2).

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara)



berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

#### **A. Tugas Pembantuan Yang Diterima**

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menerima tugas pembantuan dari kementerian / pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Adapun SKPD yang melaksanakan adalah:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Tugas-tugas pembantuan tersebut dilaksanakan dan diarahkan pada kegiatan sesuai peruntukannya, mencakup :

1. Tugas Pembantuan Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM

Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dijabarkan berdasarkan:

##### **1. Dasar Hukum Tugas Pembantuan**

- a. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang – Undang No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA. 2016

##### **2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

##### **3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.



#### 4. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Pada tahun 2017, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang terdiri dari :

Program :

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan :

Revitalisasi Pasar Rakyat (Pasar Rabu) Lokasi Desa Bube Baru Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango

Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango adalah sebesar Rp.5.235.558.000,- atau mencapai 87,26 %.

**Tabel 5.1**

#### **Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017**

NO	KEGIATAN/PROGRAM	LOKASI	SATUAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN
1	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat (Pasar Rabu)	Desa Bube Baru	1 Unit Pasar	1 Unit Pasar	1 Unit Pasar	6.000.000.000

Sumber Data Dinas Perindagkop UMKM Tahun 2017

#### 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pasar Rakyat (Pasar Rabu) Lokasi Desa Bube Baru Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 6.000.000.000.-

#### 6. Permasalahan dan Solusi

Dalam Penyelesaian kegiatan tersebut tidak mengalami permasalahan

Setelah pembangunan revitalisasi pasar jumlah pedagang mengalami peningkatan





dimana pada tahun 2016 jumlah pedagang berjumlah 224 orang namun setelah revitalisasi meningkat menjadi 250 orang. Demikian juga dengan luas bangunan meningkat sangat signifikan dimana sebelum revitalisasi 575 m<sup>2</sup> menjadi 1771 m<sup>2</sup>. Dengan meningkatnya jumlah dan luas pasar setelah direvitalisasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat terutama para pedagang dan pelaku ekonomi lainnya.

## **B. TugasPembantuan Yang Diberikan**

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bahwa Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan/ atau desa meliputi sebagian tugas- tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan /atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten /kota dan / atau desa meliputi sebagian tugas- tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/ kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;



- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

## **2. Urusan Pemerintah Yang Ditugas Pembantuankan Kepada Kabupaten/ Kota dan Desa Untuk Provinsi atau Kepada Desa untuk Kabupaten/ Kota**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang. Kemudian Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, dapat dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa,

### **a. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa diturunkan dengan tujuan untuk membantu desa atau memfasilitasi desa yang membangun sarana demi meningkatkan kinerja desa, adapun bertujuan memberikan modal untuk pembangunan BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan yang



lainnya.

Berikut daftar Desa Penerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagaimana dalam table dibawah ini :

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2017**

NO	D E S A	KECAM ATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN KAS ALOKASI DANA DESA	ANGGARAN KAS ALOKASI DANA DESA	ANGGARAN KAS ALOKASI DANA DESA	ANGGARAN KAS ALOKASI DANA DESA
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
1	TALUDAA	BONE	317,211,000	79,302,750	79,302,750	79,302,750	79,302,750
2	SOGITIA		317,211,000	79,302,750	79,302,750	79,302,750	79,302,750
3	MOODULIO		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
4	BILOLANTUNG A		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
5	INO GALUMA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
6	MONANO		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
7	TUMBUH MEKAR		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
8	MOLAMAHU		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
9	MASIAGA		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
10	ILOHUUUWA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
11	MUARA BONE		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
12	CENDANA PUTIH		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
13	WALUHU		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
14	PERMATA		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
15	INOMATA	BONE RAYA	306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
16	TOMBULILATO		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
17	MOOTAYU		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250



18	MOOTINELO		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
19	PELITA JAYA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
20	MOOPIYA		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
21	ALO		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
22	LAUT BIRU		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
23	BUNGA		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
24	MOOTAWA		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
25	MAMUNGAA	BULAW A	296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
26	KAIDUNDU BARAT		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
27	MOPUYA		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
28	KAIDUNDU		317,211,000	79,302,750	79,302,750	79,302,750	79,302,750
29	BUKIT HIJAU		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
30	MAMUNGAA TIMUR		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
31	DUNGGILATA		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
32	PINOMOTING A		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
33	PATOA		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
34	TAMBOO	BONEP ANTAI	296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
35	BILUNGALA		352,953,000	88,238,250	88,238,250	88,238,250	88,238,250
36	UABANGA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
37	TOLOTIO		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
38	TONGO		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
39	BILUNGALA UTARA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
40	TIHU		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
41	TUNAS JAYA		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
42	LEMBAH HIJAU		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
43	BATU HIJAU		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250



44	OMBULO HIJAU		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
45	KAMIRI		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
46	PELITA HIJAU		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
47	HUANGOBOTU	KABILA BONE	322,317,000	80,579,250	80,579,250	80,579,250	80,579,250
48	MOLOTABU		327,423,000	81,855,750	81,855,750	81,855,750	81,855,750
49	OLUHUTA		337,635,000	84,408,750	84,408,750	84,408,750	84,408,750
50	OLELE		332,529,000	83,132,250	83,132,250	83,132,250	83,132,250
51	BOTUTONUA		317,211,000	79,302,750	79,302,750	79,302,750	79,302,750
52	MODELOMO		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
53	BILUANGO		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
54	BOTUBARANI		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
55	BINTALAHE		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
56	MONGIILLO	BULAN GO ULU	301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
57	OWATA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
58	MONGIILLO UTARA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
59	PILOLAHEYA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
60	ILOMATA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
61	SUKA MAKMUR		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
62	BULOTALANGI	BULAN GO TIMUR	301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
63	TOLUWAYA		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
64	POPODU		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
65	BULOTALANGI TIMUR		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
66	BULOTALANGI BARAT		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
67	BOIDU	BULAN GO UTARA	296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
68	BANDUNGAN		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250



69	TUPA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
70	LONGALO		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
71	TULOA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
72	KOPI		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
73	LOMAYA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
74	SUKA DAMAI		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
75	BUNUO		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
76	AYULA SELATAN	BULAN GO SELATAN	301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
77	HUNTU UTARA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
78	AYULA UTARA		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
79	HUNTU SELATAN		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
80	AYULA TILANGO		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
81	AYULA TIMUR		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
82	LAMAHU		317,211,000	79,302,750	79,302,750	79,302,750	79,302,750
83	TINELO AYULA		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
84	SEJAHTERA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
85	HUNTU BARAT		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
86	TALUMOPATU	TAPA	301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
87	TALULOBUTU		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
88	DUNGGALA		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
89	LANGGE		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
90	TALULOBUTU SELATAN		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
91	KERAMAT		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
92	MERANTI		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
93	TIMBUOLO	BOTUPI NGGE	291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250



94	PANGGULO		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
95	LUWOHU		286,575,000	71,643,750	71,643,750	71,643,750	71,643,750
96	BUATA		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
97	TIMBUOLO TIMUR		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
98	TANAH PUTIH		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
99	PANGGULO BARAT		286,575,000	71,643,750	71,643,750	71,643,750	71,643,750
100	TIMBULO TENGAH		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
101	SUKMA		286,575,000	71,643,750	71,643,750	71,643,750	71,643,750
102	DUTOHE	KABILA	296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
103	TANGGILINGO		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
104	TOTO SELATAN		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
105	POOWO		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
106	TALANGO		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
107	POOWO BARAT		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
108	DUTOHE BARAT		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
109	BONGOIME	TILONG KABILA	327,423,000	81,855,750	81,855,750	81,855,750	81,855,750
110	BONGOPINI		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
111	TOTO UTARA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
112	MOUTONG		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
113	TUNGGULO		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
114	LONUO		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
115	TAMBOO		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
116	ILOHELUMA		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
117	MOOTILANGO		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
118	BUTU		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
119	PERMATA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250



120	TUNGOLO SELATAN		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
121	BONGOHULO WA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
122	BERLIAN		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
123	TINGKOHUBU	SUWA WA	301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
124	BOLUDAWA		327,423,000	81,855,750	81,855,750	81,855,750	81,855,750
125	BUBE		286,575,000	71,643,750	71,643,750	71,643,750	71,643,750
126	HULUDUOTA MO		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
127	ULANTA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
128	TINELO		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
129	BUBEYA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
130	BUBE BARU		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
131	TINGKOHUBU TIMUR		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
132	HELUMO		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
133	TULABOLO	SUWA WA TIMUR	301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
134	DUMBAYA BULAN		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
135	TULABOLO TIMUR		317,211,000	79,302,750	79,302,750	79,302,750	79,302,750
136	TILANGOBULA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
137	PODUWOMA		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
138	PANGGULO		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
139	TULABOLO BARAT		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
140	PANGI		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
141	TINEMBA		291,681,000	72,920,250	72,920,250	72,920,250	72,920,250
142	PINOGU	PINOGU	317,211,000	79,302,750	79,302,750	79,302,750	79,302,750
143	BANGIO		327,473,620	81,868,405	81,868,405	81,868,405	81,868,405
144	DATARAN HIJAU		317,211,000	79,302,750	79,302,750	79,302,750	79,302,750
145	PINOGU PERMAI		317,211,000	79,302,750	79,302,750	79,302,750	79,302,750





146	TILONGGIBILA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
147	BULONTALA	SUWA WA SELATA N	301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
148	LIBUNGO		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
149	MOLINTOGUP O		322,317,000	80,579,250	80,579,250	80,579,250	80,579,250
150	BONEDAA		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
151	BONDAWUNA		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
152	BULONTALA TIMUR		306,999,000	76,749,750	76,749,750	76,749,750	76,749,750
153	PANCURAN		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
154	BONDARAYA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
155	LOMPOTOO	SUWA WA TENGA H	296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
156	LOMBONGO		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
157	DUANO		312,105,000	78,026,250	78,026,250	78,026,250	78,026,250
158	TOLOMATO		286,575,000	71,643,750	71,643,750	71,643,750	71,643,750
159	ALALE		296,787,000	74,196,750	74,196,750	74,196,750	74,196,750
160	TAPADAA		301,893,000	75,473,250	75,473,250	75,473,250	75,473,250
<b>J U M L A H</b>			<b>48,507,170,6 20</b>	<b>12,126,792, 655</b>	<b>12,126,792, 655</b>	<b>12,126,792, 655</b>	<b>12,126,792, 655</b>

\*) Sumber Data DPPKAD Tahun 2017

#### **b. Dana Desa**

Dana Desa adalah anggaran yang diluncurkan dari Pemerintah untuk pembangunan Desa, dana ini bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, untuk Pembangunan didesa supaya terciptanya desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana hingga masyarakat desa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya.

Berikut dapat disampaikan realisasi alokasi dana desa sebagaimana



dibawah ini :

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Dana Desa Tahun 2017**

NO	DESA	KECAMATAN	PAGU DESA	PENYALURAN TAHAP I	PENYALURAN TAHAP II	SISA
1	TALUMOPATU	TAPA	760,398,000	456,238,800	304,159,200	0.00
2	TALULOBUTU		756,803,000	454,081,800	302,721,200	0.00
3	DUNGGALA		773,477,000	464,086,200	309,390,800	0.00
4	LANGGE		778,164,000	466,898,400	311,265,600	0.00
5	TALULOBUTU SELATAN		745,578,000	447,346,800	298,231,200	0.00
6	KERAMAT		753,578,000	452,146,800	301,431,200	0.00
7	MERANTI		764,742,000	458,845,200	305,896,800	0.00
8	DUTOHE	KABILA	752,438,000	451,462,800	300,975,200	0.00
9	TANGGILINGO		769,896,000	461,937,600	307,958,400	0.00
10	TOTO SELATAN		764,562,000	458,737,200	305,824,800	0.00
11	POOWO		765,022,000	459,013,200	306,008,800	0.00
12	TALANGO		752,610,000	451,566,000	301,044,000	0.00
13	POOWO BARAT		758,056,000	454,833,600	303,222,400	0.00
14	DUTOHE BARAT		767,936,000	460,761,600	307,174,400	0.00
15	TINGKOHUBU	SUWAWA	765,359,000	459,215,400	306,143,600	0.00
16	BOLUDAWA		796,986,000	478,191,600	318,794,400	0.00
17	BUBE		744,089,000	446,453,400	297,635,600	0.00
18	HULUDUOTAMO		750,695,000	450,417,000	300,278,000	0.00
19	ULANTHA		765,883,000	459,529,800	306,353,200	0.00
20	TINELO		774,688,000	464,812,800	309,875,200	0.00
21	BUBEYA		760,057,000	456,034,200	304,022,800	0.00
22	BUBE BARU		763,059,000	457,835,400	305,223,600	0.00
23	TINGKOHUBU TIMUR		750,550,000	450,330,000	300,220,000	0.00
24	HELUMO		749,986,000	449,991,600	299,994,400	0.00
25	TAMBOO	BONEPANTAI	756,286,000	453,771,600	302,514,400	0.00
26	BILUNGALA		780,548,000	468,328,800	312,219,200	0.00
27	UABANGA		781,400,000	468,840,000	312,560,000	0.00
28	TOLOTIO		754,041,000	452,424,600	301,616,400	0.00
29	TONGO		768,812,000	461,287,200	307,524,800	0.00
30	BILUNGALA UTARA		769,656,000	461,793,600	307,862,400	0.00
31	TIHU		770,978,000	462,586,800	308,391,200	0.00



32	TUNAS JAYA		757,791,000	454,674,600	303,116,400	0.00
33	LEMBAH HIJAU		781,742,000	469,045,200	312,696,800	0.00
34	BATU HIJAU		760,348,000	456,208,800	304,139,200	0.00
35	OMBULO HIJAU		760,090,000	456,054,000	304,036,000	0.00
36	KEMIRI		762,896,000	457,737,600	305,158,400	0.00
37	PELITA HIJAU		778,149,000	466,889,400	311,259,600	0.00
38	BOIDU	BULANGO UTARA	755,846,000	453,507,600	302,338,400	0.00
39	BANDUNGAN		762,916,000	457,749,600	305,166,400	0.00
40	TUPA		767,452,000	460,471,200	306,980,800	0.00
41	LONGALO		765,928,000	459,556,800	306,371,200	0.00
42	TULOA		771,480,000	462,888,000	308,592,000	0.00
43	KOPI		751,891,000	451,134,600	300,756,400	0.00
44	LOMAYA		765,658,000	459,394,800	306,263,200	0.00
45	SUKA DAMAI		767,892,000	460,735,200	307,156,800	0.00
46	BUNUO		757,361,000	454,416,600	302,944,400	0.00
47	BONGOIME	TILONGKABILA	780,573,000	468,343,800	312,229,200	0.00
48	BONGOPINI		777,970,000	466,782,000	311,188,000	0.00
49	TOTO UTARA		770,164,000	462,098,400	308,065,600	0.00
50	MOUTONG		760,364,000	456,218,400	304,145,600	0.00
51	TUNGGULO		777,725,000	466,635,000	311,090,000	0.00
52	LONUO		769,127,000	461,476,200	307,650,800	0.00
53	TAMBOO		754,859,000	452,915,400	301,943,600	0.00
54	ILOHELUMO		755,934,000	453,560,400	302,373,600	0.00
55	MOTILANGO		778,247,000	466,948,200	311,298,800	0.00
56	BUTU		762,067,000	457,240,200	304,826,800	0.00
57	PERMATA		765,195,000	459,117,000	306,078,000	0.00
58	TUNGGULO SELATAN		747,072,000	448,243,200	298,828,800	0.00
59	BONGOHULAWA		771,816,000	463,089,600	308,726,400	0.00
60	BERLIAN		747,333,000	448,399,800	298,933,200	0.00
61	TIMBUOLO	BOTUPINGGE	751,128,000	450,676,800	300,451,200	0.00
62	PANGGULO		753,600,000	452,160,000	301,440,000	0.00
63	LUWOHU		739,199,000	443,519,400	295,679,600	0.00
64	BUATA		747,122,000	448,273,200	298,848,800	0.00
65	TIMBUOLO TIMUR		752,698,000	451,618,800	301,079,200	0.00
66	TANAH PUTIH		750,440,000	450,264,000	300,176,000	0.00
67	PANGGULO BARAT		741,215,000	444,729,000	296,486,000	0.00



68	TIMBUOLO TENGAH		752,618,000	451,570,800	301,047,200	0.00
69	SUKMA		742,301,000	445,380,600	296,920,400	0.00
70	HUANGOBOTU	KABILA BONE	763,373,000	458,023,800	305,349,200	0.00
71	MOLOTABU		798,692,000	479,215,200	319,476,800	0.00
72	OLUHUTA		824,008,000	494,404,800	329,603,200	0.00
73	OLELE		806,004,000	483,602,400	322,401,600	0.00
74	BOTUTONUO		781,271,000	468,762,600	312,508,400	0.00
75	MODELOMO		777,981,000	466,788,600	311,192,400	0.00
76	BILUANGO		766,962,000	460,177,200	306,784,800	0.00
77	BOTUBARANI		764,285,000	458,571,000	305,714,000	0.00
78	BINTALAHE		763,762,000	458,257,200	305,504,800	0.00
79	TALUDAA	BONE	784,835,000	470,901,000	313,934,000	0.00
80	SOGITIA		808,380,000	485,028,000	323,352,000	0.00
81	MOODULIO		775,872,000	465,523,200	310,348,800	0.00
82	BILOLANTUNGA		767,405,000	460,443,000	306,962,000	0.00
83	INO GALUMA		760,368,000	456,220,800	304,147,200	0.00
84	MONANO		763,101,000	457,860,600	305,240,400	0.00
85	TUMBUH MEKAR		756,155,000	453,693,000	302,462,000	0.00
86	MOLAMAHU		775,683,000	465,409,800	310,273,200	0.00
87	MASIAGA		758,635,000	455,181,000	303,454,000	0.00
88	ILOHUUWA		769,233,000	461,539,800	307,693,200	0.00
89	MUARA BONE		756,119,000	453,671,400	302,447,600	0.00
90	CENDANA PUTIH		755,577,000	453,346,200	302,230,800	0.00
91	WALUHU		749,955,000	449,973,000	299,982,000	0.00
92	PERMATA		752,131,000	451,278,600	300,852,400	0.00
93	INOMATA	BONERAYA	769,589,000	461,753,400	307,835,600	0.00
94	TOMBULILATO		748,694,000	449,216,400	299,477,600	0.00
95	MOOTAYU		750,704,000	450,422,400	300,281,600	0.00
96	MOOTINELO		753,562,000	452,137,200	301,424,800	0.00
97	PELITA JAYA		769,003,000	461,401,800	307,601,200	0.00
98	MOOPIYA		754,185,000	452,511,000	301,674,000	0.00
99	ALO		764,612,000	458,767,200	305,844,800	0.00
100	LAUT BIRU		757,244,000	454,346,400	302,897,600	0.00
101	BUNGA		754,918,000	452,950,800	301,967,200	0.00
102	MOOTAWA		753,758,000	452,254,800	301,503,200	0.00
103	TULABOLO	SUWAWA TIMUR	761,051,000	456,630,600	304,420,400	0.00



104	DUMBAYA BULAN		771,892,000	463,135,200	308,756,800	0.00
105	TULABOLO TIMUR		788,226,000	472,935,600	315,290,400	0.00
106	TILANGOBULA		768,346,000	461,007,600	307,338,400	0.00
107	PODUWOMA		750,210,000	450,126,000	300,084,000	0.00
108	PANGGULO		745,525,000	447,315,000	298,210,000	0.00
109	TULABOLO BARAT		751,731,000	451,038,600	300,692,400	0.00
110	PANGI		751,131,000	450,678,600	300,452,400	0.00
111	TUNEMBA		746,248,000	447,748,800	298,499,200	0.00
112	BULONTALA	SUWAWA SELATAN	762,625,000	457,575,000	305,050,000	0.00
113	LIBUNGO		762,876,000	457,725,600	305,150,400	0.00
114	MOLINTOGUPO		787,588,000	472,552,800	315,035,200	0.00
115	BONEDAA		767,945,000	460,767,000	307,178,000	0.00
116	BONDAWUNA		773,821,000	464,292,600	309,528,400	0.00
117	BULONTALA TIMUR		771,907,000	463,144,200	308,762,800	0.00
118	PANCURAN		759,093,000	455,455,800	303,637,200	0.00
119	BONDARAYA		760,682,000	456,409,200	304,272,800	0.00
120	LOMPOTOO	SUWAWA TENGAH	755,040,000	453,024,000	302,016,000	0.00
121	LOMBONGO		764,023,000	458,413,800	305,609,200	0.00
122	DUANO		774,557,000	464,734,200	309,822,800	0.00
123	TOLOMATO		742,063,000	445,237,800	296,825,200	0.00
124	ALALE		757,384,000	454,430,400	302,953,600	0.00
125	TAPADAA		760,568,000	456,340,800	304,227,200	0.00
126	MONGIILLO	BULANGO ULU	772,672,000	463,603,200	309,068,800	0.00
127	OWATA		794,558,000	476,734,800	317,823,200	0.00
128	MONGIILLO UTARA		772,088,000	463,252,800	308,835,200	0.00
129	PILOLAHEYA		768,437,000	461,062,200	307,374,800	0.00
130	ILOMATA		760,010,000	456,006,000	304,004,000	0.00
131	SUKA MAKMUR		759,011,000	455,406,600	303,604,400	0.00
132	AYULA SELATAN	BULANGO SELATAN	759,687,000	455,812,200	303,874,800	0.00
133	HUNTU UTARA		768,668,000	461,200,800	307,467,200	0.00
134	AYULA UTARA		774,912,000	464,947,200	309,964,800	0.00
135	HUNTU SELATAN		772,173,000	463,303,800	308,869,200	0.00
136	AYULA TILANGO		786,183,000	471,709,800	314,473,200	0.00
137	AYULA TIMUR		752,703,000	451,621,800	301,081,200	0.00
138	LAMAHU		790,967,000	474,580,200	316,386,800	0.00
139	TINELO AYULA		758,310,000	454,986,000	303,324,000	0.00



140	SEJAHTERA		769,476,000	461,685,600	307,790,400	0.00
141	HUNTU BARAT		792,442,000	475,465,200	316,976,800	0.00
142	BULOTALANGI	BULANGO TIMUR	761,363,000	456,817,800	304,545,200	0.00
143	TOLUWAYA		748,626,000	449,175,600	299,450,400	0.00
144	POPODU		766,992,000	460,195,200	306,796,800	0.00
145	BULOTALANGI TIMUR		757,093,000	454,255,800	302,837,200	0.00
146	BULOTALANGI BARAT		756,388,000	453,832,800	302,555,200	0.00
147	MAMUNGAA	BULAWA	754,382,000	452,629,200	301,752,800	0.00
148	KAIDUNDU BARAT		759,040,000	455,424,000	303,616,000	0.00
149	MOPUYA		748,876,000	449,325,600	299,550,400	0.00
150	KAIDUNDU		756,507,000	453,904,200	302,602,800	0.00
151	BUKIT HIJAU		765,787,000	459,472,200	306,314,800	0.00
152	MAMUNGAA TIMUR		769,352,000	461,611,200	307,740,800	0.00
153	DUNGGILATA		752,933,000	451,759,800	301,173,200	0.00
154	PINOMONTIGA		762,919,000	457,751,400	305,167,600	0.00
155	PATOA		754,592,000	452,755,200	301,836,800	0.00
156	PINOGU	PINOGU	762,561,000	457,536,600	305,024,400	0.00
157	BANGIO		797,501,000	478,500,600	319,000,400	0.00
158	DATARAN HIJAU		786,318,000	471,790,800	314,527,200	0.00
159	PINOGU PERMAI		783,242,000	469,945,200	313,296,800	0.00
160	TILONGGIBILA		764,606,000	458,763,600	305,842,400	0.00
<b>JUMLAH</b>			<b>122,334,503,000</b>	<b>73,400,701,800</b>	<b>48,933,801,200</b>	<b>0.00</b>

\*) Sumber Data DPPKAD Tahun 2017

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu desa untuk mandiri dan otonom adalah memberikan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang bertujuan sebagai bantuan stimulant atau dana pendorong dalam pembiayaan program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2017 menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 48.507.170.620.- dan Dana Desa sebesar Rp. 122.334.503.000. Dari dana tersebut digunakan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya dalam bidang pendidikan berupa beasiswa dan



perlengkapan sekolah. Untuk peternakan dialokasikan untuk bantuan sapi sebanyak 1129 orang, Ayam sebanyak 19 orang dan kambing sebanyak 102 orang. Kemudian bidang perikanan berupa pemberian bantuan mesin katinting dan mesin temple, rumpon dan rakit, upaya memperkuat perekonomian desa maka sampai dengan di tahun 2017 sudah terbentuk 132 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dianggarkan dari dana Desa untuk dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa berdasarkan pemanfaatannya.

**Tabel 5.3**  
**Pemanfaatan Dana Desa Infrastruktur Tahun 2017**

No	Keterangan	Anggaran	Volume	Satuan
1	Jalan	20.582.596.035	47.213	Meter
2	Drainase	8.387.885.095	12.722	Meter
3	Irigasi	798.902.325	1.617	Meter
4	Air Bersih	909.320.160	10	Unit

Dari hasil pelaksanaan bantuan keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di 160 Desa Tahun 2017 yang tersebar di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang digunakan untuk pembangunan Infrastruktur sangat bermanfaat secara umum dengan berpedoman pada peraturan perundangan dan pelaksanaan teknis yang berlaku, serta melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala sebagai bentuk langka pengendalian pemanfaatan anggaran agar sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.



## PEMANFAATAN DANA DESA KEGIATAN INFRASTRUKTUR 2017







## BAB VI

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Komitmen dan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan menjadi pra-syarat mutlak agar pencapaian tujuan pembangunan secara nasional maupun skala regional menjadi mudah, cepat dan tepat sasaran. Olehnya, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Bone Bolango senantiasa memberikan ruang kepada seluruh elemen untuk mengambil bagian secara aktif dalam setiap tahap pembangunan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan mengedepankan integrasi dan kerjasama seluruh elemen pembangunan daerah. Oleh karena itu, kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap optimalisasi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

#### **A. Kerjasama Antar Daerah**

##### **Kebijakan dan Kegiatan**

Arah kebijakan kerjasama antar daerah yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potensi dan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki serta dalam rangka peningkatan daya saing wilayah. Kerjasama tersebut diarahkan pula dalam upaya percepatan pembangunan wilayah termasuk pembangunan daerah perbatasan.

Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan





dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara terus menerus berpartisipasi dan mengembangkan koordinasi antar daerah melalui beberapa wadah kerja sama, antara lain Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKCSI), Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) dan Kerjasama Utara-Utara. Selain aktif di forum kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga melakukan kerjasama langsung dengan daerah lainnya diantaranya :

1. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Kabupaten dengan Nomor : 100/MoU/01/PEM.KS/II/17 dan 100/PEM-BB/01/II/2017, tanggal 13 Februari 2017.

Disamping melakukan kerjasama pembangunan antar daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara terus menerus mengembangkan kerja sama untuk beberapa program strategis, yang antara lain:

***Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga Yaitu :***

1. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor : MoU/04/062017 dan 100/MoU/06/PEM.KS/VI/17.
2. Kerjasama antar pemerintah kabupaten di wilayah pesisir utara Sulawesi dalam wadah Badan Kerjasama Utara Utara.
3. Kerjasama dengan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Nomor :100/MoU/08/PEM.KS/VIII/2017.
4. Kerjasama dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi tentang Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pole Microcell dan Jaringan Fiber Optic dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor : 100/PKS/01/PEM.KS/III/2017 dan DMT.008/CLI/DBS1000000/III/2017.
5. Kerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo dan PT.Bank Rakyat Indonesia tentang Pengembangan Klaster Beras di Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor : 100/PKS/02/PEM.KS/III/2017.





6. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango dan Radio Republik Indonesia tentang Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak serta Edukasi dan Kegiatan/Program KB Nasional melalui Kegiatan Penayangan/Penyiaran/Iklan/Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak serta Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja dengan Nomor : 100/PKS/03/PEM.KS/IV/2017 dan 427/RRI/Gorontalo/04/2017.
7. Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo tentang Kerjasama Penerimaan Pembayaran Pajak dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor : 100/PKS/06/PEM.KS/VIII/2017.
8. Kerjasama dengan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tentang Pembangunan Strategis yang tidak Terelakan Dalam Rangka Peningkatan Jalan Tulabolo Pinogu di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan Nomor : PKS.1801/BTNBWW-1/2017 dan 100/PKS/08/PEM.KS/VIII/2017.

***Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Intansi Vertikal Yaitu :***

1. Kerjasama dengan Badan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor : 100/MoU/02/PEM-KS/11/17 tanggal 24 Februari 2017.
2. Kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Gorontalo tentang Pemberian Bantuan untuk Pembangunan Sekolah Polisi Negara dengan Nomor : 100/MoU/05/PEM-KS/III/17 dan B/662/III/2017/POLDA GTLO
3. Kerjasama dengan Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Angkatan Kedua 2017 (*BACTCH 7*) dengan Nomor : 100/MoU/II/PEM.KS/VIII/2017 dan MoU/13/VIII/KA/SU.03/2017/BNNK-BB.





4. Kerjasama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo tentang Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo dengan Nomor : 100/MoU/13/PEM.KS/XI/17 dan HK.08.101.11.17.4133

## **B. Pembinaan Batas Wilayah**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Pembinaan batas wilayah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai dasar hukum eksistensi wilayah, kepastian cakupan wilayah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pencegahan timbulnya konflik antara daerah.

Sebagai dasar hukum eksistensi wilayah memberi makna bahwa suatu daerah yang telah berdiri sendiri harus memperoleh pengakuan publik yang harus didukung dengan Peraturan Perundang-undangan atau dengan kata lain wilayah yang telah berdiri sendiri perlu memiliki batas wilayah yang jelas dan pasti yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Tapal Batas.

Tidak jelasnya batas wilayah dapat berpotensi terjadinya konflik kepentingan pada wilayah perbatasan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, serta kepemilikan lahan warga di wilayah perbatasan. Berkaitan dengan hal tersebut, pembinaan/penataan batas wilayah perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan pembinaan batas wilayah terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow. Tapal batas yang merupakan batas wilayah telah ditetapkan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003.

### **2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan pembinaan batas wilayah telah dilakukan melalui koordinasi bersama antar pemerintahan baik antar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan, maupun melalui koordinasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan



Pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Pembinaan tapal batas tersebut dilakukan dengan melibatkan instansi teknis terkait antara lain Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) serta Fasilitasi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

## C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

### 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya.

#### a. *Kejadian bencana banjir :*

Di Desa Tingkohubu dengan jumlah rumah terendam sebanyak 12 rumah dan Desa Boludawa dengan Jumlah rumah terendam sebanyak 12 rumah.

Penanggulangannya :

- ❖ Memberikan bantuan makanan siap saji selama pemulihan

#### b. *Kejadian bencana banjir bandang :*

Di Desa Taludaa, Moodulio Masiaga, Muara Bone (Kecamatan Bone) dengan jumlah rumah terendam sebanyak 186 rumah dan 1 sekolah rusak dan di Desa Libungo Kecamatan Suwawa Selatan dengan Jumlah rumah terendam sebanyak 14 rumah pada tanggal 10 September 2017.

Penanggulangannya :

- ❖ Melakukan evakuasi terhadap korban bencana
- ❖ Memberikan makanan siap saji selama pemulihan
- ❖ Memberikan bantuan alat dapur seadanya
- ❖ Melakukan layanan kesehatan bagi korban banjir

### 2. Status Bencana Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan hasil Pemetaan Profil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone Bolango kerja sama dengan Koordinasi Survey Pemetaan Nasional (BAKORSULTANAL ) Kabupaten Bone Bolango merupakan Daerah



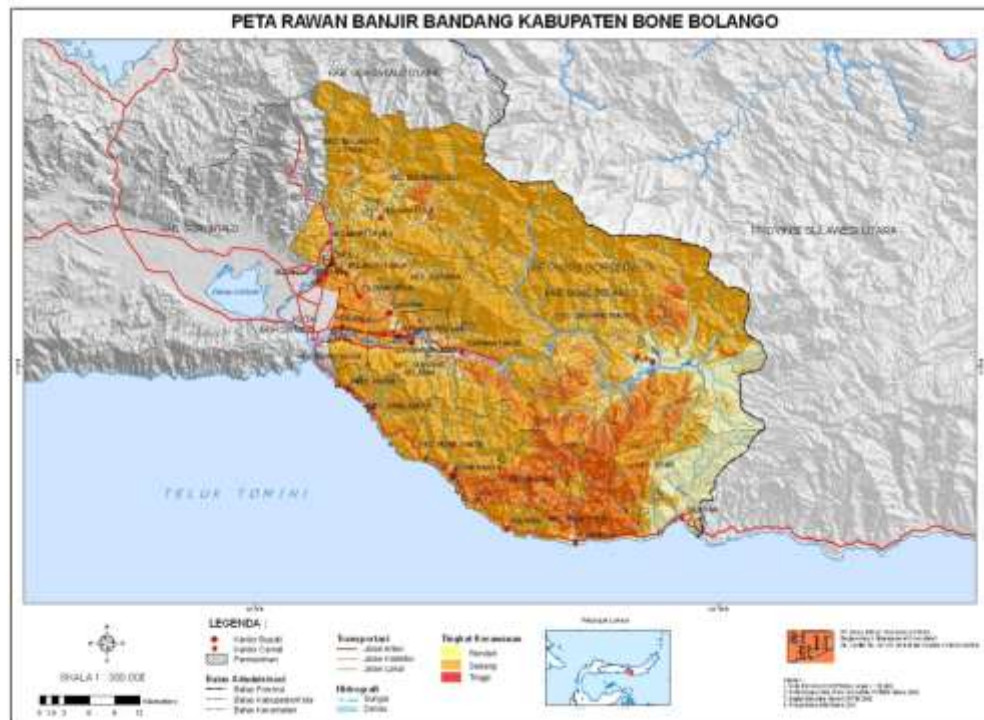
Rawan Bencana. Daerah Rawan Bencana meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.

### Peta Rawan Banjir



Sumber : BPBD Kabupaten Bone Bolango

### Peta Rawan Banjir Bandang



Sumber : BPBD Kabupaten Bone Bolango





Berdasarkan Peta bencana di atas dapat di jelaskan bahwa beberapa Wilayah di Kabupaten Bone Bolango merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana dimana terdapat beberapa kecamatan merupakan wilayah bencana dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu :

a. Tanah Longsor

- Kecamatan Bulango Ulu (Mongiilo, Owata, Pilolaheya, Mongiilo Utara, Suka Makmur, Ilomata)
- Kecamatan Bulawa ( Bukit Hijau, Nyiur Hijau, Kaidundu Barat, Kaidundu, Mopuya, Bukit Hijau)
- Kecamatan Bone Pantai (Tongo)
- Kecamatan Bulango Utara (Tupa, Longalo, Tuloa, Lomaya, Kopi, Bunuo, Suka Damai)

b. Banjir

- Kecamatan Suwawa Selatan (Libungo, Pancuran, Molintogupo)
- Kecamatan Bone Raya (Inomata, Alo, Moopiya)
- Kecamatan Bone Pantai (Tongo)
- Kecamatan Bone (Seluruh Desa)
- Kecamatan Bulango Utara (Seluruh Desa)
- Kecamatan Bulango Selatan (Ayula)
- Kecamatan Suwawa Timur (Seluruh Desa)
- Kecamatan Botupingge (Tanah Putih, Buata, Panggulo, Sukma)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Daerah-Daerah Titik Rawan Bencana berikut :

**Tabel 6.1**  
**Daerah – Daerah Titik Rawan Bencana**

NO	KECAMATAN	TITIK RAWAN BENCANA	JENIS BENCANA
1	SUAWA	Desa Bube , Boludawa , Huluduotamo , Tingkohubu Tinelo , Ulantha , Bubeya , Bube Baru , Tingkohubu Timur , Helumma	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
2	SUAWA TENGAH	Desa Lombongo, Alale, Tapadaa Lompotoo, Duano	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung



		Tolomato	
3	SUAWAWA SELATAN	Desa Libungo, Bulonthala, Bulontala Timur, Pancuran, Bondawuna, Bonedaaa, Bonda Raya, Molintogupo	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
4	SUAWAWA TIMUR	Desa Dumbay Bulan, Tilangobula, Tulabolo, Tulabolo Timur, Tulabolo Barat, Poduwoma, Panggulo, Tinemba, pangi	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
5	KABILA	Kelurahan Oluhuta, Oluhuta Utara, Tumbihe, Pauwo, Padengo, Desa Poowo, Poowo Barat, Talango, dan Toto Selatan, Dutohe Barat	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
6	TILONGKBILA	Desa Moutong, Toto Utara, Bongopini, Bongoime, Permata, Berlian, Bongohulawa, TAmboo, Motilango, Lonuo, Butu, Ilohelumo, Tunggulo, Tunggulo Selatan Moutong	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
7	BOTUPINGGE	Desa Tanah Putih, Buata, Luwohu, Timbuwolo, Timbuwolo Timur, Panggulo, Sukma, Timbuwlo Tengah, panggulo Barat	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
8	KABILA BONE	Huangobotu Molotabu, Oluhuta, Buluango Modelomo, Botutonuo, Botubarani, Olele, Bintalahe	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
9	BONE PANTAI	Tolotio, tamboo, Bilungala, Tongo, Uabanga, Bilongala utara, Tihu, Lembah Hijau, Tunas Jaya, Ombulo Hijau, Batu Hijau, Kamiri, Pelita Hijau	Banjir, Tanah Longsor, Pitung Beliung,
10	BULAWA	Desa Bunga Hijau, Kaidundu, Bukit Hijau, Nyiur Hijau, Kaidundu Barat, Mopuya, Patoa, Mamungaa, Mamungaa Timur	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
11	BONE RAYA	Desa Inomata, Moopiya, Mootayu, Tombulilato, Alo, Mootinelo, Pelita Jaya Laut	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung





		Biru, Bunga, dan Mootawa	
12	BONE	Desa Tumbuh Mekar, Monano ,Sogitia, Molamahu, permata, Inogaluma, Taludaa, Masiaga, Ilohuuwa, , waluhu , Muara Bone, Mooduliyo , Bilolantunga , Moodulio ,	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
13	TAPA	Desa Langge, Donggala , Talulobutu , Talumopatu ,, Talulobutu Selatan , Kramat , Meranti	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
14	BULANGO UTARA	Desa Bandungan , Boidu , Tupa, Longalo , Tuloa , Lo maya , Suka Damai, Kopi dan .Bunuo	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
15	BULANGO ULU	Desa Mongiilo, Owata, Pilolaheya, Mongiilo Utara, Suka Makmur, Ilomata	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
16	BULANGO TIMUR	Desa Bulotalangi, Bulotalangi Barat , Bulotalangi Timur , Popodu , Toluwaya .	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
17	BULANGO SELATAN	Desa Ayula Selatan , Huntu selatan , Huntu Utara , Ayula Utara , Ayula Tilango , Lamahu , Mekar jaya , Ayula Timur , Sejahtera , Tinelo Ayula .	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung

Sumber : BPBD Kabupaten Bone Bolango

### 3. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN BENCANA

- Melakukan sosialisasi penyebaran potensi bencana alam
- Melakukan pelatihan kader relawan siaga bencana
- Pemetaan jalur evakuasi bencana
- Melakukan simulasi bencana

### 4. POTENSI BENCANA YANG DI PERKIRAKAN TERJADI

- Tanah Longsor
- Banjir Bandang
- Puting Beliung



#### **D. Pengelolaan Kawasan Khusus**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional.

Penetapan kawasan khusus di daerah otonom dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional seperti halnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, kawasan pengembangan industri strategis dan berteknologi tinggi (pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga permasyarakatan spesifik). Oleh karena itu, dalam penetapan kawasan khusus Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi wajib melibatkan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.

Ditinjau dari penjelasan diatas Kabupaten Bone Bolango belum memiliki kawasan khusus seperti yang dijelaskan di atas, tetapi hanya memiliki kawasan lindung yakni Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

#### **E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Selain bencana alam di negara kita juga ini sering timbul gangguan keamanan yang menimbulkan konflik horisontal, seperti: SARA, anarkisme, separatis, terorisme, walau di wilayah Kabupaten Bone Bolango hal-hal semacam itu tidak terjadi namun perlu terus di waspadai karena hal-hal seperti ini dapat saja terjadi setiap saat.

##### **1. Gangguan yang Terjadi**

Secara bertahap pelaksanaan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017, masih menggunakan perangkat Hukum berupa Perda yang terdiri dari



Perda Nomor 40 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, implementasi Perda tersebut sudah menunjukkan dampak yang positif dalam rutinitas masyarakat di Kabupaten Bone Bolango

Selama ini gangguan yang terjadi khususnya pada ketetraman ketertiban umum hanya bersifat lokal, seperti; pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, minum-minuman keras dan demonstrasi namun tidak anarkis, sedangkan gangguan bersifat SARA belum terjadi dan semoga tidak terjadi.

## **2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

Ada beberapa instansi yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban.

- a. Instansi diluar Pemerintah Daerah, adalah :
  - Kepolisian
  - Kejaksaan
  - TNI.
- b. Instansi lingkup Pemerintah Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat serta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

## **3. Penanggulangan.**

Jika terjadi suatu kejadian diwilayah Kabupaten Bone Bolango, maka penanggulangannya telah diatur dalam PROTAP di masing-masing Instansi dan saling melakukan koordinasi untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman sesama aparat di lapangan. Disamping itu pula, dilakukan dengan mengoptimalkan secara penuh KOMINDA (Komunitas Intelegen Daerah) dengan maksud memberikan keamanan lingkungan yang kondusif, sehingga berdampak pada ketentraman masyarakat.

Setiap kejadian perkara baik itu sifatnya lingkungan maupun lokal dalam penanggulangannya selalu diikutsertakan aparat keamanan khususnya Polri, utamanya untuk menjaga agar kejadian perkara tidak melebar dan membesar dan selalu mencari pemecahan masalahnya dengan melakukan dialog dan melibatkan pihak-pihak yang merasa terlibat dalam suatu kejadian perkara.



Berbagai konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat, akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan yang kondusif. Dengan adanya KOMINDA merupakan wadah kerjasama antara TNI, POLRI, Kejaksaan dan Instansi terkait/vertikal, tujuannya untuk melakukan deteksi dini dan mengumpulkan informasi-informasi baik dari perorangan maupun sekelompok masyarakat dalam bentuk intelejen, serta lapor cepat/tindak cepat guna disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati dalam pengambilan keputusan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka penanganan gangguan keamanan sebagai berikut :

- Sosialisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- Rapat Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- Rapat Komunitas Intelejen Daerah
- Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi substansi strategis Pertanggungjawaban Bupati Bone Bolango Tahun 2017 yakni sebagai berikut :

1. Dengan segala keterbatasan yang ada baik menyangkut sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan maupun faktor pendanaan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah berupaya seoptimal mungkin menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkenaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan demi tercapainya visi Kabupaten Bone Bolango.
2. Secara umum indikator kinerja makro Kabupaten Bone Bolango memperlihatkan trend peningkatan dari tahun sebelumnya, walaupun diakui masih terdapat beberapa aspek daya saing ekonomi dan kualitas pembangunan infrastruktur yang perlu terus dioptimalkan kinerjanya.
3. Belum tercapainya target pendapatan dalam kurung waktu dua belas bulan selama tahun 2017 perlu terus beroleh perhatian, yang tidak hanya semata-mata pada aspek perbaikan kinerja aparatur pengelola PAD dalam mengali sumber-sumber pendapatan PAD, tetapi juga antisipasi berbagai faktor eksternal, antara lain (a) regulasi pendukung yang mengatur retribusi belum sepenuhnya diatur; (b) masih ada regulasi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; (c) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan menaati regulasi tentang retribusi dan sejenisnya masih relatif rendah; (d) belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana publik yang menghasilkan sumber pendapatan retribusi daerah.





4. Untuk penyerapan (realisasi) belanja daerah dioptimalkan pemanfaatannya untuk pencapaian target kinerja output yang direncanakan. Adanya sisa anggaran belanja pada beberapa kegiatan tahun 2017 antara lain sebagai akibat dari kinerja pemerintah yang mengutamakan efisiensi serta efektifitas penggunaan anggaran.
5. Setiap permasalahan yang muncul sepanjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun 2017 telah ditempuh pemecahannya melalui pendekatan kerjasama, konsultasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah baik dengan Pemerintah Provinsi serta seluruh elemen masyarakat.

## B. Saran

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, disamping merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip *Good Governance and Clean Governance* juga merupakan proses *legalstanding* yang bersifat adminisratif sebagai wujud profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini merupakan wujud nyata akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui DPRD yang menjalankan fungsi kontrol sehingga terbangun proses *Check and Balance* antara Eksekutive dan Legislatif.

Oleh karena itu melalui proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat dikritisi kinerja Pemerintah Daerah serta adanya rekomendasi strategis yang dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dari semua elemen pembangunan daerah guna tercapainya komitmen bersama yakni terwujudnya pembangunan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Disamping itu pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dapat menyatukan presepsi, komitmen seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

